



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kebumen atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
- b. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan;
 - 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 8);
- w. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 105);



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

- x. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 89);
- y. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 30);
- z. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 30);
- aa. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 63);
- cc. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 69);
- dd. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 81);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen
- 2.2 Ekonomi Makro
- 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD
- 2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Neraca
 - 5.4 Laporan Operasional
 - 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

a. Letak Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7°27' – 7°50' lintang selatan dan 109°22' – 109°50' bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo

Sebelah timur : Kabupaten Purworejo

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 1
Peta Kabupaten Kebumen



*) Sumber : Kebumen dalam Angka

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

b. Demografi

1) Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen per 30 Juni 2022 adalah 1.409.951 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 743.323 jiwa dan perempuan sebanyak 721.808 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 461.823 KK. Sementara itu kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 1.057 jiwa/km².

2) Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebanyak 915.173 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 910.114 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sekitar 67,76% dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 69,63%.

Sementara itu nilai TPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar 6,03% mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 6,07%, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja.

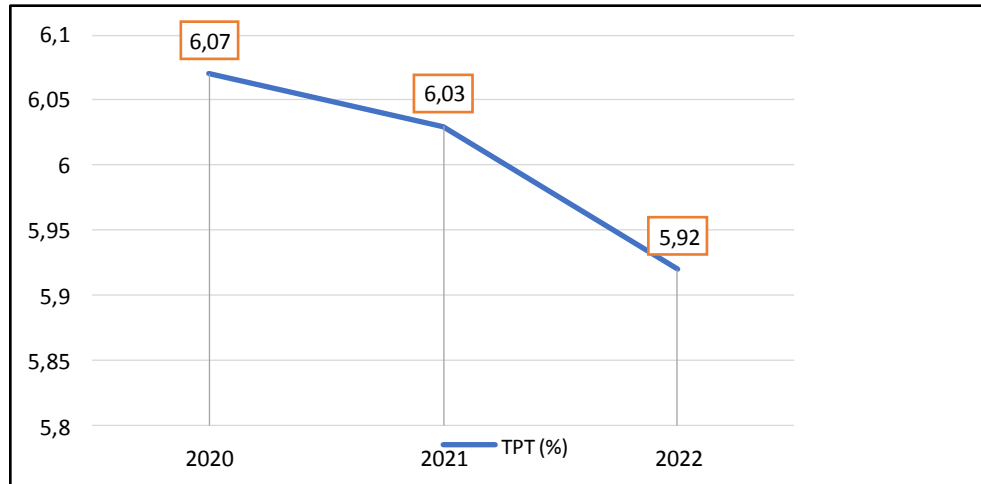
Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Adapun perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022

Grafik 1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen
Tahun 2020 – 2022



Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2022

Perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen selama 2020 – 2022 menunjukkan tren penurunan dari 6,07% pada tahun 2020 menjadi 5,92% pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat 6 orang yang menganggur.

Indikator kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat juga dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kebumen yang meningkat dari Rp1.835.000,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.035.890,00 pada tahun 2022 naik sebesar Rp200.890,00 atau 9,87%. Capaian urusan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020–2022

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,07	6,03	5,92
2	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja (%)	15,76	42,00	57,34
3	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	1.835.000	1.895.000	2.035.890

Sumber : BPS , Dinas Tenaga Kerja Kab. Kebumen, Data Diolah, 2022

c. Organisasi

Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati/Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1) DPRD

Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. DPRD Kabupaten Kebumen untuk periode tahun



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022

2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan Wakil Ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Munawar Kholil.

2) Bupati/Wakil Bupati

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-2026 dipimpin oleh H. Arif Sugiyanto, SH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M.

3) Perangkat Daerah (PD)

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan yang terbagi dalam 50 SKPD yang dirinci pada **Lampiran 1.**

d. Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sejahtera : bermakna suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata;
- b) Mandiri : bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;
- c) Berakhlak : berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etikadan karakter hidup yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022

tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;

- d) Bersama Rakyat : artinya masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2) Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.2 Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Secara umum selama periode Tahun 2018-2022 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 3,71% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,45%. Kemudian pada tahun 2022 ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh sebesar 4,50%.

Pada tahun 2022, berdasarkan angka proyeksi, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu 12,98%, disusul oleh Jasa Pendidikan sebesar 8,76%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,73%. Tidak terdapat lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif, yang terendah yakni pada Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,06%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Lapangan usaha transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sejalan dengan semakin menurunnya kasus *Covid-19* dan semakin dibukanya pembatasan perjalanan, serta tertanganinya kasus *Covid-19* dengan program vaksinasi yang masif. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara luring dan melakukan perjalanan antar daerah. Angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

b. Struktur Ekonomi

Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, di antaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di tahun 2022, di mana peranan berdasarkan harga perkiraan 2022 struktur PDRB Kabupaten Kebumen menunjukkan distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB di tahun 2022 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 21,53%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,23%; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,04%. Sementara itu distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04%.

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan perkapita di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi walau tidak dalam jarak yang terlalu besar. Penurunan terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 sebesar -7,45% dan -0,55%. Namun pada tahun 2021 pendapatan perkapita kembali naik dengan peningkatan 2,84% dan kembali meningkat sejauh 0,94% pada tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

d. Kualitas Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalan potensi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar 1,99% yaitu dari tahun 2018 sebesar 68,80% dan pada tahun 2022 sebesar 70,79% atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,49%. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama lima tahun terakhir semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional (*UNDP*), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi. Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat lima tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022 berturut-turut sebesar 72,79 dan 72,91.

e. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2020- 2022 sempat mengalami kenaikan dari 17,59% pada Tahun 2020 menjadi 17,83% pada Tahun 2021. Sementara itu, pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 16,41% atau 196,160 (ribu jiwa) dari jumlah penduduk miskin. Adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian pasca turunnya kasus *Covid-19* pada tahun 2022, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,42%. Capaian ini sudah sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 16,00%-17,00%. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 2. Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2022

Profil Kemiskinan	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	211.090	212.900	196.160
Persentase Penduduk Miskin	17,59%	17,83%	16,41%
Garis Kemiskinan (Rp)	380.557	390.599	416.004
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,62	3,24	3,41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,55	0,88	1,02

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2022

Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2020-2021 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2021 terjadi kenaikan yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin besar, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin jauh atau ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar. P1 pada tahun 2020 sebesar 2,62% dan kembali meningkat menjadi 3,24% pada tahun 2021, sedangkan P2 pada tahun 2020 sebesar 0,55% dan mengalami kenaikan menjadi 0,88% pada tahun 2021.

Tabel 3. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022

Uraian	% Penduduk Miskin			% Penurunan 2021-2022
	2020	2021	2022	
Kebumen	17,59	17,83	16,41	1,42

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2022

f. Inflasi

Laju inflasi adalah salah satu Indikator makro ekonomi yang penting. Tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari laju inflasi. Pengendalian inflasi dilakukan agar tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan untuk pengendalian inflasi adalah dengan melaksanakan Pemantauan dan pengendalian jalur-jalur distribusi serta penyediaan informasi harga bahan pokok dan pengendalian harga, menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat.

Pada akhir tahun 2017 tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen mencapai inflasi sebesar 3,01%. Angka inflasi tersebut naik pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,25 %. Setahun kemudian pada tahun 2019, tingkat inflasi menurun menjadi 2,18%.

Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Kebumen. Di daerah ini pada tahun 2020, terjadi inflasi sebesar 1,90%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi dan nasional. Pada



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022

tahun 2021, mengacu pada tingkat inflasi di Purwokerto maka tingkat inflasi di Kebumen sebesar 2,18%.

g. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengukuran disparitas (ketimpangan) pendapatan penduduk dengan menerapkan indeks Gini (*Gini ratio*) yang dikembangkan Corrado Gini, masyarakat Kabupaten Kebumen relatif memiliki ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan pada kurun waktu 2014-2016 Indeks gini cenderung bergerak pada kisaran 0,24 yaitu dari 0,2352 pada tahun 2014 menjadi 0,2412 pada tahun 2016 (nilai gini antara 0,20-0,35 menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang/pemerataan pendapatannya relatif sama (Todaro P. Michael, 1994). Indeks Gini selama periode 2012-2016, cenderung menurun dan masih dalam rentang tidak timpang. Namun demikian, selama tiga tahun terakhir, angkanya meningkat tipis. Hal ini menunjukkan ada potensi ketimpangan di masa depan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian.

Tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan per kapita paling tinggi adalah Kecamatan Kebumen (0,3206), Kecamatan Mirit (0,2907), Kecamatan Kuwarasan (0,2820). Sedangkan tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rendah adalah Kecamatan Padureso (0,0842), Kecamatan Poncowarno (0,1173), dan Kecamatan Puring (0,1348), dua merupakan kecamatan dengan tipologi wilayah daerah pegunungan (wilayah utara Kabupaten Kebumen) dan satu kecamatan dengan tipologi wilayah pesisir. Hasil pengolahan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17%. Berdasarkan kategori Bank Dunia, Kecamatan Padureso paling merata karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan sebesar 34,05%, disusul Kecamatan Poncowarno 31,74%, dan Kecamatan Pejagoan 31,19%. Kecamatan dengan kategori ketimpangan rendah tetapi dengan nilai paling rendah adalah Kecamatan Kebumen 21,30%. Menurut kecamatan, terlihat bahwa berdasarkan angka *gini ratio* maupun kriteria Bank Dunia seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah dengan gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 0,35 dan penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022

2.3 Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada porsi penganggaran, dimana struktur APBD Tahun Anggaran 2022 mengatur jenis pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan jenis belanja mengatur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sehingga proses pengelolaan keuangan dari penganggaran struktur APBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara umum anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dimana RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Serta Penerapan *Open-gov* dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani RKPD Tahun 2022 didalamnya tercantum adanya isu strategis pembangunan pada Tahun 2022, yang harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan alokasi anggaran, dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, antara lain :

- a. Pengembangan ekonomi lokal;
- b. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- d. Pembenahan infrastruktur pendukung ekonomi
- e. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan dan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, arah kebijakan pembangunan tahun kedua yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Bupati dan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah, antara lain untuk :

- a. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui *e-gov* dan peningkatan kapabilitas aparatur;
- b. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi;
- c. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan lokal berbasis komoditas unggulan;
- d. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah;
- e. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana;

Pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan lesunya aktivitas perekonomian juga berdampak bagi perolehan pendapatan daerah baik dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Arah kebijakan keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

daerah Kabupaten Kebumen adalah alat kebijakan fiskal daerah yaitu selain untuk memfasilitasi juga sebagai stimulan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan sinkronisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Kebijakan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam rangka peningkatan kinerjanya akan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sistematika pendapatan daerah Tahun 2022 telah disesuaikan dengan sistematika pendapatan daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan daerah pada tahun 2022 ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi PAD melalui:
 - a) Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
 - b) Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
 - c) Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
 - d) Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
 - f) Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
 - g) Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h) Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - i) Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
 - j) Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2022

- k) Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
 - l) Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
 - m) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah; serta
- 3) Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja daerah tahun 2022 secara umum dialokasikan dalam rangka:

- 1) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi:
- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 35,56%.
 - b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar 27,02%.
 - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN). Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 33,66% dari total belanja daerah.

- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan sebesar 13,82%.

Rincian alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* disajikan pada **Lampiran 3**.

- 2) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 3) Program Kepala Daerah terpilih sesuai dengan arahan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Program unggulan daerah diarahkan pada pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian serta penanggulangan kemiskinan;
- 4) Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan; dan
- 5) Optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal dan upaya padat karya pada pekerjaan infrastruktur daerah.

Struktur belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial. Arah kebijakan belanja operasi pada tahun 2021, antara lain:

a) Belanja Pegawai

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- (2) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- (3) Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2022;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- (4) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- (10) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

- (11) Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, dengan struktur honorarium berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2022.
- (2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
- (4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- (6) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
- (7) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing Perda;
- (8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*;
- (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
- (11) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Belanja Subsidi

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak *Covid-19* dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, yang telah disesuaikan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Anggaran sebelumnya dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2022

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebanyak dua kali, perubahan yang pertama dilakukan menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan perubahan yang kedua menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022. Adapun data pergeseran anggaran sampai dengan semester 1 tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 4**.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi;
- b. Berdasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp269.179.627.199,98. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS sebesar Rp4.995.026.294,00 Belanja BLUD RSUD Soedirman Rp42.767.044.674,00 BLUD RSUD Prembun Rp48.873.491.269,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp4.735.938.728,98 serta Silpa di RKUD sebesar Rp167.807.726.233,00;
- c. Perubahan Belanja daerah bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- d. Perubahan Belanja daerah bersumber DAK Non Fisik Belanja Operasional Sekolah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022, dan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, serta Peraturan Menteri Pendidikan,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja TA 2022;

- e. Perubahan Belanja daerah diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan;
- f. Perubahan Belanja daerah mengikuti kenaikan harga barang dan jasa sesuai kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Kebijakan belanja mengikuti kenaikan harga dengan mengubah volume/output kegiatan, namun diusahakan efisiensi sehingga tidak memerlukan tambahan Pagu Kegiatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2022 ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam pelaksanaannya APBD-Perubahan mengalami pergeseran sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 5**.

2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp440.433.051.000,00 atau 15,87% dari total Pendapatan, yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp121.170.200.000,00 atau 4,37% dari total Pendapatan;
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp32.501.085.000,00 atau 1,17% dari total Pendapatan;
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.600.000.000 atau sebesar 0,63% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp269.161.766.000,00 atau sebesar 9,70% dari total Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.326.694.694.000,00 atau sebesar 83,84% dari total pendapatan, yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.138.030.271.000,00 atau sebesar 77,04% dari total Pendapatan;
 - b) Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp188.664.423.000,00 atau sebesar 6,80% dari total Pendapatan.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp8.126.538.000,00 atau sebesar 0,29% dari total Pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

b. Belanja

Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp2.081.973.665.200,00 atau sebesar 69,14% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp1.263.249.947.500,00 atau sebesar 41,95% dari total Belanja;
 - b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp743.846.603.700,00 atau sebesar 24,70% dari total Belanja;
 - c) Belanja Subsidi sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 0,02% dari total Belanja;
 - d) Belanja Hibah sebesar Rp61.060.802.000,00 atau sebesar 2,03% dari total Belanja;
 - e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp13.316.312.000,00 atau sebesar 0,44% dari total Belanja.
- 2) Belanja Modal sebesar Rp293.658.929.800,00 atau sebesar 9,75% dari total Belanja, yang terdiri dari:
 - a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.823.562.000,00 atau sebesar 0,09% dari total Belanja;
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp107.595.993.800,00 atau sebesar 3,57% dari total Belanja;
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.830.252.000,00 atau sebesar 1,39% dari total Belanja;
 - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp133.634.445.000,00 atau sebesar 4,44% dari total Belanja;
 - e) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp7.293.737.000,00 atau sebesar 0,24% dari total Belanja;
- 3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.800.000.000,00 atau sebesar 0,09% dari Total Belanja;
- 4) Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp632.801.313.000,00 atau sebesar 21,01% dari Total Belanja, yang terdiri dari:
 - a) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp12.420.118.000,00 atau sebesar 0,41% dari total Belanja;
 - b) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp620.381.195.000,00 atau sebesar 20,60% dari total Belanja.

c. Pembiayaan

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD tahun 2022 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp235.979.625.000,00 yang berarti sisa lebih perhitungan anggaran minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp271.279.625.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp35.300.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas Anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.746.032.917.000,00 sedangkan pada APBD-Perubahan targetnya naik menjadi Rp2.775.254.283.000,00. Realisasi pendapatan di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.847.196.017.404,00 atau 102,59%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 yang sebesar Rp2.832.035.015.733,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.161.001.671,00 atau 0,54%. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	(%)
Pendapatan Daerah	2.775.254.283.000,00	2.847.196.017.671,00	71.941.734.671,00	102,59

Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dijelaskan pada **Lampiran 6**. Dari rincian pendapatan daerah tersebut dapat dilihat bahwa Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp440.433.051.000,00 dan terealisasi sebesar Rp512.346.375.475,00 atau sebesar 116,33%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp129.843.875.322,00 atau tercapai sebesar 107,16% dari target anggaran Rp121.170.200.000,00, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp28.375.110.419,00 dari target sebesar Rp32.501.085.000,00 atau sebesar 87,31%, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.640.585.052,00 atau sebesar 100,23% dari target Rp17.600.000.000,00 dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp336.486.804.682,00 dari target Rp269.161.766.000,00 atau sebesar 125,01%.

Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp2.326.694.694,00 terealisasi sebesar Rp2.329.703.641.941,00 atau 100,13%. Realisasi Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.123.296.694.941,00 atau 99,31%, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp206.406.947.000,00 atau 109,40%. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.145.999.988,00 dari target anggaran Rp8.126.538.000,00 atau sebesar 63,32%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pendapatan pada tahun 2022, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 81,82% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 17,99% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,18%.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun anggaran 2022 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp2.843.725.872.000,00 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.996.679.408.000,00 pada APBD-Perubahan, selanjutnya pada APBD pergeseran setelah perubahan ke dua Belanja Daerah tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp3.011.233.908.000,00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Belanja Daerah pada tahun anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	(%)
Belanja Daerah	3.011.233.908.000,00	2.824.358.293.725,00	(186.875.614.275,00)	93,79

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	(%)
1	BELANJA OPERASI	2.081.973.665.200,00	1.918.270.224.061,00	(163.703.441.139,00)	92,14
	Belanja Pegawai	1.263.249.947.500,00	1.142.207.137.167,00	(121.042.810.333,00)	90,42
	Belanja Barang dan Jasa	743.846.603.700,00	704.907.763.493,00	(38.938.840.207,00)	94,77
	Belanja Subsidi	500.000.000,00	313.864.348,00	(186.135.652,00)	62,77
	Belanja Hibah	61.060.802.000,00	59.752.651.931,00	(1.308.150.069,00)	97,86
	Belanja Bantuan Sosial	13.316.312.000,00	11.088.807.122,00	(2.227.504.878,00)	83,27
2	BELANJA MODAL	293.658.929.800,00	272.301.599.864,00	(21.357.329.936,00)	92,73
	Belanja Modal Tanah	2.823.562.000,00	1.387.839.580,00	(1.435.722.420,00)	49,15
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.595.993.800,00	102.152.506.285,00	(5.443.487.515,00)	94,94
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.830.252.000,00	34.758.067.305,00	(7.072.184.695,00)	83,09
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.634.445.000,00	126.620.498.535,00	(7.013.946.465,00)	94,75
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.774.677.000,00	7.382.688.159,00	(391.988.841,00)	94,96
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.800.000.000,00	1.295.204.500,00	(1.504.795.500,00)	46,26
	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00	1.295.204.500,00	(1.504.795.500,00)	46,26
4	BELANJA TRANSFER	632.801.313.000,00	632.491.265.300,00	(310.047.700,00)	99,95
	Belanja Bagi Hasil	12.420.118.000,00	12.402.615.800,00	(17.502.200,00)	99,86
	Belanja Bantuan Keuangan	620.381.195.000,00	620.088.649.500,00	(292.545.500,00)	99,95
	JUMLAH BELANJA	3.011.233.908.000,00	2.824.358.293.725,00	(186.875.614.275,00)	93,79



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Daerah tahun anggaran 2022 terealisasi 93,79% atau sebesar Rp2.824.358.293.725,00. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.918.270.224.061,00, Belanja Modal sebesar Rp272.301.599.864,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.295.204.500,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp632.491.265.300,00.

Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 69,14% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 9,75%, Belanja Tak Terduga sebesar 0,09% dan Belanja Transfer sebesar 21,01 %.

c. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	(%)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	271.279.625.000,00	271.279.627.198,98	2.198,98	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.179.625.000,00	269.179.627.198,98	2.198,98	100,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.300.000.000,00	35.300.000.000,00	0,00	100,00
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	18.200.000.000,00	18.200.000.000,00	0,00	100,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	235.979.625.000,00	235.979.627.198,98	2.198,98	100,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dari penjelasan komposisi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

a. Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan daerah TA 2022 terealisasi sebesar 102,59% namun untuk Pendapatan Retribusi Daerah hanya tercapai 87,31%. Pencapaian target pendapatan dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam memaksimalkan pendapatan daerah
- 2) Pemungutan pendapatan daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual.
- 3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 4) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dari pemerintah dan penerimaan dana bagi hasil dari provinsi;
- 5) Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah melalui pelatihan, bimbingan teknik dan *in house training*;
- 3) Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi.
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk menggali pendapatan.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi Dana-dana Transfer.

b. Belanja Daerah

Capaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 93,79%, kendala dalam pencapaian Belanja Daerah antara lain disebabkan :

- 1) Terdapat paket pekerjaan yang tidak terlaksana seratus persen
- 2) Belanja jasa Tenaga Kesehatan tidak terserap maksimal karena kasus *Covid-19* menurun, serta perhitungan belanja jasa tenaga kesehatan berdasarkan perhitungan kinerja SPM dan kinerja realisasi keuangan baru dilaksanakan pada anggaran perubahan.
- 3) Kegiatan Belanja Jasa Tenaga pendidikan yang tidak terserap optimal
- 4) Dana BTT direalisasikan untuk Bantuan korban bencana alam, Korban Kebakaran, Bantuan Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Bantuan Orang Kehabisan Bekal/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai kebutuhan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Yayasan dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.1.1. Aset Lancar

4.4.1.1.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

- 1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Termasuk kas adalah:

- 1) Pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 3) Penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 4) Potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- 5) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 6) Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan
- 7) Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Kas Dana BOS;
- 6) Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
- 7) Kas Lainnya.

Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b. Pengakuan

- 1) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- 2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

- 1) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- 2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) Rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.



4.4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- 1) Saham;
- 2) Deposito;
- 3) Surat Utang Negara;
- 4) Sertifikat Bank Indonesia;
- 5) Surat Perbendaharaan Negara;
- 6) Investasi Jangka Pendek BLUD.

b. Pengakuan

- 1) Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

c. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:

- 1) Saham dicatat sebesar harga perolehan;
- 2) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- 3) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- 4) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- 5) Surat Perbendaharaan Negara dicatat dengan nilai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- 6) Investasi Jangka Pendek BLUD dicatat sebesar nilai nominal.

d. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

- 1) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
- 2) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan
- 3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).

4.4.1.1.3. Piutang

a. Definisi

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - a) Piutang Pendapatan, meliputi:
 - (1) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - (2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - (3) Piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
 - b) Piutang lainnya, meliputi:
 - (1) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - (2) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

b. Pengakuan

Piutang dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

- a) Telah terbit atau keluar dokumen resmi yang menyatakan dan kewajiban secara jelas;
- b) Nilai piutang dapat diukur;
- c) Dapat dilakukan penagihan atas dokumen resmi pada nomor poin a), dan
- d) Kewajiban belum dilunasi.

c. Pengukuran

- 1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *Net Realizable Value (NRV)* dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan kualitas dan umur piutang.
- 3) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 4) Penggolongan kriteria kualitas piutang berdasarkan jenis piutang:

a) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Piutang Retribusi Daerah
Penggolongan Piutang Retribusi Daerah terdiri dari:
 - (1) Kualitas Lancar
 - a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar
 - a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan
 - a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet
 - a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- c) Piutang selain pajak dan retribusi
 - (1) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

(4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

5) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

6) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.

d. Penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.

e. Pengungkapan

1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas;
- c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

2) Penghapusan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusan piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

4.4.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka

a. Definisi

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang Pemerintah Daerah yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan.

b. Pengakuan

- 1) Beban dibayar di muka diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
- 2) Beban dibayar dimuka diakui dan dicatat sebagai biaya pada saat jasa diterima.
- 3) Beban dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

c. Pengukuran

Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/ dipertanggungjawabkan.

d. Penyajian

Biaya Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- 1) Rincian jenis, jumlah, saldo, dan batas waktu berakhirnya jasa yang diterima.
- 2) Disajikan secara neto.

4.4.1.1.5. Persediaan

a. Definisi

- 1) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
- b. Pengakuan
Persediaan diakui:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c. Pengukuran
 - 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - 2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
 - 3) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
 - 4) Persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- d. Penyajian
Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.
- e. Pengungkapan
Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



4.4.1.2. Aset Non Lancar

4.4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Non Permanen

- a) Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (3) Dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - (4) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (1) Merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
 - (2) Tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - (3) Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (4) Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - (5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
- d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
- g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.
- h) Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.
- i) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- j) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - (1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4. Penerima dana kooperatif.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

3. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 4. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 1. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 3. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 4. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 1. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 3. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 4. Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 5. Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Dana bergulir dengan *executing agency*;
- (a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 1. Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 1. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 2. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 3. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 4. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
- (a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 1. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

1. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 2. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 2. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 2. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 3. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 4. Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 5. Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Investasi Permanen
- a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
 - b) Investasi Permanen dapat berupa:
 - (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (2) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pengakuan
- 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
 - 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa dividen tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.
- c. Pengukuran
 - 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi Nonpermanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan
 - f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.
- d. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) Metode biaya;

Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas;

Metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.4.1.2.2. Aset tetap

a. Definisi

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

c) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan namun pada tanggal laporan keuangan belum dapat dimanfaatkan.

b. Pengakuan

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 2) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- 3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 4) batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 6. Minimal kapitalisasi Aset

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-

- 5) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
- 6) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Pengukuran
- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 2) Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - 3) Biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
 - a) Honorarium terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Belanja dokumen/administrasi tender;
 - c) Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - d) Belanja jasa konsultasi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
 - e) Belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap;
 - f) Biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.
 - 4) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - 5) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
 - 6) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
 - 7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;

- 8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- 9) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- 10) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;
- 12) Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*Capitalization Thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada **Lampiran 7** Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi.

d. Penyajian

- 1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan Aset Tetap:
 - a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c) Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan asumsi nilai residu Rp0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- d) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - e) Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap disajikan pada **Lampiran 8**.
 - f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.
 - g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- 3) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
 - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
 - 5) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Pengungkapan
- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 3) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.1.2.3. Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Definisi

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan

- 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

c. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

e. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

4.4.1.2.4. Dana Cadangan

a. Definisi

- 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Pengakuan

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

c. Pengukuran

- 1) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- 2) Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
- 3) Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

d. Penyajian

Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.1.2.5. Aset Lainnya

a. Definisi

- 1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

- 2) Aset Lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

- b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- (3) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*); dan
- (4) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*).

- d) Aset Tak Berwujud;

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa:

- (1) *Goodwill*;
- (2) Hak Paten atau Hak Cipta;
- (3) Royalti;
- (4) *Software*;

Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.

- (5) Lisensi;
- (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- (7) Aset Tak Berwujud Lainnya.

e) Aset Lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan

- 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 5) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 6) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer Operate,-BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 7) Pengakuan *Software* komputer:
 - a) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.
 - b) *Software* yang diperoleh dengan cara pembelian:
 - (1) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.

- (2) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- (3) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- (4) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

c. Pengukuran

- 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
- 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- 5) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- 6) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.
- 8) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 7. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (BULAN)
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	
1.5.03.01.01.01	Goodwill	120
1.5.03.01.01.02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	120
1.5.03.01.01.03	Hak Cipta	120
1.5.03.01.01.04	Hak Paten	120
1.5.03.01.01.05	<i>Software</i>	120
1.5.03.01.01.06	Kajian	120
1.5.03.01.01.07	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	120
1.5.03.01.01.08	Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	120
1.5.03.01.01.09	Aset Tidak Berwujud Lainnya	120

9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.

10) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*) dan Bangun Serah Guna (*Built, Transfer and Operate*); dan
- 4) Informasi lainnya yang penting.



4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.
- 4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.
- 2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya,



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

1) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

2) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

- 3) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

- 7) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.
- b. Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.
- c. Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah

- a. Definisi

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pengakuan

Pendapatan Daerah menggunakan basis kas sehingga Pendapatan Daerah diakui pada saat:

 - 1) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - 2) Diterima oleh SKPD; atau
 - 3) Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.
- c. Pengukuran
 - 1) Pendapatan Daerah diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Daerah bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- d. Penyajian

Pendapatan Daerah disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.
- e. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggungan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

1) Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.

2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

b. Pengakuan

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a) Pendapatan Asli Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b) **Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan**

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

c) **Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan**

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

d) **Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan**

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

e) **Pendapatan Transfer**

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

f) **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- b) Alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.
- c) Alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

c. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1) Pengakuan Beban pada SKPKD

a) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

d) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2) **Pengakuan Beban Pada SKPD**

a) **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GUP/TUP, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

b) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

c. **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.

d. **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. Kesalahan perhitungan matematis;
- c. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. Kesalahan interpretasi fakta;
- e. Kecurangan; atau
- f. Kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

a. **Kesalahan berulang dan sistemik**

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan Daerah maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

b. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam dua jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-Daerah atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

- a) Kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait.
- b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah /Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.
- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.
- d) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan Daerah/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan	2.775.254.283.000,00	2.847.196.017.404,00	71.941.734.404,00	102,59	2.832.035.015.733,00

Realisasi Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp2.847.196.017.404,00 yang terdiri dari:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	440.433.051.000,00	512.346.375.475,00	71.913.324.475,00	116,33	472.017.087.115,00
Pendapatan Transfer	2.326.694.694.000,00	2.329.703.641.941,00	3.008.947.941,00	100,13	2.222.632.960.883,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.126.538.000,00	5.145.999.988,00	(2.980.538.012,00)	63,32	137.384.967.735,00
Jumlah	2.775.254.283.000,00	2.847.196.017.404,00	71.941.734.404,00	102,59	2.832.035.015.733,00

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2022 mencapai target sebesar 102,59% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp71.941.734.404,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp15.160.587.358,00 atau naik sebesar 0,53% .

Dari tabel 9 dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan utama pada Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 81,82% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyokong Pendapatan Daerah sebesar 17,99% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,18%. Komponen PAD naik, dari komposisi pada TA 2021 yang sebesar 17,12%

Realisasi PAD secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada TA 2022 realisasinya sebesar Rp512.346.375.475,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp472.017.087.115,00 atau naik sebesar 8,54%. Pendapatan Transfer tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.329.703.641.941,00 atau 100,13% mengalami penurunan sebesar 4,82% jika dibandingkan realisasi TA 2021 yang bernilai Rp2.196.678.433.815,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp5.145.999.988,00 atau 63,32%, jika dibandingkan realisasi TA 2021 yang bernilai



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rp137.384.967.735,00,00 secara nominal Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 96,85%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
PAD	440.433.051.000,00	512.346.375.475,00	71.913.324.475,00	116,33	472.017.087.115,00

Realisasi PAD TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar Rp512.346.375.475,00 terdiri atas:

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan TA 2021

PAD	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Daerah	121.170.200.000,00	129.843.875.322,00	8.673.675.322,00	107,16	112.474.854.190,00
Retribusi Daerah	32.501.085.000,00	28.375.110.419,00	(4.125.974.581,00)	87,31	23.652.739.277,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.600.000.000,00	17.640.585.052,00	40.585.052,00	100,23	16.552.860.815,00
Lain-lain PAD yang Sah	269.161.766.000,00	336.486.804.682,00	67.325.038.682,00	125,01	319.336.632.833,00
Jumlah	440.433.051.000,00	512.346.375.475,00	71.913.324.475,00	116,33	472.017.087.115,00

Dari empat objek PAD terdapat tiga obyek PAD yang mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah tercapai sebesar 107,16%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar 100,23% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar tercapai 125,01%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 87,31%. Namun demikian, persentase capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 mengalami kenaikan dari TA 2021 yang hanya tercapai 80,12% dari target.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pajak Daerah	121.170.200.000,00	129.843.875.322,00	8.673.675.322,00	107,16	112.474.854.190,00

Realisasi Pajak Daerah pada TA 2022 mencapai target sebesar 107,16% dari target anggaran sebesar Rp121.170.200.000,00 terealisasi sebesar Rp129.843.875.322,00. Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memungut 11 Jenis Pajak Daerah. Pemungutan 11 Jenis Pajak Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah dengan Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk teknis pada Peraturan Kepala Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp129.843.875.322,00. Terdapat 11 Jenis Pajak Daerah yang dipungut dijelaskan sebagaimana berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021

Pajak Daerah	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	1.800.000.000,00	2.455.684.956,00	655.684.956,00	136,43	1.549.701.389,00
Pajak Restoran	8.500.000.000,00	11.159.401.535,00	2.659.401.535,00	131,29	8.564.276.975,00
Pajak Hiburan	400.000.000,00	543.034.159,00	143.034.159,00	135,76	293.251.222,00
Pajak Reklame	1.800.000.000,00	2.001.768.503,00	201.768.503,00	111,21	1.585.434.410,00
Pajak Penerangan Jalan	38.500.000.000,00	39.261.189.956,00	761.189.956,00	101,98	31.323.888.090,00
Pajak Parkir	450.000.000,00	631.035.253,00	181.035.253,00	140,23	407.864.131,00
Pajak Air Tanah	380.000.000,00	451.312.560,00	71.312.560,00	118,77	369.632.900,00
Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.100.000,00	100.000,00	102,00	5.500.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.100.000.000,00	702.807.750,00	(397.192.250,00)	63,89	1.262.024.726,00
PBB-P2	54.035.000.000,00	56.649.407.691,00	2.614.407.691,00	104,84	48.772.429.933,00
BPHTB	14.200.200.000,00	15.983.132.959,00	1.782.932.959,00	112,56	18.340.850.414,00
Jumlah	121.170.200.000,00	129.843.875.322,00	8.673.675.322,00	107,16	112.474.854.190,00

Pendapatan dari Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp129.843.875.322,00 naik sebesar 15,44% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah TA 2021 yang sebesar Rp112.474.854.190,00. Dari 11 objek pendapatan Pajak Daerah rata-rata tercapai di atas 100,00% dari target anggaran. Pendapatan pajak dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Adapun Rincian Pendapatan Pajak Dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, dimana tarif pengenaan pajak hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.

Penerimaan Pajak Hotel TA 2022 dengan target sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.455.684.956,00 atau 136,43%. Realisasi pajak hotel pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp905.983.567,00 atau 58,46% dari TA 2021.

b. Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran, dimana tarif pajak restoran sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Penerimaan Pajak Restoran TA 2022 dengan target sebesar Rp8.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.159.401.535,00 atau 131,29%. Realisasi pajak restoran TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.595.124.560,00 atau 30,30% dari TA 2021. Dimana Pajak Rumah Makan terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rp2.407.041.145,00 atau 240,70% dan Pajak Jasa Boga /Katering sebesar Rp8.752.360.390,00 atau 116,7%. Rincian Pajak Restoran dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14.Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	2.407.041.145,00	1.407.041.145,00	240,70	936.556.184,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.500.000.000,00	8.752.360.390,00	1.252.360.390,00	116,70	7.627.720.791,00
Jumlah	8.500.000.000,00	11.159.401.535,00	2.659.401.535,00	131,29	8.564.276.975,00

c. Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan. Adapun tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) untuk tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 2) untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- 3) untuk kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
- 4) untuk pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 5) untuk diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- 6) untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
- 7) untuk permainan *bilyard*, *golf* dan *bowling* sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 8) untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- 9) untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- 10) untuk pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).

Penerimaan Pajak Hiburan TA 2022 dengan target sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp543.034.159,00 atau 135,76%. Realisasi pajak hiburan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp249.782.937,00 atau 85,18% dari TA 2021. Rincian Tabel Pajak Hiburan dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	225.000.000,00	176.482.225,00	(48.517.775,00)	78,44	122.379.617,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000,00	340.015.334,00	190.015.334,00	226,68	148.213.405,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	26.536.600,00	6.536.600,00	132,68	22.508.200,00
Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	150.000,00
Jumlah	400.000.000,00	543.034.159,00	143.034.159,00	135,76	293.251.222,00

Pajak Hiburan yang realisasinya mengalami kenaikan di TA 2022 yaitu Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp54.102.608,00 atau 44,21% dari TA 2021, Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan sebesar Rp191.801.929,00 atau 129,41% Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) mengalami kenaikan sebesar Rp4.028.400,00 atau 17,90% dari TA 2021.

d. Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Penerimaan Pajak Reklame TA 2022 dengan target sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.001.768.503,00 atau 111,21%. Realisasi pajak reklame TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp416.334.093,00 atau 26,00% dari TA 2021. Rincian Tabel Pajak Hiburan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.225.000.000,00	1.263.042.519,00	38.042.519,00	103,11	932.724.072,00
Pajak Reklame Kain	575.000.000,00	738.725.984,00	163.725.984,00	128,47	652.710.338,00
Jumlah	1.800.000.000,00	2.001.768.503,00	201.768.503,00	111,21	1.585.434.410,00

e. Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif sebagai berikut Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Wajib Pajak untuk pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Karena penggunaan listrik di Kabupaten Kebumen adalah listrik yang disediakan oleh PLN maka yang menjadi wajib pajak adalah PLN. Untuk kelancaran pemungutan pajak penerangan jalan, telah disusun Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen antara Pemerintah Kabupaten dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cilacap dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan Nomor 0065.Pj/AGA.04.01/C03010000/2022, Nomor 510.7.2/3473/VI/2022 Tahun 2022, dan Nomor 510.7.2/1200/VI/2022 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2022 dengan target Rp38.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.261.189.956,00 atau 101,98%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.937.301.866,00 atau sebesar 25,34%.

f. Pajak Parkir

Pemungutan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

Pendapatan Pajak Parkir TA 2022 dari target sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp631.035.253,00 atau 140,23%. Bila dibandingkan realisasi TA 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp223.171.122,00 atau 54,72%.

g. Pajak Air Tanah

Pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Perolehan Air Tanah.

Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022 ditargetkan sebesar Rp380.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp451.312.560,00 atau 118,77%. Dibanding realisasi TA 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

yang sebesar Rp369.632.900,00 penerimaan Pajak Tanah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp81.679.660,00 atau 22,10%.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan Pajak Sarang Burung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet.

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 terealisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 102,00% dari target Rp5.000.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp400.000,00 atau 7,27% dari TA 2021 yang sebesar Rp5.500.000,00. Hal ini disebabkan oleh terdapat hanya satu WP yaitu goa sarang burung walet alam di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, sedangkan WP sarang burung walet Gedung/perumahan belum ada, harga sarang burung walet cenderung tidak kompetitif karena sedikitnya pembeli, sehingga daripada disimpan dalam waktu lama dan beratnya semakin berkurang maka harus segera dijual, pengelolaan sarang burung walet di goa sarang burung walet di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah yang selama ini dipanen empat kali dalam setahun, hanya dipanen tiga kali dalam setahun, yang satu musim tidak dipanen untuk konservasi agar populasi burung walet meningkat, untuk peningkatan populasi burung walet melalui konservasi, diharapkan dalam lima tahun ke depan populasi bisa meningkat.

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 114 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan dari target sebesar Rp1.100.000.000,00 terealisasi Rp702.807.750,00 atau 63,89%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp559.216.976,00 atau 44,31%, hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tidak lagi memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sektor penyedia jasa. Pajak MBLB hanya dipungut dari penambang yang berizin saja. Pada tahun 2022, dari lima belas usaha pertambangan andesit berizin di Kabupaten Kebumen, yang memproduksi hanya lima sedangkan penambang yang lain tidak memproduksi dikarenakan kesulitan biaya operasional untuk produksi. Penurunan ini juga disebabkan oleh tidak ada pesanan batu andesit.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PBBP2 TA 2022 terealisasi sebesar Rp56.649.407.691,00 atau 104,84% dari target sebesar Rp54.035.000.000,00 Realisasi PBBP2 TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.876.977.758,00 atau 16,15% dari realisasi TA 2021 yang bernilai Rp48.772.429.933,00

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Pemungutan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen.

Pendapatan BPHTB terealisasi sebesar Rp15.983.132.959,00 atau 112,56% dari target sebesar Rp14.200.200.000,00 Pendapatan BPHTB TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12,86% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp 18.340.850.414,00. Pendapatan dari BPHTB tergantung dari transaksi yang terjadi pada tahun tersebut. Pada TA 2022 terjadi penurunan transaksi pembelian rumah dan tanah sehingga menyebabkan turunnya pendapatan dari BPHTB.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Retribusi Daerah	32.501.085.000,00	28.375.110.419,00	(4.125.974.581,00)	87,31	23.652.739.277,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 ditargetkan sebesar Rp32.501.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.375.110.419,00 atau 87,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.722.371.142,00 atau 19,97%.

Retribusi Daerah, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari tiga jenis Retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari lima belas jenis Retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari sebelas jenis Retribusi, Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari enam jenis Retribusi. Retribusi Izin gangguan yang merupakan salah satu rincian dalam Retribusi Perizinan Tertentu dihapus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017, sedangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, diamanatkan oleh PP Nomor 16 Tahun 2021 diubah menjadi Retribusi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Pemerintah Kabupaten Kebumen memungut Retribusi Jasa Umum sebanyak sembilan jenis, Retribusi Jasa Usaha sebanyak delapan jenis dan Retribusi Perizinan tertentu sebanyak dua jenis. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021 dijelaskan pada **Lampiran 9**.

Dari 19 rincian obyek pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 terdapat sembilan yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan 180,03%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 107,33%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercapai 168,02%, Retribusi Pelayanan Pendidikan tercapai 103,19%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tercapai 139,87%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 120,19%, Retribusi Tempat Khusus Parkir 103,68%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa 107,30%, dan Retribusi Rumah Potong Hewan tercapai 173,00%.

Sedangkan sepuluh lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 76,13%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 86,67%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 64,93%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 47,01%, Retribusi Terminal sebesar 68,38%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 66,52%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 66,63%, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 48,38%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah disebabkan adanya jalan koridor satu arah yang menyebabkan titik parkir di Jalan Soekarno Hatta sudah tidak menjadi titik parkir (non aktif).

Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target disebabkan karena sebagian besar kios dan los tutup dan tidak aktif berjualan dan banyaknya *minimarket*/pasar *online*/pasar tradisional.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target disebabkan karena masih banyak kendaraan yang terlambat untuk menguji sesuai dengan habis batas waktunya dan terdapat batasan umur kendaraan angkutan umum.

Retribusi Tempat Pelelangan merupakan retribusi pelelangan ikan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, tidak tercapainya target pendapatan disebabkan karena faktor cuaca ekstrim (gelombang tinggi, angin dan arus laut kencang) yang menghalangi nelayan melaut serta terjadi penurunan produksi untuk komoditas perikanan yang memiliki harga tinggi. Penurunan retribusi pelelangan ikan ini juga disebabkan adanya dominasi komoditas tangkap dengan nilai ekonomi yang rendah seperti ubur-ubur.

Kendala pendapatan Retribusi Terminal tidak tercapai dikarenakan menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dan masuk terminal non bus, hal tersebut merupakan dampak dari perubahan perilaku masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi *online*.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak tercapai karena adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa Layanan yang diberikan sebelum ditetapkan peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut. Peraturan pelaksanaan untuk pemungutan PBG ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2023.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak mencapai target disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan, karena menjamur tempat wisata yang baru sebagai destinasi pilihan.

Sementara itu Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak memenuhi target dikarenakan belum ada penambahan kendaraan baru dan untuk menentukan jumlah trayek baru perlu ada survei *load factore*, waktu perpanjangan SK Ijin Trayek berlaku lima tahun, banyak jalur trayek yang kendaraannya sudah tidak beroperasi karena sepi pengguna angkutan dan batasan usia kendaraan angkutan umum 25 tahun. Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD dijelaskan pada **Lampiran 10**.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.600.000.000,00	17.640.585.052,00	40.585.052,00	100,23	16.552.860.815,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang terealisasi sebesar Rp17.640.585.052,00 atau 100,23% dari target sebesar Rp17.600.000.000,00, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	TA 2022			%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:					
a. Apotik Luk Ulo	171.246.000,00	190.336.846,00	19.090.846,00	111,15%	171.246.615,00
b. Perusda Air Minum (PDAM)	1.805.209.000,00	2.026.822.323,00	221.613.323,00	112,28%	1.858.068.270,00
c. PD BPR Kebumen	1.362.256.000,00	1.488.038.292,00	125.782.292,00	109,23%	1.362.256.022,00
d. PD BPR BKK Kebumen	3.655.192.000,00	3.602.748.954,00	(52.443.046,00)	98,57%	3.655.192.203,00
e. Bank Jateng	10.606.097.000,00	10.332.638.637,00	(273.458.363,00)	97,42%	9.506.097.705,00
Jumlah	17.600.000.000,00	17.640.585.052,00	40.585.052,00	100,23%	16.552.860.815,00

Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 naik sebesar 6,57% dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp16.552.860.815,00. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pembagian deviden dari Perusahaan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Lain-lain PAD yang Sah	269.161.766.000,00	336.486.804.682,00	67.325.038.682,00	125,01	319.336.632.833,00

Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp336.486.804.682,00 terdiri dari:

Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.085.000.000,00	1.829.716.362,00	744.716.362,00	168,64	1.748.608.031,00
Hasil Kerja Sama Daerah	11.204.000,00	11.204.594,00	594,00	100,01	27.915.525,00
Jasa Giro	2.944.000.000,00	2.205.784.880,00	(738.215.120,00)	74,92	2.525.596.113,00
Pendapatan Bunga	11.000.000.000,00	9.845.890.393,00	(1.154.109.607,00)	89,51	10.048.808.180,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	101.398.261,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000,00	231.123.774,00	(18.876.226,00)	92,45	284.950.359,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	213.000.000,00	372.197.893,00	159.197.893,00	174,74	23.530.800,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	245.000.000,00	302.104.274,00	57.104.274,00	123,31	439.796.371,00
Pendapatan BLUD	252.698.014.000,00	320.331.784.898,00	67.633.770.898,00	126,76	294.669.542.386,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	37.500.000,00	42.750.000,00	5.250.000,00	114,00	35.400.000,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	359.548.000,00	978.602.614,00	619.054.614,00	272,18	9.055.846.807,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00	335.645.000,00	35.645.000,00	111,88	375.240.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	269.161.766.000,00	336.486.804.682,00	67.325.038.682,00	125,01	319.336.632.833,00

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 terealisasi 125,01% naik sebesar 5,37% dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp319.336.632.833,00. Rincian objek pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang melampaui target anggaran ada delapan objek, yaitu Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar 168,64%, Hasil Kerja Sama Daerah sebesar 100,01%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah 174,74%, Pendapatan Dari Pengembalian sebesar 123,31%, Pendapatan BLUD sebesar 126,76%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar 114,00%, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) 272,18%, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 111,88%. Tabel Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD disajikan pada **Lampiran 11**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Transfer	2.326.694.694.000,00	2.329.703.641.941,00	3.008.947.941,00	100,13	2.222.632.960.883,00

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.326.694.694.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.329.703.641.941,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan Transfer Antar Daerah. Pencatatan realisasi pendapatan Transfer berdasarkan pada realisasi transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	2.138.030.271.000,00	2.123.296.694.941,00	(14.733.576.059,00)	99,31	2.059.293.466.080,00
Transfer Antar Daerah	188.664.423.000,00	206.406.947.000,00	17.742.524.000,00	109,40	163.339.494.803,00
Jumlah	2.326.694.694.000,00	2.329.703.641.941,00	3.008.947.941,00	100,13	2.222.632.960.883,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 tercapai sebesar Rp2.329.703.641.941,00 atau sebesar 100,13% dari target anggaran sebesar Rp2.326.694.694.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp2.222.632.960.883,00 realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,82%.

Pendapatan Transfer berasal dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari:

1. Dana Insentif Daerah (DID)
2. Dana Desa

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Selain pendapatan Transfer tersebut diatas berdasarkan terbitnya PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility (TDF)*, dimana *TDF* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penyaluran dana DBH pada rekening *TDF* sebagaimana diinformasikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-802/WPB.14/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *TDF* ke Daerah (*TDF-TKD*) Tahun 2022, bahwa pada Bulan Desember 2022 telah disalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Rekening *TDF* pada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui Nomor Rekening 519000345980 dengan nama rekening Rek Lain BI *TDF* TKD Kab Kebumen. Adapun nilai Saldo Pokok per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.228.271.591,00 dan Remunerasi bulan Desember 2022 sebesar Rp1.025.484,44. Terhadap pendapatan transfer DBH tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum melakukan pencatatan pada *on-face* LKPD Kabupaten Kebumen. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang memuat tentang BAS terkait dana *TDF-TKD*.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Transfer Pemerintah Pusat	1.721.273.898.000,00	1.706.540.321.941,00	(14.733.576.059,00)	99,14	1.607.599.153.080,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 terealisasi sebesar 99,14% atau Rp1.706.540.321.941,00 dari target anggaran sebesar Rp1.721.273.898.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp1.607.599.153.080,00 realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,80%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	
DBH	34.516.861.000,00	38.220.093.261,00	3.703.232.261,00	110,73	41.397.337.217,00
DAU	1.176.643.410.000,00	1.173.705.068.800,00	(2.938.341.200,00)	99,75	1.179.288.910.000,00
DAK	510.113.627.000,00	494.615.159.880,00	(15.498.467.120,00)	96,96	386.912.905.863,00
Jumlah	1.721.273.898.000,00	1.706.540.321.941,00	(14.733.576.059,00)	99,14	1.607.599.153.080,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tercapai sebesar 99,31%, yang terdiri dari DBH sebesar 110,73%, DAU sebesar 99,75%, dan DAK sebesar 96,96%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi DBH TA 2022 sebesar Rp38.220.093.261,00 atau 110,73% dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Rincian Anggaran dan Realisasi DBH TA 2022 dan TA 2021

DBH	Realisasi TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.416.262.000,00	7.280.169.217,00	(136.092.783,00)	98,16	11.513.260.493,00
DBH PPh Pasal 21	14.175.628.000,00	15.598.200.774,00	1.422.572.774,00	110,04	16.423.637.908,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.765.190,00
DBHCHT	10.261.970.000,00	11.006.705.380,00	744.735.380,00	107,26	8.650.954.298,00
DBH SDA Minyak Bumi	222.586.000,00	1.630.978.982,00	1.408.392.982,00	732,74	12.048.900,00
DBH SDA Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	60.022.500,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	55.502.000,00	265.591.359,00	210.089.359,00	478,53	108.913.482,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.400,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.886.000,00	2.629.718,00	743.718,00	139,43	1.271.925,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	424.716.000,00	477.506.831,00	52.790.831,00	112,43	651.244.971,00
DBH SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	0,00	100,00	1.357.619.150,00
Jumlah	34.516.861.000,00	38.220.093.261,00	3.703.232.261,00	110,73	41.397.337.217,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pagu Anggaran DAU TA 2022 Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran DAU TA 2022 Tahap Kedua dalam rangka penggantian Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Covid-19*. Realisasi pendapatan dari DAU TA 2022 adalah sebesar Rp1.173.705.068.800,00 atau 99,75% dari pagu anggaran. Penerimaan DAU turun sebesar 0,47% dibanding dengan realisasi TA 2021.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi DAK TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
DAK Fisik	76.474.859.000,00	70.275.269.743,00	(6.199.589.257,00)	91,89	78.732.325.023,00
DAK Non Fisik	433.638.768.000,00	424.339.890.137,00	(9.298.877.863,00)	97,86	308.180.580.840,00
Jumlah	510.113.627.000,00	494.615.159.880,00	(15.498.467.120,00)	96,96	386.912.905.863,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi DAK TA 2022 Rp494.615.159.880,00 atau sebesar 96,96% dari target anggaran sebesar Rp510.113.627.000,00 atau bertambah sebesar 27,84% dibandingkan realisasi TA 2021 yang terealisasi sebesar Rp386.912.905.863,00. Rincian DAK dijelaskan sebagai berikut:

a. DAK Fisik

Realisasi pendapatan dari DAK Fisik tercapai sebesar Rp70.275.269.743,00,00 atau 91,89% dari target anggaran sebesar Rp76.474.859.000,00. Dibandingkan dengan TA 2021 yang realisasinya sebesar Rp78.732.325.023,00, realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 10,74%. Rincian realisasi DAK Fisik TA 2022 dijelaskan pada **Lampiran 12**.

b. DAK Non Fisik

Realisasi pendapatan dari DAK Non Fisik TA 2022 tercapai sebesar Rp424.339.890.137,00 atau 97,86% dari target sebesar Rp433.638.768.000,00. Dibandingkan dengan TA 2021 yang realisasinya sebesar Rp308.180.580.840,00, realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,69%. Rincian DAK Non Fisik dijelaskan pada **Lampiran 13**.

Realisasi Dak Non Fisik TA 2022 sebesar Rp424.339.890.137,00 termasuk didalamnya realisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang disalurkan langsung ke Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta yaitu yang terdiri dari Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan. Adapun rincian Realisasi Dana BOS yaitu DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp122.242.773.400,00 dan DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp2.960.000.000,00. Sedangkan Dana BOP PAUD terealisasi sebesar Rp19.731.047.000,00 dan realisasi Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp14.516.584.963,00.

Pada Penganggaran APBD Murni TA 2022 Pendapatan Dana BOS dianggarkan pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah Dana BOS, namun karena memperhatikan ketentuan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dimana menyatakan bahwa Dana BOS termasuk DAK Non Fisik maka pada APBD Perubahan Pendapatan Hibah Dana BOS dirubah ke rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
DID	0,00	0,00	0,00	0,00	46.433.860.000,00
Dana Desa	416.756.373.000,00	416.756.373.000,00	0,00	100,00	405.260.453.000,00
Jumlah	416.756.373.000,00	416.756.373.000,00	0,00	100,00	451.694.313.000,00

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terealisasi Rp416.756.373.000,00 atau sebesar 100% dari target anggaran sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rp416.756.373.000,00 atau berkurang sebesar 7,73% dibandingkan realisasi Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp451.694.313.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak memperoleh DID karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Sehingga bila dibandingkan realisasi TA 2021 yang terealisasi sebesar Rp46.433.860.000,00 maka Pendapatan DID mengalami penurunan sebesar 100%.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Penganggaran Dana Desa pada TA 2022 yang bersumber dari APBN, dialokasikan mendasari ketentuan PMK Nomor 190/PMK.07/2021. Realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp416.756.373.000,00 atau 100% dari pagu anggaran. Dana Desa disalurkan langsung dari RKUN kepada 449 Desa. Adapun rincian Penerimaan Dana Desa per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih /Kurang (Rp)	%	
Transfer Pemerintah Provinsi	188.664.423.000,00	206.406.947.000,00	17.742.524.000,00	109,40%	137.384.967.735,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 terealisasi sebesar Rp206.406.947.000,00 atau 109,40% dari target senilai Rp188.664.423.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan sebesar 50,24%. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.423.000,00	175.763.136.000,00	18.271.713.000,00	111,60	157.491.424.803,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	31.173.000.000,00	30.643.811.000,00	(529.189.000,00)	98,30	5.848.070.000,00
Jumlah	188.664.423.000,00	206.406.947.000,00	17.742.524.000,00	109,40	163.339.494.803,00

Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp175.763.136.000,00 atau 111,60% dari target sebesar Rp157.491.423.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar 11,60%. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya terealisasi sebesar Rp30.643.811.000,00 atau 98,30% dari target sebesar Rp31.173.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya mengalami kenaikan sebesar 424,00%.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan Pendapatan Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB)
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022			%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		
PKB	62.383.802.000,00	63.810.310.460,00	1.426.508.460,00	102,29	42.040.261.756,00
BBNKB	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393.448.963,00
PBBKB	36.627.293.000,00	40.923.200.410,00	4.295.907.410,00	111,73	35.767.320.593,00
PAP	366.066.000,00	344.556.764,00	(21.509.236,00)	94,12	344.334.231,00
Pajak Rokok	58.114.262.000,00	70.685.068.366,00	12.570.806.366,00	121,63	56.946.059.260,00
Jumlah	157.491.423.000,00	175.763.136.000,00	18.271.713.000,00	111,60	157.491.424.803,00

Pada TA 2022 Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp175.763.136.000,00 atau 111,60% dari anggaran Rp157.491.423.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp157.491.424.803,00 Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar 11,60%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang tidak memenuhi target adalah PAP yang hanya terealisasi sebesar Rp344.556.764,00 dari target Rp366.066.000,00 atau hanya tercapai sebesar 94,12%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Pada TA 2022 Pendapatan BBNKB dianggarkan menjadi satu pada anggaran PKB, sehingga pada Realisasi PKB sebesar Rp63.810.310.460,00 terdiri atas realisasi PKB sebesar Rp42.822.541.304,00 dan BBNKB sebesar Rp20.987.769.156,00.

5.1.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya untuk TA 2022 dari anggaran sebesar Rp31.173.000.000,00 terealisasi sebesar 98,30% atau Rp30.643.811.000,00 yang merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 . Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	TMMD	753.000.000	753.000.000,00
2	Bantuan Sarana Prasarana	29.440.000.000	28.966.360.000,00
	Peningkatan Ruas Jalan Geblug-Candirenggo	2.440.000.000	2.355.537.000,00
	Peningkatan Ruas Jalan Gunungsari - Selogiri Kabupaten Kebumen	4.500.000.000	4.441.283.000,00
	Peningkatan Ruas Jalan Krakal - Wadasmalang Kabupaten Kebumen	5.500.000.000	5.397.654.000,00
	Peningkatan Ruas Jalan Lokidang - Banjarnegara	7.000.000.000	6.907.602.000,00
	Ruas Jalan Karanggayam - Kebakalan Kabupaten Kebumen	10.000.000.000	9.864.284.000,00
3	Bantuan Pendidikan	980.000.000	924.451.000,00
	Bantuan Pendidikan Bantuan manajemen pendataan pendidikan	90.000.000	90.000.000,00
	Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP Negeri	300.000.000	294.960.000,00
	Bantuan Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD Negeri	210.000.000	191.625.000,00
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri	290.000.000	263.916.000,00
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Negeri	90.000.000	83.950.000,00
	Jumlah	31.173.000.000	30.643.811.000

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.126.538.000,00	5.145.999.988,00	(2.980.538.012,00)	63,32	137.384.967.735,00

Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp5.145.999.988,00 terdiri dari pendapatan hibah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Hibah	8.126.538.000,00	5.145.999.988,00	(2.980.538.012,00)	63,32	8.794.749.700,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	128.590.218.035,00
Jumlah	8.126.538.000,00	5.145.999.988,00	(2.980.538.012,00)	63,32	137.384.967.735,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Hibah	8.126.538.000,00	5.145.999.988,00	(2.980.538.012,00)	63,32	8.794.749.700,00

Realisasi Pendapatan hibah dari pemerintah pusat TA 2022 sebesar Rp5.145.999.988,00 atau tercapai 63,32% dari target sebesar Rp8.126.538.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp8.794.749.700,00 realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 41,49%. Rincian Pendapatan Hibah TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hibah Air Minum	2.285.500.000,00	1.764.000.000,00	521.500.000,00	29,56
Hibah IPDMIP	2.860.499.988,00	6.508.749.700,00	(3.648.249.712,00)	(56,05)
Hibah SAIIG	0,00	522.000.000,00	(522.000,00)	(100,00)
Jumlah	5.145.999.988,00	8.794.749.700,00	(3.127.271.712,00)	(126,49)

Program Hibah Air Minum diberikan kepada tujuh desa penerima yaitu:

- Peningkatan SPAM Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1101;
- Peningkatan SPAM Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1102;
- Peningkatan SPAM Desa Karangtanjung Kecamatan Alian sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1103;
- Peningkatan SPAM Desa Kalirancang Kecamatan Alian sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1104;
- Peningkatan SPAM Desa Geblug Kecamatan Buayan sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1105;
- Peningkatan SPAM Desa Kejawang Kecamatan Sruweng sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1106;
- Peningkatan SPAM Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso sesuai dengan BAST Nomor 011.4/1107.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Koordinasi *IPDMIP* terdiri dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi. Lokasi koordinasi *IPDMIP* mencakup sembilan Daerah Irigasi (DI) *Disbursement Link Indikator (DLI)* kewenangan Kabupaten dan 172 Daerah Irigasi Non *DLI* mencakup DI Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2015 di luar DI kesepakatan. Adapun dua DI kesepakatan mencakup DI Pringututul dan DI Jatinegara/Bendung Karet.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%	
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	128.590.218.035,00

Pada TA 2021 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terdiri dari pendapatan hibah dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan TA 2021 sebesar Rp128.590.218.035,00. Pada Penganggaran APBD Murni TA 2022 Pendapatan Dana BOS dianggarkan pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah Dana BOS, namun karena memperhatikan ketentuan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dimana menyatakan bahwa Dana BOS termasuk DAK Non Fisik maka pada APBD Perubahan Pendapatan Hibah Dana BOS dirubah ke rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik

5.1.2 Belanja

Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja	3.011.233.908.000,00	2.824.358.293.725,00	(186.875.614.275,00)	93,79	2.779.840.698.100,00

Belanja TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.011.233.908.000,00 dan terealisasi sebesar 93,79% atau sebesar Rp2.824.358.293.725,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp2.779.840.698.100,00 maka realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,60%. Realisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2022 dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 38. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Operasi	2.081.973.665.200,00	1.918.270.224.061,00	(163.703.441.139,00)	92,14	1.902.638.912.710,00
Belanja Modal	293.658.929.800,00	272.301.599.864,00	(21.357.329.936,00)	92,73	266.110.950.340,00
Belanja Tak Terduga	2.800.000.000,00	1.295.204.500,00	(1.504.795.500,00)	46,26	545.318.400,00
Belanja Transfer	632.801.313.000,00	632.491.265.300,00	(310.047.700,00)	99,95	610.545.516.650,00
Jumlah	3.011.233.908.000,00	2.824.358.293.725,00	(186.875.614.275,00)	93,79	2.779.840.698.100,00

Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi 67,92% kemudian Belanja transfer sebesar 22,39%, Belanja Modal 9,64% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,05%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.918.270.224.061,00 mencapai 92,14% dari anggaran sebesar Rp2.081.973.665.200,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp1.902.638.912.710,00 mengalami penurunan sebesar 0,82%. Adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Pegawai	1.263.249.947.500,00	1.142.207.137.167,00	(121.042.810.333,00)	90,42	1.141.295.419.703,00
Belanja Barang dan Jasa	743.846.603.700,00	704.907.763.493,00	(38.938.840.207,00)	94,77	666.965.891.277,00
Belanja Subsidi	500.000.000,00	313.864.348,00	(186.135.652,00)	62,77	484.527.400,00
Belanja Hibah	61.060.802.000,00	59.752.651.931,00	(1.308.150.069,00)	97,86	72.414.174.601,00
Belanja Bantuan Sosial	13.316.312.000,00	11.088.807.122,00	(2.227.504.878,00)	83,27	21.478.899.729,00
Jumlah	2.081.973.665.200,00	1.918.270.224.061,00	(163.703.441.139,00)	92,14	1.902.638.912.710,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan Belanja yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, belanja pegawai BOS dan belanja pegawai dana BLUD. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.142.207.137.167,00 atau 90,42% dari anggaran dan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp1.141.295.419.703,00 atau sebesar 0,08%. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 40. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	828.325.457.534,00	728.313.378.021,00	(100.012.079.513,00)	87,93	720.872.064.041,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	118.198.065.600,00	110.852.151.279,00	(7.345.914.321,00)	93,79	90.928.546.880,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	256.078.969.916,00	244.598.135.746,00	(11.480.834.170,00)	95,52	269.466.287.145,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.133.206.000,00	30.583.723.917,00	(1.549.482.083,00)	95,18	29.959.433.106,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	568.432.450,00	510.222.879,00	(58.209.571,00)	89,76	509.329.781,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	966.170.000,00	(26.950.000,00)	97,29	993.080.000,00
Belanja Pegawai BOS	26.096.000.000,00	25.914.114.000,00	(181.886.000,00)	99,30	28.196.816.750,00
Belanja Pegawai BLUD	856.696.000,00	469.241.325,00	(387.454.675,00)	54,77	369.862.000,00
Jumlah	1.263.249.947.500,00	1.142.207.137.167,00	(121.042.810.333,00)	90,42	1.141.295.419.703,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Barang dan Jasa	743.846.603.700,00	704.907.763.493,00	(38.938.840.207,00)	94,77	666.965.891.277,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp704.907.763.493,00 atau 94,77% dari anggaran, mengalami kenaikan dari TA 2021 sebesar Rp37.941.872.216 atau sebesar 5,69% dibandingkan realisasi TA 2021 yang senilai Rp666.965.891.277,00.

Belanja barang dan jasa selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 direalisasikan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersebar di masing masing SKPD. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 42. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	TA 2022			%	Realisasi TA 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		
1	Belanja Barang	116.381.537.499,00	112.353.281.445,00	(4.028.256.054,00)	96,54	102.608.418.254,00
2	Belanja Jasa	164.395.862.901,00	153.909.502.355,00	(10.486.360.546,00)	93,62	184.351.192.404,00
3	Belanja Pemeliharaan	40.105.380.000,00	38.518.790.266,00	(1.586.589.734,00)	96,04	31.852.958.221,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	51.787.004.300,00	47.731.989.155,00	(4.055.015.145,00)	92,17	36.181.261.230,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Phak Lain/Masyarakat	5.562.700.000,00	5.422.897.000,00	(139.803.000,00)	97,49	1.182.463.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.203.337.000,00	87.002.325.361,00	(4.201.011.639,00)	95,39	70.727.729.119,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	274.410.782.000,00	259.968.977.911,00	(14.441.804.089,00)	94,74	240.061.869.049,00
	Jumlah	743.846.603.700,00	704.907.763.493,00	(38.938.840.207,00)	94,77	666.965.891.277,00

1. Belanja Barang

Rekening Belanja Barang merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

Rincian Realisasi Belanja Barang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 43. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Barang Pakai Habis	116.017.833.499,00	111.997.378.803,00	(4.020.454.696,00)	96,53	101.684.234.820,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	363.704.000,00	355.902.642,00	(7.801.358,00)	97,86	924.183.434,00
Jumlah	116.381.537.499,00	112.353.281.445,00	(4.028.256.054,00)	96,54	102.608.418.254,00

Belanja Barang TA 2022 terealisasi sebesar Rp112.353.281.445,00 atau sebesar 96,54% dari target anggaran senilai Rp116.381.537.449,00. Apabila dibandingkan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp102.608.418.254,00, realisasi TA mengalami kenaikan sebesar Rp9.744.863.191,00 atau 9,50%.

Belanja Barang Pakai Habis antara lain berupa Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja Obat-obatan, Belanja Natura dan Pakan, Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Pakaian. Sedangkan Belanja Barang Tak Habis Pakai antara lain berupa Belanja Komponen Peralatan dan Belanja Pipa.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

2. Belanja Jasa

Rekening Belanja Jasa merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

Belanja Jasa TA 2022 terealisasi sebesar Rp153.909.502.355,00 atau 93,62% dari target anggaran sebesar Rp164.395.862.901,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang senilai Rp184.351.192.404,00 maka pada TA 2022 terdapat penurunan sebesar 16,51%. Penurunan terjadi salah satunya karena anggaran Belanja Jasa TA 2022 lebih kecil dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp205.599.454.000,00 dimana serapan Belanja Jasa pada TA 2021 hanya sebesar 89,67%. Rincian Realisasi Belanja Jasa dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 44. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022				Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
1	Belanja Jasa Kantor	114.466.375.501,00	106.085.833.958,00	(8.380.541.543,00)	92,68	123.213.540.362,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.787.510.000,00	27.067.805.083,00	(719.704.917,00)	97,41	39.651.686.377,00
3	Belanja Sewa Tanah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.753.175.400,00	3.496.673.742,00	(256.501.658,00)	93,17	1.657.081.285,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.776.781.000,00	1.460.564.782,00	(316.216.218,00)	82,20	1.486.232.942,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	247.700.000,00	247.364.000,00	(336.000,00)	99,86	66.617.000,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	4.719.828.000,00	4.558.492.500,00	(161.335.500,00)	96,58	5.328.209.600,00
9	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.882.951.000,00	3.680.475.290,00	(202.475.710,00)	94,79	4.461.246.461,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	360.000.000,00	356.591.600,00	(3.408.400,00)	99,05	434.361.400,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	12.000.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.718.912.000,00	4.273.321.400,00	(445.590.600,00)	90,56	5.682.766.286,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.666.730.000,00	2.666.480.000,00	(250.000,00)	99,99	2.357.408.691,00
	Jumlah	164.395.862.901,00	153.909.502.355,00	(10.486.360.546,00)	93,62	184.351.192.404,00

Dari tabel diatas dapat dilihat prosentase serapan terendah Belanja Jasa ada pada Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang hanya terserap 82,20% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp316.216.218,00. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

merupakan rekening belanja yang digunakan antara lain untuk sewa gedung kantor, sewa bangunan gudang, sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan sewa hotel.

Sedangkan apabila dilihat dari besaran nilai sisa anggaran yang tidak terserap, nilai sisa anggaran terbesar Belanja Jasa terdapat pada rekening Belanja Jasa Kantor dengan serapan 92,68% dengan nilai sisa anggaran sebesar Rp8.380.541.543,00. Belanja Jasa Kantor merupakan belanja yang digunakan untuk Belanja Honorarium, Belanja Jasa Tenaga, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Surat Kabar/Internet, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Pengolahan Air Limbah dan Belanja Lembur.

3. Belanja Pemeliharaan

Rekening Belanja Pemeliharaan merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.886.165.000,00	3.788.741.090,00	(97.423.910,00)	97,49	4.090.743.919,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.597.364.000,00	10.931.187.043,00	(666.176.957,00)	94,26	9.417.350.479,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.620.559.000,00	23.797.572.633,00	(822.986.367,00)	96,66	18.330.841.823,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.292.000,00	1.289.500,00	(2.500,00)	99,81	0,00
Jumlah	40.105.380.000,00	38.518.790.266,00	(1.586.589.734,00)	96,04	31.852.958.221,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp38.518.790.266,00 atau 96,04%. Apabila realisasi TA 2022 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yang sebesar Rp31.852.958.221,00 maka pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,93% atau Rp6.665.832.045,00.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas pindah tugas, dan belanja pemulangan pegawai. Rincian Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 46. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.707.004.300,00	47.669.295.768,00	(4.037.708.532,00)	92,19	36.167.630.230,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	80.000.000,00	62.693.387,00	(17.306.613,00)	78,37	13.631.000,00
Jumlah	51.787.004.300,00	47.731.989.155,00	(4.055.015.145,00)	92,17	36.181.261.230,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 tercapai 92,17% atau sebesar Rp47.731.989.155,00. Jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp36.181.261.230,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.550.727.925,00 atau 31,92%.

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak Lain/Masyarakat merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Tabel 47. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.552.700.000,00	5.422.897.000,00	(129.803.000,00)	97,66	1.127.513.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	54.950.000,00
Jumlah	5.562.700.000,00	5.422.897.000,00	(139.803.000,00)	97,49	1.182.463.000,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebesar Rp5.422.897.000,00 atau 97,49% mengalami kenaikan dari TA 2021 sebesar 358,61% dari realisasi belanja TA 2021 yang sebesar Rp1.182.463.000,00.

a. Alokasi anggaran Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 terdiri dari:

1) Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan

Alokasi anggaran Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan TA 2022 sebesar Rp1.625.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.582.165.000,00

2) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)

Pada TA 2022 Realisasi Belanja TKDD sebesar Rp3.840.732.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.927.450.000,00 atau terserap 97,79%. Sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

pada TA 2021 dari pagu anggaran sebesar Rp422.600.000,00 dan terealisasi 100%.

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Belanja TKDD merupakan belanja atas DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dasar pelaksanaan kegiatan TKDD mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pagu anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 sebesar Rp10.000.000,00 merupakan belanja yang akan digunakan untuk membayar notaris, namun tidak terealisasi. Kegiatan tersebut berada di dinas Pertanian dan Pangan, Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2022 sebesar Rp87.002.325.361,00 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp91.203.337.000,00, hal ini dikarenakan belanja menyesuaikan dengan jumlah siswa dan pemakaian sisa tahun sebelumnya.

Belanja tersebut pengelolaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, dana BOS ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan digunakan langsung untuk operasional sekolah.

Realisasi belanja barang dan jasa dana BOS TA 2022 sebesar Rp87.002.325.361,00 dan TA 2021 sebesar Rp70.727.729.119,00 atau mengalami kenaikan sebesar 23,01%. Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOS per satuan pendidikan negeri dan swasta dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa ini dialokasikan untuk belanja operasional Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Soedirman, RSUD Prembun dan Puskesmas.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD TA 2022 sebesar Rp259.968.977.911,00 atau 94,74% dari anggaran sebesar Rp274.410.782.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,69% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp240.061.869.049,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Subsidi kepada BUMD	500.000.000,00	313.864.348,00	(186.135.652,00)	62,77	484.527.400,00

Pada TA 2022 pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan dana untuk program subsidi kepada BUMD sebesar Rp500.000.000,00. Program subsidi kepada BUMD dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan. Pedoman pelaksanaan Belanja Subsidi bunga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Program subsidi bunga tersebut disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 49. Alokasi Subsidi Bunga TA 2022

No	Lembaga Keuangan Penyalur	Alokasi APBD 2022 (Rp)
1	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	200.000.000,00
2	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	225.000.000,00
3	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	75.000.000,00
	Jumlah	500.000.000,00

Belanja Subsidi direalisasikan pada tanggal 1 September 2022 dengan Nomor SP2D 00916/LS-BUNGA/DAU/2022 sebesar Rp225.000.000,00 dan 00917/LS-BUNGA/DAU/2022 sebesar Rp200.000.000,00 serta tanggal 2 September 2022 dengan Nomor SP2D 00929/LS-BUNGA/DAU/2022 sebesar Rp75.000.000,00. Namun pada tanggal 23 Desember 2022 terdapat pengembalian sisa anggaran subsidi bunga dari PT BKK Jateng sebesar Rp37.492.709,00 dan dari PT BPR Bank Kebumen sebesar Rp148.642.943,00. Hal tersebut dikarenakan adanya persyaratan yang tidak dicukupi oleh debitur, dan tersendatnya kredit.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Hibah	61.060.802.000,00	59.752.651.931,00	(1.308.150.069,00)	97,86	72.414.174.601,00

Rekening Belanja Hibah digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp59.752.651.931,00 atau 97,86% dari anggaran sebesar Rp61.060.802.000,00. Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.698.459.136,00 atau 10,72%. Realisasi Belanja Hibah per SKPD TA 2022 disajikan pada **Lampiran 17**. Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46.929.038.000,00	45.756.070.471,00	(1.172.967.529,00)	97,50	59.160.044.814,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.100.929.000,00	2.092.426.860,00	(8.502.140,00)	99,60	5.939.420.787,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.753.600.000,00	9.637.414.000,00	(116.186.000,00)	98,81	5.048.283.000,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	212.359.000,00	201.864.600,00	(10.494.400,00)	95,06	201.550.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	0,00	100,00	2.064.876.000,00
Jumlah	61.060.802.000,00	59.752.651.931,00	(1.308.150.069,00)	97,86	72.414.174.601,00

- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp45.756.070.471,00 atau 97,50% jika dibandingkan dengan realisasi 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.403.947.343,00.

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp2.092.426.660,00 atau sebesar 99,60%.

- c. Belanja Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2022 sebesar Rp9.637.414.000,00 atau 98,81%, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.589.131.000,00 atau 90,90% dari realisasi TA 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

d. Belanja Hibah kepada Koperasi

Belanja Hibah kepada Koperasi TA 2022 terealisasi sebesar Rp201.864.600,00 atau 95,06% dari pagu sebesar Rp212.359.000,00. Belanja Hibah kepada Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berupa belanja hibah barang. Hibah diberikan kepada Koperasi LEPP-M3 Mina Tri Utama dalam bentuk barang.

e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pada tahun 2020 bantuan keuangan kepada partai politik direalisasikan melalui rekening Transfer Bantuan Keuangan Lainnya di anggarakan di BPKAD selaku PPKD, namun pada tahun 2021 mengalami perubahan rekening belanja mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga pada tahun 2021 bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan di SKPD terkait pada rekening Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.064.876.000,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp2.064.876.000,00 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada sembilan Partai Politik berupa hibah uang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022

SKPD	Uraian Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Partai Nasional Demokrat	162.873.000,00	162.873.000,00
	Partai Kebangkitan Bangsa	356.487.000,00	356.487.000,00
	Partai Keadilan Sejahtera	126.141.000,00	126.141.000,00
	PDI Perjuangan	464.832.000,00	464.832.000,00
	Partai Golongan Karya	228.741.000,00	228.741.000,00
	Partai Gerakan Indonesia Raya	281.346.000,00	281.346.000,00
	Partai Demokrat	133.671.000,00	133.671.000,00
	Partai Amanat Nasional	146.091.000,00	146.091.000,00
	Partai Persatuan Pembangunan	164.694.000,00	164.694.000,00
Jumlah		2.064.876.000,00	2.064.876.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Tabel 53. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial	13.316.312.000,00	11.088.807.122,00	(2.227.504.878,00)	83,27	21.478.899.729,00

Rekening Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pada tahun 2022 penganggaran dan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial berada di masing-masing SKPD, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Penganggaran belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.329.637.000,00	8.631.337.772,00	(698.299.228,00)	92,52	17.005.641.729,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.656.754.000,00	2.127.879.350,00	(1.528.874.650,00)	58,19	3.273.258.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	329.921.000,00	329.590.000,00	(331.000,00)	99,90	1.200.000.000,00
Jumlah	13.316.312.000,00	11.088.807.122,00	(2.227.504.878,00)	83,27	21.478.899.729,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.390.092.607,00 atau 48,37%. Rincian Belanja Bantuan Sosial per SKPD disajikan pada **Lampiran 18**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Modal	293.658.929.800,00	272.301.599.864,00	(21.357.329.936,00)	92,73	266.110.950.340,00

Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp272.301.599.864,00 atau tercapai 92,73% dari anggaran sebesar Rp293.658.929.800,00. Realisasi Belanja Modal TA 2022 naik sebesar Rp6.190.649.524,00 atau 2,33% dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp266.110.950.340,00. Realisasi tersebut termasuk realisasi Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal BOS. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 56. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Tanah	2.823.562.000,00	1.387.839.580,00	(1.435.722.420,00)	49,15	4.062.715.011,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.595.993.800,00	102.152.506.285,00	(5.443.487.515,00)	94,94	112.083.903.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.830.252.000,00	34.758.067.305,00	(7.072.184.695,00)	83,09	44.827.545.305,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.634.445.000,00	126.620.498.535,00	(7.013.946.465,00)	94,75	97.454.097.763,00
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	7.774.677.000,00	7.382.688.159,00	(391.988.841,00)	94,96	7.682.688.761,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	293.658.929.800,00	272.301.599.864,00	(21.357.329.936,00)	92,73	266.110.950.340,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Belanja Modal yang penyerapannya tertinggi adalah Belanja Modal Aset Tetap lainnya dengan presentase sebesar 94,96% dari anggaran. Sedangkan realisasi terendah adalah Belanja Modal Tanah sebesar 49,15% dari anggaran. Namun jika melihat dari besaran nilai sisa anggaran yang tidak terserap maka Belanja Modal Gedung dan Bangunan memiliki nilai sisa anggaran terbesar yaitu sebesar Rp7.072.184.695,00.

Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang himencapai 46,50% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,51%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12,76%, Belanja Modal Aset tetap lainnya 2,71% dan Belanja Modal Tanah 0,51%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Tanah	2.823.562.000,00	1.387.839.580,00	(1.435.722.420,00)	49,15	4.062.715.011,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.387.839.580,00 atau 49,15% dari anggaran sebesar Rp2.823.562.000,00. Jika dibandingkan tahun 2021, realisasi belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 65,84%. Belanja Modal Tanah tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal Tanah BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dan Keluarga Berencana. Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD TA 2022 dan TA 2021

SKPD	TA 2022			%	Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
Dinkes PPKB	157.710.000,00	32.747.550,00	(124.962.450,00)	20,76	628.973.110,00
DPUPR	2.665.852.000,00	1.355.092.030,00	(1.310.759.970,00)	50,83	3.292.941.901,00
Disperkim LH	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800.000,00
Jumlah	2.823.562.000,00	1.387.839.580,00	(1.435.722.420,00)	49,15	4.062.715.011,00

1. Belanja Modal Tanah Dinkes PPKB TA 2022 merupakan Belanja Modal Tanah Kampung yang terealisasi sebesar Rp32.747.550,00 atau 20,76% dari Pagu Anggaran sebesar Rp157.710.000,00. Belanja tersebut terdiri dari:
 - a. Belanja Modal BLUD Puskesmas Kuwarasan dengan realisasi sebesar Rp22.427.550,00 dari pagu anggaran sebesar Rp147.390.000,00.
 - b. Belanja Modal pada Dinas PPKB berupa pembayaran appraisal untuk pengadaan tanah Puskesmas Bonorowo dengan realisasi Rp10.320.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp10.320.000,00.
2. Belanja Modal Tanah DPUPR merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan dengan realisasi sebesar Rp1.355.092.030,00 atau 50,83% dari anggaran sebesar Rp2.665.852.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 59. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.595.993.800,00	102.152.506.285,00	(5.443.487.515,00)	94,94	112.083.903.500,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp102.152.506.285,00 atau 94,94% dari pagu anggaran sebesar Rp107.595.993.800,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 mengalami penurunan sebesar 8,86% dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp112.083.903.500,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 60. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022			%	Realisasi TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	762.010.000,00	753.807.100,00	(8.202.900,00)	98,92	860.807.800,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.185.084.500,00	7.522.166.000,00	(662.918.500,00)	91,90	23.884.933.455,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	425.222.000,00	403.917.363,00	(21.304.637,00)	94,99	269.071.718,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	161.455.000,00	77.152.950,00	(84.302.050,00)	47,79	252.179.300,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.508.874.750,00	6.722.315.446,00	(786.559.304,00)	89,52	12.898.238.224,00
6	Belanja Modal Komputer	31.971.767.000,00	30.479.173.579,00	(1.492.593.421,00)	95,33	33.707.878.237,00
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.240.575.500,00	2.105.259.355,00	(135.316.145,00)	93,96	1.246.807.500,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	54.217.596.050,00	52.045.220.484,00	(2.172.375.566,00)	95,99	34.864.085.166,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	650.532.000,00	599.925.008,00	(50.606.992,00)	92,22	1.042.909.150,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	283.060.450,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	227.990.000,00	227.066.000,00	(924.000,00)	99,59	134.885.200,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	61.585.500,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.234.227.000,00	1.206.019.000,00	(28.208.000,00)	97,71	2.575.861.800,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.660.000,00	10.484.000,00	(176.000,00)	98,35	1.600.000,00
	Jumlah	107.595.993.800,00	102.152.506.285,00	(5.443.487.515,00)	94,94	112.083.903.500,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut termasuk Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD yang terdapat pada Dinkes PPKB dan Belanja Modal Peralatan Mesin BOS pada Disdikpora dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Peralatan Mesin BLUD TA 2022 sebesar Rp49.662.806.698,00 yang terdiri dari realisasi RSUD dr. Soedirman sebesar Rp38.263.262.721,00, RSUD Prembun sebesar Rp8.806.414.768,00 dan puskesmas sebesar Rp2.593.129.209,00.
2. Realisasi Peralatan Mesin BOS TA 2022 sebesar Rp21.372.682.269,00 yang terdiri dari realisasi SMP Negeri sebesar Rp6.235.008.749,00 dan SD Negeri sebesar Rp15.137.673.520,00.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 61. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.830.252.000,00	34.758.067.305,00	(7.072.184.695,00)	83,09	44.827.545.305,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp34.758.067.305,00 atau 83,09% dari nilai anggaran Rp41.830.252.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 22,46% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp44.827.545.305,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 62. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022			%	Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)		(Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.796.132.000,00	34.725.108.305,00	(7.071.023.695,00)	83,08	44.695.487.755,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	34.120.000,00	32.959.000,00	(1.161.000,00)	96,60	132.057.550,00
Jumlah	41.830.252.000,00	34.758.067.305,00	(7.072.184.695,00)	83,09	44.827.545.305,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2022

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Disdikpora	17.942.897.000,00	15.307.852.681,00	(2.635.044.319,00)	85,31
2	Dinkes PPKB	11.425.843.000,00	9.808.494.384,00	(1.617.348.616,00)	85,84
3	DLHKP	3.969.500.000,00	2.956.004.840,00	(1.013.495.160,00)	74,47
4	Sekretariat DPRD	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90
5	BKPSDM	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00
6	Disparbud	5.030.133.000,00	4.832.910.000,00	(197.223.000,00)	96,08
7	Dinas Pertanian dan Pangan	2.607.379.000,00	1.009.784.450,00	(1.597.594.550,00)	38,73
8	Disperindag	484.500.000,00	476.130.950,00	(8.369.050,00)	98,27
9	Kecamatan Kebumen	350.000.000,00	347.000.000,00	(3.000.000,00)	99,14
	Jumlah	41.830.252.000,00	34.758.067.305,00	(7.072.184.695,00)	83,09

Dari rincian tersebut terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada Dikes PPKB dengan realisasi sebesar Rp8.549.381.811,00 yang terdiri dari :

1. RSUD dr. Soedirman dengan realisasi Rp2.205.156.311,00.
2. RSUD Prembun dengan realisasi Rp5.809.294.500,00.
3. Puskesmas Buayan dengan realisasi Rp8.208.000,00.
4. Puskesmas Buluspesantren II dengan realisasi Rp15.300.000,00.
5. Puskesmas Karanggayam I dengan realisasi Rp69.830.000,00.
6. Puskesmas Karanggayam II dengan realisasi Rp26.000.000,00.
7. Puskesmas Klirong I dengan realisasi Rp49.100.000,00.
8. Puskesmas Puring dengan realisasi Rp74.338.000,00.
9. Puskesmas Sempor I dengan realisasi Rp196.381.000,00.
10. Puskesmas Sruweng dengan realisasi Rp95.774.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 64. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.634.445.000,00	126.620.498.535,00	(7.013.946.465,00)	94,75	97.454.097.763,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp126.620.498.535,00 atau sebesar 94,75% dari nilai anggaran sebesar Rp133.634.445.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp97.454.097.763,00 realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 29,93%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	102.879.594.000,00	100.203.245.300,00	(2.676.348.700,00)	97,40	60.859.274.395,00
Belanja Modal Bangunan Air	17.590.574.000,00	13.710.611.378,00	(3.879.962.622,00)	77,94	26.811.838.052,00
Belanja Modal Instalasi	938.296.000,00	786.235.297,00	(152.060.703,00)	83,79	6.783.198.405,00
Belanja Modal Jaringan	12.225.981.000,00	11.920.406.560,00	(305.574.440,00)	97,50	2.999.786.911,00
Jumlah	133.634.445.000,00	126.620.498.535,00	(7.013.946.465,00)	94,75	97.454.097.763,00

Sedangkan rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD TA 2022

No	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Dinkes PPKB	230.192.000,00	221.692.260,00	(8.499.740,00)	96,31
2	DPUPR	119.450.894.000,00	112.905.067.678,00	(6.545.826.322,00)	94,52
3	Disperkimhub	12.127.324.000,00	11.906.433.300,00	(220.890.700,00)	98,18
4	DLHKP	685.761.000,00	533.700.297,00	(152.060.703,00)	77,83
5	Dinas Pertanian dan Pangan	100.000.000,00	24.809.000,00	(75.191.000,00)	24,81
6	Kecamatan Karanganyar	1.040.274.000,00	1.028.796.000,00	(11.478.000,00)	98,90
	Jumlah	133.634.445.000,00	126.620.498.535,00	(7.013.946.465,00)	94,75

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinkes PPKB sejumlah Rp221.692.260,00 merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1. Puskesmas Ambal I dengan realisasi Rp9.392.260,00.
2. Puskesmas Karangsambung dengan realisasi Rp40.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

3. Puskesmas Prembun dengan realisasi Rp2.300.000,00.
4. Puskesmas Sadang dengan realisasi Rp170.000.000,00.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 67. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	7.115.237.000,00	6.894.828.159,00	(220.408.841,00)	96,90	6.767.087.261,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp7.382.688.159,00 atau 96,90% dari nilai anggaran Rp7.115.237.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,89% dari realisasi TA 2021 yang sebesar Rp6.767.087.261,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 68. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.112.937.000,00	6.892.528.159,00	(220.408.841,00)	96,90	6.675.917.261,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	90.570.000,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Jumlah	7.115.237.000,00	6.894.828.159,00	(220.408.841,00)	96,90	6.767.087.261,00

Pada Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan termasuk didalamnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD pada Dinkes PPKB sebesar Rp5.400.000,00 yang merupakan belanja RSUD Prembun. Selain itu termasuk juga realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Disdikpora dengan nilai sebesar Rp6.796.646.659,00.

Sedangkan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga adalah Belanja Modal Alat Musik pada Disdikpora.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Tabel 69. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Modal Aset Lainnya	659.440.000,00	487.860.000,00	(171.580.000,00)	73,98	915.601.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp487.860.000,00 atau 73,98% dari nilai anggaran Rp659.440.000,00. Jika dibandingkan tahun 2021 realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 46,71%.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Belanja Aset Lainnya masuk dalam kategori Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sehingga dapat dijelaskan belanja modal aset lainnya terdiri dari Belanja Modal Software dengan realisasi Rp313.862.000,00 dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya dengan realisasi Rp173.998.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 70. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Per SKPD TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Dinkes PPKB	480.940.000,00	311.987.000,00	(168.953.000,00)	64,87	724.272.000,00
DPUPR	3.500.000,00	1.875.000,00	(1.625.000,00)	53,57	0,00
BPBD	175.000.000,00	173.998.000,00	(1.002.000,00)	99,43	0,00
Disnaker KUKM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.500,00
Diskominfo	0,00	0,00	0,00	0,00	39.160.000,00
Disperindag	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652.000,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00
Jumlah	659.440.000,00	487.860.000,00	(171.580.000,00)	73,98	915.601.500,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tabel 71. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Tak Terduga	2.800.000.000,00	1.295.204.500,00	(1.504.795.500,00)	46,26	545.318.400,00

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Tak Terduga TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.295.204.500,00 atau 46,26% dari nilai anggaran Rp2.800.000.000,00.

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp1.295.204.500,00 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 72. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2022
1	Penanganan darurat bencana dampak banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kab. Kebumen Tahun 2022	932.304.500,00
2	Pemb. Belanja Tidak Terduga Bantuan Untuk Korban Bencana Alam	167.500.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan Migran Korban Tindak kekerasan	6.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan orang kehabisan bekal/PMKS	36.900.000,00
5	Pemb. Belanja Tidak Terduga Bantuan kepada Korban Kebakaran	152.500.000,00
	Jumlah	1.295.204.500,00

5.1.2.4 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

Tabel 73. Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Transfer	632.801.313.000,00	632.491.265.300,00	(310.047.700,00)	99,95	610.545.516.650,00

Rincian realisasi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa TA 2022 sebesar Rp632.491.265.300,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bagi Hasil Retribusi, Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya yang terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak	10.087.758.000,00	10.087.758.000,00	0,00	100,00	11.148.216.650,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi	2.332.360.000,00	2.314.857.800,00	(17.502.200,00)	99,25	2.714.713.000,00
Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	620.381.195.000,00	620.088.649.500,00	(292.545.500,00)	99,95	596.682.587.000,00
Jumlah	632.801.313.000,00	632.491.265.300,00	(310.047.700,00)	99,95	610.545.516.650,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa adalah sebesar Rp632.491.265.300,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp632.801.313.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Transfer tahun 2021 naik sebesar 3,59%.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Pajak TA 2022 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 75. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Pajak TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.087.758.000,00	10.087.758.000,00	0,00	100,00	11.148.216.650,00
Jumlah	10.087.758.000,00	10.087.758.000,00	0,00	100,00	11.148.216.650,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp10.087.758.000,00 merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022.

5.1.2.4.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Tabel 76. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.332.360.000,00	2.314.857.800,00	(17.502.200,00)	99,25	2.714.713.000,00
Jumlah	2.332.360.000,00	2.314.857.800,00	(17.502.200,00)	99,25	2.714.713.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.314.857.800,00 yang merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil retribusi daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Alokasi Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022.

5.1.2.4.3 Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Tabel 77. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	620.381.195.000,00	620.088.649.500,00	(292.545.500,00)	99,95	596.682.587.000,00

Realisasi Transfer Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 78 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya TA 2022 dan 2021**

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	620.181.195.000,00	619.888.649.500,00	(292.545.500,00)	99,95	596.682.587.000,00
Jumlah	620.381.195.000,00	620.088.649.500,00	(292.545.500,00)	99,95	596.682.587.000,00

Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota ini didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 988/405 tahun 2022 tanggal 29 November 2022 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam. Rincian realisasi transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Transfer Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp619.888.649.500,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp620.181.195.000,00. Rincian Realisasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 79. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Infrastruktur	31.230.910.000,00	30.945.910.000,00	(285.000.000,00)	99,09
Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Operasional TPQ	2.245.000.000,00	2.240.000.000,00	(5.000.000,00)	99,78
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	169.948.912.000,00	169.946.366.500,00	(2.545.500,00)	99,999
Dana Desa	416.756.373.000,00	416.756.373.000,00	0,00	100,00
Jumlah	620.181.195.000,00	619.888.649.500,00	(292.545.500,00)	99,95

- a Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Infrastruktur

Pada tahun 2022 terealisasi Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Infrastruktur sebanyak 234 kegiatan, dengan total penerima 163 desa. Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kebumen TA 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 460/371 tanggal 17 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2022.

- b Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Operasional Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen, Bantuan Keuangan Khusus Operasional TPQ diberikan kepada pemerintah desa untuk operasional TPQ dengan kriteria TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2022, realisasi penerima TPQ sebesar Rp2.240.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp2.245.000.000 sebanyak 448 desa penerima. Satu desa yang tidak menerima Bantuan Operasional TPQ adalah desa Karangglonggong Kecamatan Klirong karena belum memiliki TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama. Bantuan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen TA 2022.

- c Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022. Anggaran ADD TA 2022 sebesar Rp169.948.912.000,00 terealisasi sebesar Rp169.946.366.500,00 atau 99,99%.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ADD termasuk Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa senilai Rp1.282.330.500,00. Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS merupakan pemotongan iuran BPJS Perangkat Desa melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD. Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Berkaitan dengan hal tersebut PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah sebelum ADD ditransfer ke rekening Kas Desa untuk kemudian dibayarkan kepada BPJS. Rincian Bantuan Keuangan ADD per desa tercantum pada **Lampiran 19**.

- d Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen TA 2022 adalah sebesar Rp405.260.453.000,00 yang disalurkan kepada 449 desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Rincian Dana Desa (DD) per desa tercantum pada **Lampiran 14**.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan berdasar Surat Edaran Nomor 412.2/220 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Kebumen TA 2022 yang dibuat Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penggunaan Dana Desa ditentukan untuk:

- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
- c. dukungan pendanaan penanganan *Covid-19* paling sedikit 8%;
- d. program sektor prioritas lainnya.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
2. Penyaluran Dana Desa diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan, dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan:
 - a) Tahap I sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b) Tahap II sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus;
 - c) Tahap III sebesar 20% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Juni.
3. Penyaluran Dana Desa diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan, untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap dengan ketentuan:
 - a) Tahap I sebesar 60% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b) Tahap II sebesar 40% dari 60% pagu Dana Desa setiap Desa, paling cepat bulan Maret.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

4. Penyaluran Dana Desa Tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 bulan sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penandanaan pandemi *Covid-19*.
5. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
6. Penyaluran Dana Desa bagi Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
7. Desa yang melaksanakan BLT Desa TA 2021, telah dilaksanakan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas TA 2021.
8. Desa di 35 kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa untuk tiga bulan TA 2021, telah dilaksanakan perekaman realisasi pembayaran kepada KPM tambahan BLT Desa.

5.1.3 Pembiayaan

Tabel 80. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Pembiayaan Neto	235.979.625.000,00	235.979.627.198,98	2.198,98	100,00	216.985.309.565,98

Rekening Pembiayaan Daerah digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan	271.279.625.000,00	271.279.627.198,98	2.198,98	100,00	222.085.309.565,98
Pengeluaran Pembiayaan	35.300.000.000,00	35.300.000.000,00	0,00	100,00	5.100.000.000,00
Pembiayaan Neto	235.979.625.000,00	235.979.627.198,98	2.198,98	100,00	216.985.309.565,98

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2022 sebesar Rp271.279.627.198,98 terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 82. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
SILPA tahun sebelumnya	269.179.625.000,00	269.179.627.198,98	2.198,98	100,00	219.950.309.565,98
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	2.135.000.000,00
Jumlah	271.279.625.000,00	271.279.627.198,98	2.198,98	100,00	222.085.309.565,98

5.1.3.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya

Tabel 83. Rincian Anggaran dan Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
1	Pelampauan Penerimaan PAD	10.923.354.000,00	10.923.354.000,00	-	100,00	59.662.122.229,00
2	Penghematan Belanja	161.879.797.000,00	161.879.799.198,98	2.198,98	100,00	160.288.187.336,98
3	Sisa Belanja Lainnya	96.376.474.000,00	96.376.474.000,00	-	100,00	0,00
	Jumlah	269.179.625.000,00	269.179.627.198,98	2.198,98	100,00	219.950.309.565,98

Pada TA 2022 seluruh SILPA TA 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98 direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan.

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah yang diberikan berbentuk dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan kelompok tani/kelompok tani untuk modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau dari petani dan harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen.

Penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan penerimaan kembali pengembalian pemberian pinjaman dari 30 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360.2 /56 tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022.

Pinjaman daerah yang diberikan kepada Rukun Nelayan diberikan untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan pada saat musim ikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen dengan penerima sebanyak empat Rukun Nelayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 523/188 tahun 2022 tanggal 6 April 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rincian atas penerimaan kembali pinjaman daerah dari 30 Gapoktan dan empat Rukun Nelayan dijelaskan pada **Lampiran 20**.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp35.300.000.000,00 terdiri Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 84. Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	18.200.000.000,00	18.200.000.000,00	0,00	100,00	3.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00	2.100.000.000,00
Jumlah	35.300.000.000,00	35.300.000.000,00	0,00	100,00	5.100.000.000,00

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pada TA 2022 mulai dianggarkan Pembentukan Dana Cadangan yang bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 13 Oktober 2021.

Realisasi Dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Rekening Dana Cadangan berada di yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1.008.01018.4.

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal sebesar Rp18.200.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang teralokasi untuk BUMD berikut:

Tabel 85. Rincian Pemberian Penyertaan Modal Daerah TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
PT Bank BPD Jateng	9.700.000.000,00	9.700.000.000,00
PT Bank BPR BANK KEBUMEN (Perseroda)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PT Bank BPR BKK Kebumen	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	500.000.000,00	500.000.000,00
Total	18.200.000.000,00	18.200.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.3.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 terdiri dari pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat berupa dana talangan pangan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan berupa dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp600.000.000,00. Pemberian pinjaman daerah direalisasikan untuk pinjaman daerah kepada masyarakat berupa dana talangan pangan kepada 30 Gapoktan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360.2 /56 tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen TA 2022. Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut direalisasikan kepada 30 Gapoktan dengan rincian pada **Lampiran 20**.

Sedangkan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat direalisasikan berupa dana bergulir kepada 4 rukun nelayan sebesar Rp600.000.000,00, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 523/188 tahun 2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen TA 2022, dengan rincian penerima dijelaskan pada **Lampiran 20**.

Pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat berupa dana bergulir kepada empat rukun nelayan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Nomor SP2D 00580/LS-PEMBY/DAU/2022.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tabel 86. Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	TA 2022				Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	258.817.350.877,98	258.817.350.877,98	0,00	269.179.627.198,98

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98, jika dibandingkan TA 2021 SiLPA TA 2022 mengalami penurunan sebesar 3,85%. Adapun perincian SiLPA adalah sebagai berikut :

Tabel 87. Rincian SiLPA TA 2022

No	Rincian SiLPA	Kas (Rp)	Utang PFK (Rp)	SiLPA (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	170.249.980.751,00	0,00	170.249.980.751,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	41.794.313,00	0,00	41.794.313,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.429.217,00	0,00	1.429.217,00
4	Kas d BLUD RSUD dr Soedirman	52.325.530.201,00	0,00	52.325.530.201,00
5	Kas di BLUD RSUD Prembun	30.578.253.474,00	0,00	30.578.253.474,00
6	Kas BLUD Puskesmas	4.592.561.339,98	0,00	4.592.561.339,98
7	Kas Dana BOS	1.037.127.884,00	9.326.302,00	1.027.801.582,00
	Jumlah	258.826.677.179,98	9.326.302,00	258.817.350.877,98

Rincian SiLPA TA 2022 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sejumlah Rp170.249.980.751,00 dijelaskan di **Lampiran 21**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp269.179.627.198,98.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp269.179.627.198,98.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp258.817.350.877,98 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp 22.837.723.679,00
- Pembiayaan Netto	<u>Rp 235.979.627.198,98</u>
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 258.817.350.877,98

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 artinya tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98. Adapun perincian SiLPA TA 2022 terdiri dari:

Tabel 88. Rincian SILPA Tahun Anggaran 2022

No	Rincian SILPA	Kas (Rp)	Utang Pfk (Rp)	SILPA (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	170.249.980.751,00	0,00	170.249.980.751,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	41.794.313,00	0,00	41.794.313,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.429.217,00	0,00	1.429.217,00
4	Kas d BLUD RSUD dr Soedirman	52.325.530.201,00	0,00	52.325.530.201,00
5	Kas di BLUD RSUD Prembun	30.578.253.474,00	0,00	30.578.253.474,00
6	Kas BLUD Puskesmas	4.592.561.339,98	0,00	4.592.561.339,98
7	Kas Dana BOS	1.037.127.884,00	9.326.302,00	1.027.801.582,00
	Jumlah	258.826.677.179,98	9.326.302,00	258.817.350.877,98

Silpa yang berada di Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp170.249.980.751,00 dirinci pada **Lampiran 21**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp4.628.824.366.868,65	Rp4.678.346.895.120,94

Saldo Aset terdiri dari berikut ini.

Tabel 89. Rincian Aset TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Aset Lancar	345.177.363.520,74	413.565.396.043,89	(68.388.032.523,15)	(16,54)
Investasi Jangka Panjang	168.191.138.468,15	156.628.976.512,61	11.562.161.955,54	7,38
Aset Tetap	3.959.242.372.635,76	3.985.548.772.976,26	(26.306.400.340,50)	(0,66)
Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	100,00
Aset Lainnya	141.213.492.244,00	122.603.749.588,18	18.609.742.655,82	15,18
Jumlah	4.628.824.366.868,65	4.678.346.895.120,94	(49.522.528.252,29)	(1,06)

Saldo Aset TA 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp49.522.528.252,29 atau 1,06% antara lain disebabkan oleh:

- Penghapusan Piutang Daerah
- Penghapusan Barang Milik Daerah

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp345.177.363.520,74	Rp413.565.396.043,89

Saldo Aset Lancar terdiri dari berikut ini.

Tabel 90. Rincian Aset Lancar TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	170.249.980.751,00	167.807.726.233,00	2.442.254.518,00	1,46
Kas di Bendahara Penerimaan	41.794.313,00	0,00	41.794.313,00	100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.429.217,00	400.000,00	1.029.217,00	257,30
Kas di BLUD	87.496.345.014,98	96.376.474.671,98	(8.880.129.657,00)	(9,21)
Kas Dana BOS	1.037.127.884,00	4.995.026.294,00	(3.957.898.410,00)	100,00
Piutang Pajak Daerah	7.980.512.527,00	7.474.389.558,00	506.122.969,00	6,77
Piutang Retribusi Daerah	4.079.655.400,00	3.453.384.530,00	626.270.870,00	18,13
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.390.647.936,94	91.899.678.013,00	(71.509.030.076,06)	(77,81)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.437.968.245,00	4.770.941.665,00	(1.332.973.420,00)	(27,94)
Penyisihan Piutang	(9.170.645.322,50)	(10.027.551.584,00)	856.906.261,50	(8,55)
Beban Dibayar Dimuka	63.096.715,00	71.466.181,86	(8.369.466,86)	(11,71)
Persediaan	59.569.450.839,32	46.743.460.481,05	12.825.990.358,27	27,44
Jumlah	345.177.363.520,74	413.565.396.043,89	(68.388.032.523,15)	(16,54)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp170.249.980.751,00	Rp167.807.726.233,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 merupakan saldo Kas Daerah pada rekening bank dalam bentuk giro dan deposito dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91. Rincian Kas di Kas Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Rekening Giro	170.249.980.751,00	167.807.726.233,00	2.442.254.518,00	1,46
Rekening Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	170.249.980.751,00	167.807.726.233,00	2.442.254.518,00	1,46

Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp170.249.980.751,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9. Nomor rekening tersebut merupakan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen TA 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/4 Tahun 2022 tentang Penunjukkan PT Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Sedangkan Kas di Kas Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 bahwa Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Selain Kas di Kas Daerah terdapat saldo Kas di Dana Cadangan per 31 Desember 2022 senilai Rp15.000.000.000,00 yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01018-4. Dana Cadangan tersebut akan digunakan untuk pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024. Sedangkan pembukaan rekening Dana Cadangan mendasari Surat nomor 900/1929.2 tanggal 28 November 2022 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Dana Cadangan.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp41.794.313,00	Rp00,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 senilai Rp41.794.313,00 terdiri atas:

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp41.380.000,00, merupakan keterlambatan setor ke Kas Daerah atas pendapatan Retribusi TA 2022, yang baru disetorkan pada bulan Januari 2023.
2. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp41.313,00, merupakan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Nilai tersebut terdapat pada rekening penampungan PBB-P2 di rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-00361-7 dengan nama



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

rekening REKG PEN PBB P-2 KAB KEBUMEN, yang akan disetorkan ke Kas Daerah di TA 2023. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel 92. Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022

Uraian	Jumlah (Rp)	Penyetoran (Rp)	
		2 Januari 2023	4 Januari 2023
Setoran atas Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Disparbud)	11.514.000,00	5.388.000,00	6.126.000,00
Setoran atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Disparbud)	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00
Setoran atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Disparbud)	27.815.000,00	27.815.000,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (BPKPD)	414.313,00	0,00	0,00
Jumlah	41.794.313,00	35.254.000,00	6.126.000,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2022

Rp1.429.217,00

31 Desember 2021

Rp400.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2022 sebesar Rp1.429.217,00 merupakan sisa dana UP/GU yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atas SKPD Kecamatan Karanggayam. Setoran atas UP/GU tersebut baru disetorkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Sedangkan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2021 sebesar Rp400.000,00 merupakan sisa dana TU yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atas sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 yang disetor tanggal 4 Januari 2022. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran dijelaskan pada **Lampiran 22**.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2022

Rp87.496.345.014,98

31 Desember 2021

Rp96.376.474.671,98

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 terdiri dari berikut ini.

Tabel 93. Kas di BLUD TA 2022

No	Uraian	Saldo SP3BP (Rp)	Setoran Silpa BLUD ke RKUD (Rp)	Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2022		
				Tunai (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	RSUD dr. Soedirman	57.325.530.201,00	5.000.000.000,00	36.655.136,00	52.288.875.065,00	52.325.530.201,00
2	RSUD Prembun	35.578.253.474,00	5.000.000.000,00	22.129.662,00	30.556.123.812,00	30.578.253.474,00
3	Puskesmas	4.592.561.339,98	0,00	0,00	4.592.561.339,98	4.592.561.339,98
	Jumlah	97.496.345.014,98	10.000.000.000,00	58.784.798,00	87.437.560.216,98	87.496.345.014,98



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.496.345.014,98 terdiri dari Kas Tunai pada RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun sebesar Rp58.784.798,00 dan Kas di Bank senilai Rp87.437.560.216,98.

Pada TA 2022 terdapat Setoran Silpa BLUD ke RKUD senilai Rp10.000.000.000,00 terdiri dari Silpa RSUD dr. Soedirman Rp5.000.000.000,00 yang disetorkan pada tanggal 13 Desember 2022 dan Silpa RSUD Prembun Rp5.000.000.000,00 yang disetorkan tanggal 12 Desember 2022. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/401 Tahun 2022 tentang Perintah Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 Desember 2022. Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.496.345.014,98 masing-masing BLUD dirinci pada **Lampiran 23**.

1. Saldo Kas BLUD di RSUD dr. Soedirman

Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Soedirman per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.325.530.201,00 terdiri dari:

Tabel 94. Rincian Kas BLUD RSUD dr. Soedirman TA 2022

No	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo (Rp)
a	Tunai			36.655.136,00
b	Rekening Pengeluaran BLUD	Bank Jateng	1-008-00288-2	0,00
c	Rekening Operasional Penerimaan BLUD	BRI	0032-01002104-30-8	0,00
		Bank Jateng	1-008-00850-3	0,00
d	Rekening Operasional BLUD	Bank Jateng	1-008-00287-4	52.288.875.065,00
	Jumlah			52.325.530.201,00

- Kas tunai di RSUD dr. Soedirman sebesar Rp36.655.136,00 merupakan kas di bendahara penerimaan atas pendapatan tanggal 31 Desember 2022 yang belum disetor ke bank, setelah jam layanan bank berakhir yaitu pendapatan yang diterima tanggal 31 Desember 2022 pukul 14.00 s/d 24.00 yang disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 2 Januari 2023.
- Rekening Pengeluaran BLUD RSUD dr. Soedirman per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan kas bendahara pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD.
- Saldo Rekening Operasional Penerimaan BLUD RSUD dr. Soedirman di Bank Jateng Cabang Kebumen dan BRI Kantor Cabang Kebumen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.
- Saldo Bank sebesar Rp52.288.875.065,00 merupakan saldo kas Operasional BLUD RSUD dr. Soedirman yang berada di Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi pada rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Kebumen dengan Nomor Rekening 1-008-00287-4.

2. Saldo Kas BLUD di RSUD Prembun

Saldo Kas BLUD pada RSUD Prembun per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.578.253.474,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 95. Rincian Kas BLUD RSUD Prembun TA 2022

No	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo (Rp)
a	Tunai			22.129.662,00
b	Rekening Pengeluaran BLUD	Bank Jateng	1-008-00977-1	0,00
c	Rekening Operasional Penerimaan BLUD	Bank Jateng	1-008-00838-4	0,00
d	Rekening Operasional BLUD	Bank Jateng	1-008-00729-9	30.556.123.812,00
	Jumlah			30.578.253.474,00

- a. Kas tunai sebesar Rp22.129.662,00 terdiri dari kas di bendahara penerimaan atas pendapatan tanggal 31 Desember 2022 yang belum disetorkan karena diluar jam operasional bank sebesar Rp16.269.162,00 dan baru disetorkan tanggal 2 Januari 2023, serta uang pendapatan parkir bulan Desember 2022 sebesar Rp5.860.500,00 yang disetorkan pada tanggal 10 Januari 2023;
 - b. Rekening Pengeluaran BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan kas bendahara pengeluaran dimana sisa belanja UP/GU telah disetor kembali ke kas BLUD;
 - c. Saldo Rekening Operasional Penerimaan BLUD RSUD Prembun di Bank Jateng Cabang Kebumen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00;
 - d. Saldo Bank sebesar Rp30.556.123.812,00 merupakan saldo kas BLUD RSUD Prembun yang ada di Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi pada rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Kebumen dengan Nomor Rekening 1-008-00729-9.
3. Saldo Kas BLUD di Puskesmas
- Saldo Kas BLUD di 37 Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.592.561.339,98 berada di rekening bank dengan rincian masing-masing puskesmas pada **Lampiran 23**.

5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.037.127.884,00	Rp4.995.026.294,00

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 terdiri dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang berada pada 736 Bendahara BOS SD Negeri dan 59 Bendahara BOS SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp1.037.127.884,00. Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2022 dijelaskan pada Tabel Rincian Saldo Dana BOS pada **Lampiran 24**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.1.6 Piutang Pajak daerah

31 Desember 2022

Rp7.980.512.527,00

31 Desember 2021

Rp7.474.389.558,00

Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP) per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 96. Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Piutang Pajak Hotel	4.790.000,00	470.000,00	4.320.000,00	919,15
Piutang Pajak Restoran	27.837.993,00	10.401.728,00	17.436.265,00	167,63
Piutang Pajak Hiburan	2.400.000,00	150.000,00	2.250.000,00	1.500,00
Piutang Pajak Reklame	46.236.750,00	45.980.550,00	256.200,00	0,56
Piutang Pajak Parkir	4.790.000,00	650.000,00	4.140.000,00	636,92
Piutang Pajak Air Tanah	10.533.100,00	7.695.300,00	2.837.800,00	36,88
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.860.000,00	0,00	12.860.000,00	100,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.870.564.684,00	7.409.041.980,00	461.522.704,00	6,23
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Jumlah	7.980.512.527,00	7.474.389.558,00	506.122.969,00	6,77

Piutang Pajak Daerah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,77%, nilai piutang terbesar TA 2022 yaitu Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp7.870.564.684,00 dimana besaran piutangnya naik sebesar 6,23% dari TA 2021. Kenaikan tersebut salah satunya dikarenakan terjadi kenaikan tarif pajak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 980/1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Meskipun begitu pada Tahun 2022 terdapat pengurangan nilai piutang pajak PBB-P2 karena adanya penghapusan piutang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 983/336 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Karena Kedaluwarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen sebesar Rp1.301.251.732,00.

Sedangkan presentase kenaikan terbesar ada pada Piutang Pajak Hiburan yang naik sebesar 1.500% dari TA 2021, presentase kenaikan terbesar kedua yaitu Piutang Pajak Hotel sebesar 919,15%. Kenaikan piutang pajak untuk pajak yang tidak menggunakan ketetapan salah satunya merupakan dampak dari perhitungan pajak dengan metode *self assessment* yaitu merupakan metode pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana WP sudah melaporkan perhitungannya sendiri namun belum menyetorkan pajaknya. Himbauan untuk melakukan *self assessment* dilakukan melalui Surat Kepala Badan Pengelolaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 983/7089 tanggal 18 Oktober 2022 perihal pemberitahuan. Rincian Piutang Pajak Daerah dijelaskan pada **Lampiran 25**.

5.3.1.1.7 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2022

Rp4.079.655.400,00

31 Desember 2021

Rp3.453.384.530,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.083.826.850,00	653.823.100,00	430.003.750,00	65,77
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.160.102.550,00	1.096.512.430,00	63.590.120,00	5,80
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	587.500.000,00	630.684.000,00	(43.184.000,00)	100,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.861.000,00	0,00	175.861.000,00	100,00
Jumlah		4.079.655.400,00	3.453.384.530,00	626.270.870,00	18,13

- a. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.072.365.000,00 adalah piutang atas pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Piutang tersebut merupakan piutang atas tunggakan tahun 2019 dan 2020 yang hingga 31 Desember 2022 belum dibayarkan, rincian piutang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 98. Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022

Pihak Ketiga	No. Perjanjian	Tunggakan 2019 (Rp)	Tunggakan 2020 (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)
KSU Jalan Persaudaraan	551.2/0614/III/2019	348.735.000,00	723.630.000,00	1.072.365.000,00
Jumlah		348.735.000,00	723.630.000,00	1.072.365.000,00

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2021 berada di Dinas Perhubungan, karena pada TA 2022 terdapat perubahan SOTK maka Piutang tersebut pada TA 2022 dicatatkan pada SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- b. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar berupa penyewaan kios pasar. Pada TA 2021 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp653.823.100,00, namun pada TA 2022 terdapat perubahan nomenklatur SKPD sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan diganti menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 meningkat sebesar 65,77% atau menjadi sebesar Rp1.083.826.850,00. Adapun tunggakan retribusi pasar yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dibayar dirinci sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 dan TA 2021

No	Wilayah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1	UPTD PASAR I	356.767.900,00	267.555.300	89.212.600,00	33,34
2	UPTD PASAR II	135.178.300,00	74.727.700	60.450.600,00	80,89
3	UPTD PASAR III	567.433.850,00	276.954.000	290.479.850,00	104,88
4	UPTD PASAR IV	24.446.800,00	34.586.100	(10.139.300,00)	(29,32)
	JUMLAH	1.083.826.850,00	653.823.100,00	430.003.750,00	65,77

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah TA 2022 dijelaskan pada **Lampiran 26**.

- c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata pada TA 2021 sebesar Rp1.096.512.430,00. Pada TA 2022 karena terjadi perubahan nomenklatur SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimana nilai Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2022 sebesar Rp1.160.102.550,00 atau naik sebesar 5,80% dari TA 2021.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan tunggakan atas sewa kios pada obyek wisata dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 100. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA 2022 dan TA 2021**

No	Nama Obyek Wisata	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1	Goa Jatijajar	125.026.590,00	122.287.670,00	2.738.920,00	2,24
2	Pantai Logending	95.716.000,00	77.610.800,00	18.105.200,00	23,33
3	Pantai Karangbolong	5.656.000,00	5.600.000,00	56.000,00	1,00
4	Pantai Petanahan	190.506.000,00	172.030.000,00	18.476.000,00	10,74
5	Goa Petruk	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pantai Suwuk	734.896.960,00	709.880.960,00	25.016.000,00	3,52
7	PAP Krakal	8.013.000,00	3.594.000,00	4.419.000,00	122,95
8	Waduk Sempor	288.000,00	5.509.000,00	(5.221.000,00)	(94,77)
	Jumlah	1.160.102.550,00	1.096.512.430,00	63.590.120,00	5,80

Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA 2022 dijelaskan pada **Lampiran 27**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- d. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada TA 2022 sebesar Rp587.500.000,00 merupakan Piutang Retribusi Kios Terminal Tipe A. Dimana pada TA 2021 Piutang tersebut berada di Dinas Perhubungan namun karena pada TA 2022 terjadi perubahan nomenklatur SKPD, Dinas Perhubungan berubah menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Dari piutang TA 2021 sebesar Rp630.684.000,00 terdapat pembayaran pada TA 2022 sebesar Rp15.700.000,00 sehingga piutang pada TA 2022 berkurang menjadi sebesar Rp587.500.000,00. Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dijelaskan pada **Lampiran 28**.
- e. Piutang Retribusi IMB Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang TA 2022 sebesar Rp175.861.000,00 merupakan hak pemerintah Kabupaten Kebumen atas Pendapatan Retribusi IMB. Ketetapan piutang Retribusi IMB berdasarkan pada terbitnya SKRD Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung mendasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung. Rincian Piutang Retribusi IMB dirinci sebagai berikut:

Tabel 101. Piutang Retribusi IMB TA 2022

No	Nama Wajib Retribusi	Nomor SKRD	Tanggal SKRD	Tgl Jatuh Tempo	Nilai Piutang (Rp)
1	Ade Kurniawan	0386	01 Desember 2022	3 Januari 2023	35.143.000,00
2	Mida Gita Fitria	0346	13 September 2022	16 Oktober 2022	40.748.000,00
3	Iksanudin	0393	14 Desember 2022	16 Januari 2023	7.258.000,00
4	Jubaedi	0392	14 Desember 2022	16 Januari 2023	92.712.000,00
Jumlah					175.861.000,00

5.3.1.1.8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp20.390.647.936,94	Rp91.899.678.013,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 102. Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.665.717.308,94	2.708.197.649,00	(42.480.340,06)	(1,57)
Piutang Pendapatan BLUD	17.100.700.227,00	88.566.374.963,00	(71.465.674.736,00)	(80,69)
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	624.230.401,00	625.105.401,00	(875.000,00)	(0,14)
Jumlah	20.390.647.936,94	91.899.678.013,00	(71.509.030.076,06)	(77,81)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Pada TA 2022 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp71.508.914.576,06 atau 77,81% dibandingkan dengan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp91.899.678.013,00. Prosentase penurunan tertinggi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah ada di Piutang Pendapatan BLUD sebesar 80,69%.

a. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 berada di SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), namun karena terjadi perubahan nomenklatur SKPD maka pada TA 2022 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar 1,56% dari TA 2021 yang sebesar Rp2.708.194.649,00 menjadi sebesar Rp2.665.832.808,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	12.000,00	13.400,00	(1.400,00)	(10,45)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.670.280,00	2.382.725,00	(712.445,00)	(29,90)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	6.852.813,00	6.747.461,00	105.352,00	1,56
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	397.000,00	295.000,00	102.000,00	34,58
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.034.614,00	1.083.588,00	(48.974,00)	(4,52)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	159.300,00	0,00	159.300,00	100,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.655.523.301,94	2.697.672.475,00	(42.149.173,06)	(1,56)
Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Jumlah	2.665.717.308,94	2.708.194.649,00	(42.477.340,06)	(1,57)

Rincian Perhitungan Denda dijelaskan pada **Lampiran 25**.

b. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD TA 2022 senilai Rp17.100.700.227,00 mengalami penurunan sebesar 80,69% dari saldo TA 2021 yang sebesar Rp88.566.374.963,00. Rincian Piutang Pendapatan BLUD dirinci sebagai berikut.

Tabel 104. Rincian Piutang Pendapatan BLUD TA 2022 dan TA 2021

No	BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	UPTD RSUD Dr. Soedirman	12.049.027.394,00	69.410.637.053,00	(57.361.609.659,00)	-82,64
2	UPTD RSUD Prembun	4.533.360.233,00	18.642.529.510,00	(14.109.169.277,00)	-75,68
3	Puskesmas	518.312.600,00	513.208.400,00	5.104.200,00	0,99
	Jumlah	17.100.700.227,00	88.566.374.963,00	(71.465.674.736,00)	-80,69



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

1) Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman

Piutang RSUD dr. Soedirman TA 2022 sebesar Rp12.049.027.394,00 jika dibandingkan jumlah piutang TA 2021 yang sebesar Rp69.410.637.053,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.361.609.659,00 atau 82,64%.

Piutang di RSUD dr. Soedirman Kebumen merupakan tagihan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien yang telah mendapatkan pelayanan yang dapat dijadikan kas namun sampai dengan tanggal neraca belum diterima dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang RSUD dr. Soedirman disajikan sebagai berikut:

Tabel 105. Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Piutang Umum	2.204.871.630,00	2.725.480.976,00	(520.609.346,00)	(19,10)
BPJS	8.218.011.029,00	6.495.185.707,00	1.722.825.322,00	26,52
KEMENKES	1.307.368.900,00	59.919.733.100,00	(58.612.364.200,00)	(97,82)
Piutang Jasa Raharja	629.366,00	39.845.120,00	(39.215.754,00)	(98,42)
Piutang Jamkesda	166.327.610,00	29.757.136,00	136.570.474,00	458,95
Piutang Radiologi dan Laboratorium	75.763.683,00	68.426.720,00	7.336.963,00	10,72
Piutang LPSK	0,00	2.880.482,00	(2.880.482,00)	(100,00)
Piutang Sewa	29.628.033,00	6.073.000,00	23.555.033,00	387,86
Piutang TCM	25.500.000,00	22.225.000,00	3.275.000,00	14,74
Piutang Obat	4.374.366,00	3.586.837,00	787.529,00	21,96
Piutang Lain-Lain (Cut off Bunga Deposito)	0,00	29.972.602,00	(29.972.602,00)	(100,00)
Piutang Diklat	0,00	3.675.000,00	(3.675.000,00)	(100,00)
Piutang JKK	16.552.777,00	45.405.373,00	(28.852.596,00)	(63,54)
Piutang Biaya Transfer	0,00	30.000,00	(30.000,00)	(100,00)
Piutang Retur Alat Kesehatan	0,00	18.360.000,00	(18.360.000,00)	(100,00)
Jumlah	12.049.027.394,00	69.410.637.053,00	(57.361.609.659,00)	(82,64)

Penurunan piutang RSUD dr. Soedirman salah satunya terjadi karena pada tahun 2022 terdapat penghapusan piutang RSUD dr. Soedirman sebesar Rp682.162.273,00. Penghapusan tersebut menghapus Piutang Umum RSUD dr. Soedirman, yaitu piutang yang berasal dari jasa pelayanan kesehatan pasien umum, nilai penghapusan piutang tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/447 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/435 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Atas Piutang Pasien Pada rumah Sakit Umum Daerah dr Soedirman Kebumen.

Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan merupakan piutang atas data yang sudah terverifikasi sedangkan terkait pengajuan klaim yang belum terverifikasi tidak diakui sebagai piutang. Data per 31 Desember 2022 dari pengajuan klaim RSUD dr. Soedirman ke BPJS terdapat klaim dengan kriteria *pending* senilai Rp3.414.139.955,00, *dispute* senilai Rp17.709.800,00 dan tidak layak sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rp297.980.600. Sedangkan dari pengajuan klaim Kemenkes terdapat kriteria *pending* senilai Rp302.559.400,00 dan kriteria *dispute* senilai Rp245.821.600,00.

2) Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun

Tabel 106. Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Piutang Klaim Covid / Kemenkes	555.555.900,00	16.262.701.800,00	(15.707.145.900,00)	(96,58)
Piutang BPJS	3.767.196.252,00	2.114.672.163,00	1.652.524.089,00	78,15
Piutang Jasa Raharja	10.011.896,00	29.447.269,00	(19.435.373,00)	(66,00)
Piutang JCT Scan	0,00	71.368.153,00	(71.368.153,00)	(100,00)
Piutang Taspen	0,00	8.025.544,00	(8.025.544,00)	(100,00)
Piutang Sewa Gedung	0,00	1.545.000,00	(1.545.000,00)	(100,00)
Piutang Umum	162.846.185,00	142.694.581,00	20.151.604,00	14,12
Piutang TCM Laboratorium	37.750.000,00	12.075.000,00	25.675.000,00	212,63
Jumlah	4.533.360.233,00	18.642.529.510,00	(14.109.169.277,00)	(75,68)

Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.533.360.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.109.169.277,00 atau 75,68% dari piutang TA 2021 yang bernilai Rp18.642.529.510,00. Piutang BPJS dan Piutang Kemenkes yang disajikan RSUD Prembun merupakan piutang atas data yang sudah lolos verifikasi sedangkan terkait pengajuan klaim yang belum terverifikasi tidak diakui sebagai piutang. Piutang *dispute* Kemenkes sebesar Rp55.169.000,00 dan Piutang *pending* Kemenkes sebesar Rp68.974.700,00

3) Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas

Piutang Puskesmas TA 2022 sebesar Rp518.312.600,00 jika dibandingkan dengan piutang TA 2021 yang sebesar Rp513.208.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.104.200,00 atau 0,99%. Piutang Puskesmas yang disajikan merupakan piutang BPJS yang sudah terverifikasi, adapun rincian piutang masing-masing Puskesmas dirinci pada **Lampiran 29**.

c. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 sebesar Rp625.105.401,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 107. Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008)	24.178.000,00	24.178.000,00	0,00	0,00
2	Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop	600.052.401,00	600.052.401,00	0,00	0,00
3	Piutang atas jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan TA 2020	0,00	875.000,00	(875.000,00)	(100,00)
	Jumlah	624.230.401,00	625.105.401,00	(875.000,00)	(0,14)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- (1) Piutang dari Jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan Sebesar Rp24.178.000,00 dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 108. Piutang Jasa Investasi dana Bergulir Dinas Pertanian dan Pangan
Per 31 Desember 2022**

No	Tahun	Sisa Pinjaman per 31 Desember 2022		
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2005	1.000.000	1.600.000	2.600.000
2	2006	94.487.000	7.278.000	101.765.000
3	2007	70.500.000	3.000.000	73.500.000
4	2008	161.945.000	12.300.000	174.245.000
	Jumlah	327.932.000	24.178.000	352.110.000

- (2) Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop yang pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Perkembangan per 31 Desember 2022, dari 112 debitur terdapat 68 debitur dinyatakan tidak aktif dan 44 debitur aktif. Dimana informasi tahap pengurusan terakhir yaitu terdapat 32 debitur dalam tahap Laporan Pemberitahuan Surat Paksa, tujuh debitur tahap Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan lima debitur berada pada tahap Surat Paksa. Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop sebesar Rp600.052.401,00 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 109. Piutang Dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
per 31 Desember 2022**

No	Tahun Perguliran	Saldo		
		Pokok (Rp)	Jasa Pinjaman (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)
I	Pengguliran			
1	Tahun 2000	116.674.500,00	11.711.500,00	128.386.000,00
2	Tahun 2002	45.434.500,00	4.719.500,00	50.154.000,00
3	Tahun 2003	120.474.700,00	13.730.000,00	134.204.700,00
4	Tahun 2005	41.313.455,00	7.179.000,00	48.492.455,00
5	Tahun 2006	37.263.409,00	6.993.700,00	44.257.109,00
6	Tahun 2007	60.633.137,00	7.950.000,00	68.583.137,00
	Jumlah	421.793.701,00	52.283.700,00	474.077.401,00
II	Digulirkan Kembali			
1	Tahun 2001	34.005.000,00	3.345.000,00	37.350.000,00
2	Tahun 2002	33.481.000,00	3.350.000,00	36.831.000,00
3	Tahun 2005	8.990.000,00	1.050.000,00	10.040.000,00
4	Tahun 2006	11.435.000,00	1.129.000,00	12.564.000,00
5	Tahun 2007	7.450.000,00	1.840.000,00	9.290.000,00
6	Tahun 2008	16.100.000,00	3.800.000,00	19.900.000,00
	Jumlah	111.461.000,00	14.514.000,00	125.975.000,00
Jumlah Keseluruhan		533.254.701,00	66.797.700,00	600.052.401,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Terhadap Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Semester II Tahun 2022 Nomor 26/LHPt/XVIII.SMG/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 bahwa dari Total nilai kerugian daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp23.125.410.454,39 telah diselesaikan dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp22.396.643.119,41, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp728.767.334,98 yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 110. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah TA 2022

Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(3-5-7-9)
Bendahara										
Sudah ada penetapan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sedang dalam proses	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Jumlah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain										
Sudah ada penetapan	8	87.309.565,00	0	-	8	87.309.565,00	0	-	0	-
Sedang dalam proses	1	5.200.000,00	0	-	1	5.200.000,00	0	-	0	-
Jumlah	9	92.509.565,00	0	-	9	92.509.565,00	0	-	0	-
Pihak Ketiga										
Sudah ada penetapan	1	7.700.000,00	0	-	1	7.700.000,00	0	-	0	-
Sedang dalam proses	1	11.821.000,00	0	-	1	11.821.000,00	0	-	0	-
Jumlah	2	19.521.000,00	0	-	2	19.521.000,00	0	-	0	-
Informasi Kerugian										
Sudah ada penetapan	76	19.549.159.227,96	7	6.278.278.423,03	69	12.561.710.267,95	0	-	7	709.170.536,98
Sedang dalam proses	282	3.464.220.661,43	3	24.546.875,00	270	3.420.076.988,43	0	-	12	19.596.798,00
Jumlah	358	23.013.379.889,39	10	6.302.825.298,03	339	15.981.787.256,38	0	0,00	19	728.767.334,98
TOTAL	369	23.125.410.454,39	10	6.302.825.298,03	350	16.093.817.821,38	0	0,00	19	728.767.334,98

Adapun rincian sisa kerugian negara/daerah yang belum ditindaklanjuti dijelaskan pada **Lampiran 30**.

5.3.1.1.9 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2022

Rp0,00

31 Desember 2021

Rp0,00

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, terdapat informasi bahwa Kabupaten Kebumen terdapat Kurang Bayar dan Lebih bayar DBH dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

1. Kurang Bayar DBH senilai Rp3.809.118.630,00 yang terdiri dari DBH pajak sebesar Rp3.756.327.799,00 dan DBH SDA sebesar Rp52.790.831,00.
2. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp502.777.814,00 yang terdiri dari DBH pajak sebesar Rp78.545.238,00 dan DBH SDA sebesar Rp424.232.576,00.
3. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 senilai Rp908.565.154,00 yang terdiri dari DBH pajak sebesar Rp884.878.188,00 dan DBH SDA sebesar Rp23.686.966,00.

Dimana terhadap nilai tersebut tidak dicantumkan dalam perhitungan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp3.437.968.245,00	Rp4.770.941.665,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan nilai sebagai berikut.

Tabel 111. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	BPKPD	3.437.968.245,00	4.770.941.665,00	(1.332.973.420,00)	(27,94)

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi sudah disalurkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp4.770.941.665,00.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 24/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2023 senilai Rp3.437.968.245,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 112. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022

No	Jenis Bagi Hasil	Kurang Salur TA 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.161.536.538,00
2	BBNKB	521.965.387,00
3	PBBKB	1.673.572.649,00
4	PAP	80.893.671,00
	Jumlah	3.437.968.245,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang

31 Desember 2022

(Rp9.170.645.322,50)

31 Desember 2021

(Rp10.027.551.584,00)

Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 113. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022

Piutang Daerah	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Pajak Daerah	7.980.512.527,00	2.245.713.234,00	5.734.799.293,00
Piutang Retribusi Daerah	4.079.655.400,00	3.505.327.431,50	574.327.968,50
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.390.647.936,94	3.419.604.657,00	16.971.043.279,94
Piutang Transfer pemerintah Daerah Lainnya	3.437.968.245,00	0,00	3.437.968.245,00
Jumlah	35.888.784.108,94	9.170.645.322,50	26.718.138.786,44

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 114. Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2022

Piutang Pajak daerah	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
PBB P2	7.870.564.684,00	2.236.829.781,00	5.633.734.903,00
Pajak Hotel	4.790.000,00	23.950,00	4.766.050,00
Pajak Restoran	27.837.993,00	1.609.758,00	26.228.235,00
Pajak Air Tanah	10.533.100,00	1.050.833,00	9.482.267,00
Pajak Parkir	4.790.000,00	625.700,00	4.164.300,00
Pajak Reklame	46.236.750,00	5.494.412,00	40.742.338,00
Pajak BPHTB	500.000,00	2.500,00	497.500,00
Pajak MBLB	12.860.000,00	64.300,00	12.795.700,00
Pajak Hiburan	2.400.000,00	12.000,00	2.388.000,00
Jumlah	7.980.512.527,00	2.245.713.234,00	5.734.799.293,00

Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu:

- Kualitas lancar, dimana umur piutang kurang dari 1 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar, dimana umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan, dimana umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- Kualitas macet, dimana umur piutang lebih dari 5 tahun nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penyisihan Piutang Pajak Daerah Sebesar Rp2.245.702.059,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 115. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2022

No	Uraian	Umur Piutang				Piutang Bruto (Rp)
		< 1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun	> 5 Tahun	
1	PBB P2	2.319.079.203,00	1.390.829.037,00	4.149.009.925,00	11.646.519,00	7.870.564.684,00
2	Pajak Hotel	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00
3	Pajak Restoran	24.274.128,00	733.865,00	2.830.000,00	0,00	27.837.993,00
4	Pajak Air Tanah	8.516.600,00	0,00	2.016.500,00	0,00	10.533.100,00
5	Pajak Parkir	4.140.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00	4.790.000,00
6	Pajak Reklame	33.213.300,00	2.958.450,00	10.065.000,00	0,00	46.236.750,00
7	Pajak BPHTB	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8	Pajak MBLB	12.860.000,00	0,00	0,00	0,00	12.860.000,00
9	Pajak Hiburan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Jumlah	2.409.773.231,00	1.394.571.352,00	4.163.921.425,00	12.246.519,00	7.980.512.527,00
Penyisihan Piutang		0,5%	10%	50%	100%	
Nilai Penyisihan		12.048.867,00	139.457.135,00	2.081.960.713,00	12.246.519,00	2.245.713.234,00
Net Realizable Value (NRV)		2.397.724.364,00	1.255.114.217,00	2.081.960.712,00	0,00	5.734.799.293,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel 116. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2022

No	Piutang Retribusi	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.083.826.850,00	747.930.644,00	335.896.206,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.747.602.550,00	1.685.031.787,50	62.570.762,50
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	175.861.000,00	0,00	175.861.000,00
	Jumlah	4.079.655.400,00	3.505.327.431,50	398.466.968,50

Besaran Penyisihan Piutang Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu:

- Kualitas lancar, dimana umur piutang kurang dari 0 sampai dengan 1 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar, dimana umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan, dimana umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- Kualitas macet, dimana umur piutang lebih dari 12 bulan nilai penyisihan piutangnya sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp3.505.327.431,50 dirinci sebagai berikut.

- a. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum pada Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Tabel 117. Penyisihan Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Umur Piutang				Saldo Akhir
	0 s/d 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 12 Bulan	> 12 Bulan	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00
Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Nilai Penyisihan	0,00	0,00	0,00	1.072.365.000,00	1.072.365.000,00
Net Realizable Value(NRV)					0,00

- b. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 118. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Umur Piutang				Saldo Akhir
	0 s/d 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 12 Bulan	> 12 Bulan	
Pasar UPT I	5.027.750,00	12.515.000,00	167.155.750,00	172.069.400,00	356.767.900,00
Pasar UPT-UPW II	3.905.200,00	8.221.500,00	94.656.600,00	28.395.000,00	135.178.300,00
Pasar UPT-UPW III	4.274.150,00	9.782.700,00	300.316.500,00	253.060.500,00	567.433.850,00
Pasar UPT-UPW IV	2.386.700,00	5.396.800,00	13.983.100,00	2.680.200,00	24.446.800,00
Jumlah	15.593.800,00	35.916.000,00	576.111.950,00	456.205.100,00	1.083.826.850,00
Penyisihan Piutang	0,5%	10%	50%	100%	
Nilai Penyisihan	77969,00	3591600,00	288.055.975,00	456.205.100,00	747.930.644,00
Net Realizable Value(NRV)					335.896.206,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- c. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios di lokasi Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tabel 119. Penyisihan Piutang Retribusi PKD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Obyek Wisata	Umur Piutang				Saldo Akhir
		0 s.d. 1 Bulan	1 s.d. 3 Bulan	3 s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan	
1	Goa Jatijajar	2.518.000,00	5.036.000,00	22.787.000,00	94.685.590,00	125.026.590,00
2	Pantai Logending	2.056.000,00	4.112.000,00	19.128.000,00	70.420.000,00	95.716.000,00
3	Pantai Suwuk	646.000,00	2.192.000,00	27.218.000,00	704.840.960,00	734.896.960,00
4	Pantai Petanahan	0,00	1.250.000,00	17.226.000,00	172.030.000,00	190.506.000,00
5	PAP Krakal	349.500,00	699.000,00	3.370.500,00	3.594.000,00	8.013.000,00
6	Pantai Karangbolong	28.000,00	56.000,00	252.000,00	5.320.000,00	5.656.000,00
7	Waduk Sempor	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
8	Goa Petruk	0,00	0,00	0,00	-	-
	Jumlah	5.597.500,00	13.345.000,00	89.981.500,00	1.051.178.550,00	1.160.102.550,00
	Penyisihan Piutang	0,5%	10%	50%	100%	
	Nilai Penyisihan	27.987,50	1.334.500,00	44.990.750,00	1.051.178.550,00	1.097.531.787,50
	Net Realizable Value (NRV)	5.569.512,50	12.010.500,00	44.990.750,00	0,00	62.570.762,50

- d. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios terminal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Tabel 120. Penyisihan Piutang Retribusi PKD Disperkimhub TA 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Umur Piutang				Saldo Akhir
	0 s/d 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 12 Bulan	> 12 Bulan	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	587.500.000,00	587.500.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	587.500.000,00	587.500.000,00
Penyisihan Piutang	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan	-	-	-	587.500.000,00	587.500.000,00
Net Realizable Value(NRV)					0,00

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 121. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.665.717.308,94	1.053.559.638,00	1.612.157.670,94
Piutang Pendapatan BLUD	17.100.700.227,00	1.741.814.618,00	15.358.885.609,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	624.230.401,00	624.230.401,00	0,00
Jumlah	20.390.647.936,94	3.419.604.657,00	16.971.043.279,94



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penjelasan penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 122. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	12.000,00	60,00	11.940,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.670.280,00	690.235,00	980.045,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	48.000,00	240,00	47.760,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	6.852.813,00	2.525.128,00	4.327.685,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	397.000,00	290.255,00	106.745,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.034.614,00	484.293,00	550.321,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	159.300,00	797,00	158.503,00
Piutang Pendapatan Denda PBBP2	2.655.523.301,94	1.049.568.530,00	1.605.954.771,94
Piutang Pendapatan Denda Bea BPHTB	20.000,00	100,00	19.900,00
Jumlah	2.665.717.308,94	1.053.559.638,00	1.612.157.670,94

- b. Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD, terdiri dari Penyisihan Piutang Pasien umum pada RSUD dr. Soedirman dan RSUD Prembun.

- 1) Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD RSUD dr. Soedirman

Dari Piutang BLUD pada RSUD dr. Soedirman sebesar Rp12.080.228.759,00 hanya piutang umum sebesar Rp2.204.871.630,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang. Perhitungan penyisihan Piutang RSUD dr. Soedirman sebesar Rp1.616.000.987,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 123. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedirman TA 2022

Umur Piutang	Nilai Piutang Rp	Nilai Penyisihan	Penyisihan Piutang Rp	Net Realizable Value (NRV)
0 s/d 1 bulan	149.563.386,00	0,50%	747.817,00	148.815.569,00
> 1 bulan s/d 1 tahun	177.147.557,00	10%	17.714.756,00	159.432.801,00
> 1 s/d 3 tahun	561.244.546,00	50%	280.622.273,00	280.622.273,00
> 3 tahun	1.316.916.141,00	100%	1.316.916.141,00	0,00
Jumlah	2.204.871.630,00		1.616.000.987,00	588.870.643,00

- 2) Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD RSUD Prembun

Dari Piutang BLUD pada RSUD Prembun sebesar Rp4.533.360.233,00 hanya piutang umum sebesar Rp162.846.185,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang. Perhitungan penyisihan Piutang RSUD Prembun sebesar Rp125.813.631,00 dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 124. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prembun TA 2022

Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan	Penyisihan Piutang (Rp)	Net Realizable Value(NRV) (Rp)
0 s/d 1 bulan	20.802.792,00	0,5%	104.014,00	20.698.778,00
> 1 bulan s/d 1 tahun	2.473.452,00	10%	247.345,00	2.226.107,00
> 1 s/d 3 tahun	28.215.339,00	50%	14.107.670,00	14.107.669,00
> 3 tahun	111.354.602,00	100%	111.354.602,00	0,00
Jumlah	162.846.185,00		125.813.631,00	37.032.554,00

c. Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

- 1) Perhitungan Penyisihan piutang jasa dana bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan sebesar Rp24.178.000,00 atau 100 % dari saldo piutang jasa bergulir disajikan sebagai berikut.

Tabel 125. Penyisihan Piutang Jasa Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan TA 2022

Tahun	Saldo 31 Desember 2021		Angsuran 2022		Saldo 31 Desember 2022		
	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
2005	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
2006	94.487.000,00	7.278.000,00	0,00	0,00	94.487.000,00	7.278.000,00	101.765.000,00
2007	70.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00	3.000.000,00	73.500.000,00
2008	161.945.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	161.945.000,00	12.300.000,00	174.245.000,00
Jumlah	327.932.000,00	24.178.000,00	0,00	0,00	327.932.000,00	24.178.000,00	352.110.000,00
Penyisihan > 5th (100%)					327.932.000,00	24.178.000,00	352.110.000,00
Net Realizable Value (NRV)					0,00	0,00	0,00

- 2) Perhitungan penyisihan piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop

Penyisihan piutang lainnya dana bergulir eks Disperindagkop sebesar 100% dari saldo piutang, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 126. Penyisihan Piutang Jasa Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan TA 2022

No	Tahun Pengguliran	Pinjaman			Umur Piutang (th)	Penyisihan Piutang		NRV (Rp)
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)		(%)	Nilai (Rp)	
I	Pengguliran							
1	2000	116.674.500,00	11.711.500,00	128.386.000,00	> 5 th	100	128.386.000,00	0,00
2	2002	45.434.500,00	4.719.500,00	50.154.000,00	> 5 th	100	50.154.000,00	0,00
3	2003	120.474.700,00	13.730.000,00	134.204.700,00	> 5 th	100	134.204.700,00	0,00
5	2005	41.313.455,00	7.179.000,00	48.492.455,00	> 5 th	100	48.492.455,00	0,00
6	2006	37.263.409,00	6.993.700,00	44.257.109,00	> 5 th	100	44.257.109,00	0,00
7	2007	60.633.137,00	7.950.000,00	68.583.137,00	> 5 th	100	68.583.137,00	0,00
Sub Jumlah		421.793.701,00	52.283.700,00	474.077.401,00			474.077.401,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No .	Tahun Pengguliran	Pinjaman			Umur Piutan g (th)	Penyisihan Piutang		NRV (Rp)
		Pokok (Rp)	Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)		(%)	Nilai (Rp)	
II	Digulirkan Kembali							
10	2001	34.005.000,00	3.345.000,00	37.350.000,00	> 5 th	100	37.350.000	0,00
11	2002	33.481.000,00	3.350.000,00	36.831.000,00	> 5 th	100	36.831.000	0,00
12	2005	8.990.000,00	1.050.000,00	10.040.000,00	> 5 th	100	10.040.000	0,00
13	2006	11.435.000,00	1.129.000,00	12.564.000,00	> 5 th	100	12.564.000	0,00
14	2007	7.450.000,00	1.840.000,00	9.290.000,00	> 5 th	100	9.290.000	0,00
15	2008	16.100.000,00	3.800.000,00	19.900.000,00	> 5 th	100	19.900.000	0,00
Sub Jumlah		111.461.000,00	14.514.000,00	125.975.000,00			125.975.000,00	0,00
Jumlah		533.254.701,00	66.797.700,00	600.052.401,00			600.052.401,00	0,00

5.3.1.1.12 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2022

Rp63.096.715,00

31 Desember 2021

Rp71.466.181,86

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai berikut.

Tabel 127. Beban Dibayar di Muka per SKPD TA 2022 dan TA 2021

No	OPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	BPKAD	63.096.715,00	33.195.839,86	29.900.875,14	90,07
2	DPUPR	0,00	30.800.080,00	(30.800.080,00)	100,00
3	Kec Bonorowo	0,00	1.068.093,00	(1.068.093,00)	100,00
4	Kec Buayan	0,00	2.139.756,00	(2.139.756,00)	100,00
5	Kec Klirong	0,00	3.137.413,00	(3.137.413,00)	100,00
6	Kec Sempor	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	100,00
Jumlah		63.096.715,00	71.466.181,86	(8.369.466,86)	(11,71)

Rincian beban dibayar di muka atas Asuransi kendaraan Dinas disajikan sebagai berikut.

Tabel 128. Rincian Beban dibayar di Muka atas Asuransi Kendaraan Dinas

Uraian Beban	No Dokumen Bukti Pengeluaran	Tgl Dokumen	Jumlah Beban (Rp)	Jangka Waktu	Masa Manfaat	Sisa Masa Manfaat	Nilai Beban Dibayar Dimuka (Rp)
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas	12.100.000.339.839	20/07/2021	21.379.000,00	01-08-2021 s.d 01-08-2023	24	7	6.235.541,67
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (5 unit)	12.200.002.532.483	07/04/2022	49.868.240,00	23-04-2022 s.d 23-04-2024	24	15	31.167.650,00
Beban Jasa Premi Kendaraan Dinas (2 unit)	12.200.006.355.461	25/08/2022	29.837.640,00	23-08-2022 s.d 23-08-2025	36	31	25.693.523,33
Jumlah			101.084.880,00				63.096.715,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.1.13 Persediaan

31 Desember 2022

Rp59.569.450.839,32

31 Desember 2021

Rp46.743.460.481,05

Nilai persediaan merupakan hasil *stock opname* dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2022, yang disajikan dengan harga beli terakhir, sebagai berikut.

Tabel 129. Daftar Persediaan

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Bahan	7.084.274.081,73	5.393.010.221,24	1.691.263.860,49	31,36
Suku Cadang	230.707.019,00	269.835.736,00	(39.128.717,00)	(14,50)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.673.503.472,50	4.631.395.426,50	1.042.108.046,00	22,50
Obat-obatan	45.734.969.904,19	35.417.447.008,79	10.317.522.895,40	29,13
Natura dan Pakan	845.996.361,90	1.031.772.088,52	(185.775.726,62)	(18,01)
Jumlah	59.569.450.839,32	46.743.460.481,05	12.825.990.358,27	27,44

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persediaan TA 2022 naik sebesar 27,44% dibandingkan nilai Persediaan TA 2021. Secara rinci persediaan per 31 Desember 2022 di SKPD disajikan sebagaimana **Lampiran 31**. Persediaan dalam neraca tidak mencatat persediaan barang kedaluwarsa. Sampai dengan 31 Desember 2022, barang kedaluwarsa yang belum dilakukan pemusnahan sebesar Rp295.422.661,15 yang secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

Dalam rangka penanggulangan anemia pada remaja yang berdampak pada kualitas kesehatan dan prestasi belajar serta berkontribusi dalam penurunan *stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pemerintah telah melaksanakan program suplementasi tablet tambah darah pada remaja putri di tingkat SMP/SMA/ sederajat. Provinsi Jateng memberikan bantuan berupa stik HB kepada Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kebumen sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor KN.01.04/VI.2/AIKES/PPK-KESMAS/246/2022 tanggal 29 November 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 130. Daftar Persediaan Hibah dari Pemerintah Provinsi TA 2022

Nama Barang	Penerimaan			Pengeluaran (unit)	Persediaan Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Jumlah barang (unit)	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan (Rp)		
Stik HB	18.045,00	5.795,00	104.570.775,00	18.045,00	0,00

Penerimaan Stik HB tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kesehatan dan PPKB, sedangkan nilai persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 hal ini dikarenakan, stik HB tersebut telah didistribusikan ke masing-masing UPT Puskesmas Dinas Kesehatan dan PPKB.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2022

Rp168.191.138.468,15

31 Desember 2021

Rp156.628.976.512,61

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri dari:

Tabel 131. Investasi Jangka Panjang TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	168.191.138.468,15	156.628.976.512,61	11.562.161.955,54	7,38
Jumlah	168.191.138.468,15	156.628.976.512,61	11.562.161.955,54	7,38

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2022

Rp0,00

31 Desember 2021

Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

5.3.1.2.1.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value (NRV)* setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian berikut ini.

Tabel 132. Daftar Investasi Non Permanen Lainnya TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dana Bergulir (perguliran 2005-2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Talangan (pembiayaan 2022)	0,00	0,00	0,00	0%
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0%



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

1. Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan (pengguliran 2005-2008) per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 133. Rincian Dana bergulir Pengguliran 2005-2008 per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal 1 Januari 2022	327.932.000,00
Penerimaan kembali pokok pinjaman di th 2022	0,00
Saldo akhir per 31 Desember 2022	327.932.000,00
Penyisihan (tahun ke 10)	100%
Nilai Penyisihan	327.932.000,00
Nilai Bersih (NRV) per 31 Desember 2022	0,00

2. Dana Talangan Pengadaan Pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani serta Pemberian Pinjaman Daerah kepada Rukun Nelayan melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.100.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2022 sudah dilunasi 100% oleh kelompok penerima.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp168.191.138.468,15	Rp156.628.976.512,61

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada TA 2022 sebesar Rp168.191.138.468,15 mengalami kenaikan sebesar 7,38% dari TA 2021 yang sebesar Rp156.628.976.512,61. Investasi Jangka Panjang Permanen yang berasal dari Penyertaan Modal dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 134. Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Penyertaan Modal	168.191.138.468,15	156.628.976.512,61	11.562.161.955,54	7,38
Jumlah	168.191.138.468,15	156.628.976.512,61	11.562.161.955,54	7,38

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada tujuh BUMD dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 135. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	PD BPR KEBUMEN	17.558.540.871,00	20.150.623.770,00	(2.592.082.899,00)	(12,86)
2	PD APOTEK LUK ULO	2.591.954.540,00	2.206.157.698,00	385.796.842,00	17,49
3	PDAM	58.996.442.800,00	56.489.318.791,00	2.507.124.009,00	4,44
4	PD BPR BKK KEBUMEN	30.394.200.257,15	28.832.876.253,61	1.561.324.003,54	5,42
5	PT BKK JATENG	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00
6	PT BPD JATENG	55.979.000.000,00	46.279.000.000,00	9.700.000.000,00	20,96
7	PT PRPP	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	168.191.138.468,15	156.628.976.512,61	11.562.161.955,54	7,38

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT BKK Jateng, PT BPD Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) disajikan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham < 20%, sedangkan untuk PD BPR Kebumen, PD Apotek Luk Ulo, PDAM, dan PD BPR BKK Kebumen menggunakan metode ekuitas.

Nilai investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Sehingga penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel 136. Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas & Metode Biaya TA 2022

No	BUMD	Modal Disetor (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Hak Pemkab atas Cadangan Laba/Rugi (Rp)	Dividen Diterima di TA 2022 (Rp)	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian	Nilai Investasi (Rp)	Opini LK BUMD
1	PD BPR BANK KEBUMEN	14.000.000.000,00	12.500.000.000,00	6.546.579.163,00	1.488.038.292,00	100,00%	Ekuitas	17.558.540.871,00	WTP
2	PD APOTEK LUK ULO	2.106.500.000,00	2.106.500.000,00	675.791.386,00	190.336.846,00	100,00%	Ekuitas	2.591.954.540,00	WTP
3	PDAM	45.961.647.118,00	53.734.127.837,00	7.289.137.286,00	2.026.822.323,00	100,00%	Ekuitas	58.996.442.800,00	WTP
4	PD BPR BKK KEBUMEN	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00	14.796.949.211,15	3.602.748.954,00	52,79%	Ekuitas	30.394.200.257,15	WTP
5	PT BKK JATENG	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	0,69%	Biaya	2.520.000.000,00	WTP
6	PT BANK JATENG	55.979.000.000,00	55.979.000.000,00	0,00	10.332.638.637,00	1,27%	Biaya	55.979.000.000,00	WTP
7	PT PRPP	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00	0,30%	Biaya	151.000.000,00	WTP
	Jumlah	139.918.147.118,00	146.190.627.837,00	29.308.457.046,15	17.640.585.052,00			168.191.138.468,15	

Pada TA 2022 penambahan modal disetor yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada BUMD diberikan pada 5 BUMD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 137. Penambahan Modal BUMD TA 2022

No	Nama Persda	Penambahan Modal TA 2022 (Rp)	Nomor SP2D	Tanggal SP2D
1	PD BPR KEBUMEN	1.500.000.000,00	01281/LS-PEMBY/DAU/2022	28 Oktober 2022
2	PD APOTEK LUK ULO	500.000.000,00	00715/LS-PEMBY/DAU/2022	08 Agustus 2022
3	PDAM	3.000.000.000,00	00897/LS-PEMBY/DAU/2022	31 Agustus 2022
4	PD BPR BKK KEBUMEN	3.500.000.000,00	01198/LS-PEMBY/DAU/2022	20 Oktober 2022
5	PT BPD JATENG	9.700.000.000,00	00928/LS-PEMBY/DAU/2022	01 September 2022
	Jumlah	18.200.000.000,00		

Besaran penambahan modal yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada BUMD mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen. Sedangkan dasar pembentukan masing-masing BUMD dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 138. Dasar Pembentukan BUMD

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Pembentukan
1	PD BPR KEBUMEN	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen
2	PD APOTEK LUK ULO	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma
3	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa (PDAM)	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa
4	PD BPR BKK KEBUMEN	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah
5	PT BKK JATENG	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
6	PT BPD JATENG	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 6 Tahun 1999 tanggal 12 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
7	PT PRPP	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp3.959.242.372.635,76	Rp3.985.548.772.976,26

Perincian masing-masing aset tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 139. Rincian Aset Tetap TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	31 Desember 2022	Saldo Awal	Kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
1.	Tanah	794.019.449.045,55	797.931.995.264,55	(3.912.546.219,00)	(0,49)
2.	Peralatan dan Mesin	1.094.696.731.234,00	990.208.063.048,00	104.488.668.186,00	9,54
3.	Gedung dan Bangunan	1.664.430.735.238,00	1.633.214.003.010,00	31.216.732.228,00	1,88
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.787.621.602.000,25	2.662.665.223.709,25	124.956.378.291,00	4,48
5.	Aset Tetap Lainnya	143.266.418.481,00	138.004.707.625,00	5.261.710.856,00	3,67
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	8.911.032.658,00	4.355.619.173,00	4.555.413.485,00	51,12
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.533.703.596.021,04)	(2.240.830.838.853,54)	(292.872.757.167,50)	11,56
	Jumlah	3.959.242.372.635,76	3.985.548.772.976,26	-26.306.400.340,50	(0,66)

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap selama Tahun 2022 disajikan sebagaimana **Lampiran 33** dengan penjelasan masing-masing jenis aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.3.5.1.1 Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp794.019.449.045,55	Rp. 797.931.995.264,55

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 140. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Tanah TA 2022

Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
797.931.995.264,55	25.994.211.996,00	29.906.758.215,00	(3.912.546.219)	794.019.449.045,55

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

Tabel 141. Penambahan Aset Tetap Tanah TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	1.365.412.030,00
2	Belanja Modal BLUD	22.427.550,00
3	Mutasi antar SKPD	15.483.667.166,00
4	Hasil inventarisasi	5.302.226.000,00
5	Hibah	1.165.691.000,00
6	Koreksi	2.605.314.250,00
7	Reklas	49.474.000,00
	JUMLAH	25.994.211.996,00

- 1) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.365.412.030,00 merupakan belanja modal tanah pada SKPD sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 142. Penambahan Aset Tetap Tanah karena Belanja Modal Tanah TA 2022

No	SKPD	Peruntukan Tanah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah untuk Pembangunan Oprit Jembatan Brangkal II Desa Klopogodo Kec Gombong	1.251.924.832,00
		Tanah untuk Pembangunan Drainase Adikarso - Depokrejo Kecamatan Kebumen	103.167.198,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tanah Puskesmas Bonorowo	10.320.000,00
JUMLAH			1.365.412.030,00

- 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp22.427.550,00 adalah belanja modal tanah Puskesmas Kuwarasan yang merupakan biaya *appraisal* pengadaan tanah.
- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 143. Penambahan Aset Tetap Tanah Karena Mutasi antar SKPD TA 2022

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	DPUPR	DLHKP	75.087.000,00	Tanah Kantor UPT Prembun
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas Buayan	673.293.440,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Bukuspesantren	491.400.400,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Kebumen II	1.086.095.520,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Sruweng	719.275.400,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Gombong II	853.977.040,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Karanggayam I	206.795.800,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Karanggayam II	275.627.880,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Karangsambung	292.411.800,00	Tanah Bangunan Puskesmas
		Puskesmas Sadang	167.800.306,00	Tanah Bangunan Puskesmas
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.120.186.580,00	Peleburan Korwil Disdik dan regroup SD Wonokriyo
4	Dinas Pertanian dan Pangan	DLHKP	4.355.190.000,00	Tanah kebun induk di Sidoharjo dan Arjomulyo Puring
		BPKPD (PPKD)	55.580.000,00	Tanah sawah dan BPP Purbowangi Buayan
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan KUKM	BPKPD (PPKD)	78.400.000,00	Tanah Pasar Hewan Purbowangi
		DLHKP	34.620.000,00	Tanah Bangunan Pasar Jogosimo
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPKPD (PPKD)	48.062.000,00	Tanah TIC Purbowangi Buayan
7	Kelurahan Panjer	Satuan Polisi Pamong Praja	31.464.000,00	Tanah Sawah Irigasi
8	Kelurahan Gombong	Kecamatan Gombong	2.918.400.000	Tanah Lapangan Manunggal
Jumlah			15.483.667.166,00	

- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah senilai Rp1.165.691.000,00 pada BPKPD (PPKD) merupakan perolehan hibah tanah bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

BAST Nomor BA-11/Ek.11/26/12/2022 dan Nomor 028.1/7073 tanggal 13 Desember 2022.

- 5) Penambahan Aset Tetap Tanah karena baru dicatat senilai Rp5.302.226.000,00 ada pada SKPD sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan senilai Rp25.000.000,00 merupakan tanah yang digunakan untuk Kantor Eks Kowil Dinas Pendidikan.
 - Puskesmas Mirit senilai Rp20.600.000,00 merupakan tanah yang digunakan untuk Pustu Tlogopragoto.
 - Puskesmas Karangsambung senilai Rp441.180.000,00 merupakan tanah yang digunakan untuk Puskesmas Karangsambung.
 - Kelurahan Kebumen senilai Rp4.535.446.000,00 berupa:
 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Manggar) senilai Rp459.000.000,00
 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Bakung) senilai Rp626.000.000,00
 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Soka) senilai Rp559.980.000,00
 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Barokah) senilai Rp2.157.666.000,00
 - Tanah Jalan Desa Lain-lain (Gang Perumahan Arumbinang) senilai Rp732.800.000,00
 - BPKPD selaku PPKD senilai Rp280.000.000,00 berupa tanah sawah yang akan digunakan untuk BNN.
- 6) Penambahan Aset Tetap Tanah karena koreksi senilai Rp2.605.314.250,00 terdiri dari:
- Penggabungan hasil koreksi pencatatan atas Ruas Jalan Pagebangan Somagede senilai Rp2.077.938.500,00, penggabungan hasil koreksi atas Ruas Jalan Sadang Srisip senilai Rp98.067.750,00, koreksi pencatatan atas tanah jalan kabupaten menjadi tanah bangunan air kotor senilai Rp3.740.000,00 dan koreksi pencatatan tanah Jembatan Winong senilai Rp11.448.000,00.
 - Penggabungan pencatatan nilai tanah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang semula tercatat dua bidang menjadi satu bidang sebagaimana sertifikat Hak Pakai Nomor 00111 tanggal 21 Juni 2022 senilai Rp399.000.000,00.
 - Koreksi nilai pada Kelurahan Tamanwinangun berupa tanah sawah irigasi karena pencatatan ganda senilai Rp15.120.000,00
- 7) Sedangkan penambahan Aset Tetap Tanah karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp49.474.000,00 merupakan reklas dari Aset Lainnya berupa biaya *stacking-out* Pengadaan Tanah untuk Konsultan *Stacking Out* Paket 1 (Jembatan Brangkal II Desa Klopogodo).

Pengurangan Aset Tanah Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 144. Pengurangan Aset Tetap Tanah TA 2022

No	Uraian	Nilai
1	Mutasi antar SKPD	15.483.667.166,00
2	Hibah	9.433.273.249,00
3	Koreksi	4.989.817.800,00
	JUMLAH	29.906.758.215,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD tahun 2022 sebesar Rp15.483.667.166,00 sebagaimana dijelaskan pada Tabel. 143 Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD di atas.
- 2) Pengurangan Aset tetap tanah karena hibah senilai Rp9.433.273.249,00 ada pada SKPD sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah kepada Korem 072 Pamungkas Yogyakarta senilai Rp736.376.970,00 sesuai SK Nomor 028/422 Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 dan BAST Nomor 028/581.10 tanggal 28 Maret 2022.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah tanah jalan ke desa senilai Rp8.604.016.279,00 sesuai SK Nomor 028/322 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022.
 - Kelurahan Tamanwinangun berupa hibah tanah sawah irigasi kepada Yayasan Thatmainnol Quluub senilai Rp92.880.000,00 sesuai SK Nomor 028/439 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, BAST Nomor 028/377.1 tanggal 25 Februari 2022.
- 3) Pengurangan aset tetap tanah karena koreksi terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 145. Pengurangan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah TA 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)	Uraian
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.792.000,00	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga (Desa Kebulusan)
		11.448.000,00	Pelebaran Jembatan Winong (Penyesuaian kode BMD ke tanah untuk jembatan)
		3.740.000,00	Bangunan Gorong-gorong (Penyesuaian kode BMD ke tanah untuk bangunan air)
		98.067.750,00	Pemasangan patok ruas Sadang-Srisip
		787.300.500,00	Pemasangan patok JLU ruas Pagebangan Somagede
		1.290.638.000,00	Pemasangan patok JLU ruas Pagebangan Somagede
2	Puskesmas Kuw arasan	22.427.550,00	Belanja <i>apraisal</i> pengadaan tanah
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.552.000,00	Tanah eks korwil Petanahan milik desa
4	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	140.800.000,00	Koreksi atribusi dan <i>apraisal</i> pengadaan tanah batas kota mirit
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	399.000.000,00	Koreksi penggabungan sertifikat
6	Kelurahan Tamanwinangun	15.120.000,00	Koreksi penggabungan sertifikat
7	Kelurahan Gombong	2.207.932.000,00	koreksi pencatatan ganda
	Jumlah	4.989.817.800,00	

Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan pengamanan aset tanah dengan melakukan pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Dari total tanah milik Pemda sebanyak 2.292 bidang, sebanyak 1.570 bidang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat yang disimpan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2022

Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki aset tetap tanah dan bangunan yang menghasilkan pendapatan sewa di mana menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, tanah dimaksud termasuk kategori properti investasi. Tanah dan bangunan dimaksud berupa:

- Tanah sawah eks bengkok kelurahan;
- Tanah dan bangunan pasar;
- Tanah dan bangunan gedung olahraga.

Namun demikian belum diklasifikasikan sebagai properti investasi karena Pemerintah Kabupaten Kebumen belum memiliki kebijakan akuntansi dan bagan akun standar terkait properti investasi.

5.3.1.3.1 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022

Rp1.094.696.731.234,00

31 Desember 2021

Rp990.208.063.048,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 146. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022

Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
990.208.063.048,00	164.115.222.366,00	59.626.554.180,00	104.488.668.186,00	1.094.696.731.234,00

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 147. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	31.117.017.318,00
2.	Belanja Modal BOS/BLUD	71.035.488.967,00
3.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.303.977.323,00
4.	Mutasi antar SKPD	49.071.719.255,00
5.	Perolehan dari Hibah	9.188.546.324,00
6.	Hasil inventarisasi	639.350.800,00
7.	Koreksi Pencatatan	27.463.554,00
8.	Penambahan dari Reklas	1.731.658.825,00
	Jumlah	164.115.222.366,00

- 1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp31.117.017.318,00 per SKPD disajikan sebagaimana **Lampiran 34**.
- 2) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD sebesar Rp71.035.488.967,00 berasal dari Belanja Modal Dana BOS senilai Rp21.372.682.269,00,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD senilai Rp49.662.806.698,00 dengan rincian tercantum dalam tabel.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 148. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
dari Belanja Modal BOS/BLUD TA 2022**

No	SKPD	Nilai (Rp)	BOS/BLUD
1	SD Negeri	15.137.673.520,00	BOS
2	SMP Negeri	6.235.008.749,00	BOS
3	Puskesmas	2.593.129.209,00	BLUD
4	RSUD dr. Soedirman	38.263.262.721,00	BLUD
5	RSUD Prembun	8.806.414.768,00	BLUD
JUMLAH		71.035.488.967,00	

- 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.303.977.323,00 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 149. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
dari Belanja Barang dan Jasa**

No	SKPD	Jumlah Barang (unit)	Nilai (Rp)
1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17	22.384.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	43.000.000,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98	96.131.980,00
4	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	55	9.872.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	6	197.600.000,00
6	RSU Dr. Soedirman	190	827.936.343,00
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	19.233.000,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	46.943.000,00
9	Kecamatan Alian	3	6.488.500,00
10	Kecamatan Ambal	8	20.000.000,00
11	Kelurahan Plarangan	10	11.940.000,00
12	Kecamatan Bonorowo	3	2.448.000,00
Jumlah		407	1.303.977.323,00

- 4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD senilai Rp49.071.719.255,00 disajikan dalam tabel **Lampiran 35**.
- 5) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan dari Hibah disajikan sebagai berikut

Tabel 150. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Hibah TA 2022

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	819.131.824,00	Hibah dari Kementerian Kesehatan (BAST Nomor KN.02.02/9/369.3/2022) dan CSR dari Bank Jateng
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (SD Negeri)	8.115.224.500,00	Hibah dari Kementerian Pendidikan (SK Nomor 21905C3/KPA/IX/SK/2022)
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (SMP Negeri)	254.190.000,00	Hibah dari Komite Sekolah
JUMLAH		9.188.546.324,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 6) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baru tercatat disajikan sebagai berikut:

Tabel 151. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Hasil Inventarisasi TA 2022

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	248.390.000,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (SMP Negeri 2 Buayan)	5.850.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	358.270.000,00
4	Kecamatan Kutowinangun	13.490.800,00
5	Kecamatan Poncowarno	13.350.000,00
	Jumlah	639.350.800,00

- 7) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan senilai Rp27.463.554,00 terdapat pada RSUD Prembun berupa koreksi pencatatan atas dua unit kendaraan bermotor.
- 8) Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 152. Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas dari
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.990.000,00	Gedung dan Bangunan
2	Bagian Umum	3.900.000,00	Aset Lainnya
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	802.537.260,00	JII
4	Dinas Kesehatan	18.291.500,00	Gedung dan Bangunan
5	Puskesmas Buayan	90.000.000,00	Aset Lainnya
6	Puskesmas Ambal I	9.392.260,00	JII
7	Puskesmas Prembun	2.300.000,00	JII
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.243.600,00	Aset Tetap Lainnya
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	756.390.100,00	Gedung dan Bangunan
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.900.000,00	Aset Lainnya
11	Kelurahan Tamanwinangun	25.714.105,00	Gedung dan Bangunan
	Jumlah	1.731.658.825,00	

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 153. Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kondisi Rusak Berat/Usul Penghapusan	8.113.765.098,00
2	Mutasi antar SKPD	49.071.719.255,00
3	Hibah	171.500.000,00
4	Koreksi	1.436.008.851,00
5	Reklas	833.560.976,00
	Jumlah	59.626.554.180,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 1) Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.113.765.098,00 yang di reklas ke Aset Lainnya merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena mutasi antar SKPD senilai Rp49.071.719.255,00 sama dengan mutasi penambahannya sebagaimana **Lampiran 35**.
- 3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp171.500.000,00 karena hibah dari RSUD dr. Soedirman berupa Kendaraan Ambulan kepada GP Ansor sebagaimana BAST Nomor 022/9536.a Tanggal 7 Juli 2022.
- 4) Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan senilai Rp1.436.008.851,00 disebabkan karena pengadaan belanja modal yang tidak memenuhi kategori aset tetap, koreksi dobel catat, dan koreksi bukan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dan koreksi nilai perolehan dengan rincian sebagaimana **Lampiran 36**.

**Tabel 154. Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin
karena Koreksi Pencatatan TA 2022**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	555.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.090.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.034.000,00
4	Puskesmas Bulus Pesantren II	1.432.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	239.381.660,00
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.119.672.791,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.400.000,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	4.218.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	6.302.500,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7.768.900,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.219.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.800.000,00
13	Kecamatan Alian	8.925.000,00
14	Kecamatan Puring	210.000,00
	Jumlah	1.436.008.851,00

- 5) Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 155. Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin
karena Reklas TA 2022**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	378.109.733,00	Gedung dan Bangunan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38.781.251,00	Ektrakompatabel
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	334.688.492,00	Ektrakompatabel
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.510.000,00	Ektrakompatabel
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	69.289.000,00	Ektrakompatabel
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.700.000,00	Ektrakompatabel
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.224.000,00	Ektrakompatabel
8	Kecamatan Alian	258.500,00	Ektrakompatabel
	Jumlah	833.560.976,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.3.2 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022
 Rp1.664.430.735.238,00

31 Desember 2021
 Rp1.633.214.003.010,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 156. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.633.214.003.010,00	124.316.944.260,00	93.100.212.032,00	31.216.732.228,00	1.664.430.735.238,00

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari berikut.

Tabel 157. Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	26.208.685.494,00
2.	Belanja Modal BLUD	8.549.381.811,00
3.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	6.189.699.479,00
4.	Mutasi antar SKPD	69.115.141.461,00
5.	Perolehan dari Hibah	2.816.521.821,00
6.	Hasil inventarisasi	230.313.800,00
7.	Koreksi pencatatan	3.327.168.886,00
8.	Penambahan dari Reklas	7.880.031.508,00
	Jumlah	124.316.944.260,00

- 1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal disajikan sebagai berikut.

Tabel 158. Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal TA 2022

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.990.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.259.112.573,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.307.852.681,00
4	Dinas Pertanian dan Pangan	1.009.784.450,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	2.956.004.840,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	476.130.950,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.832.910.000,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.900.000,00
9	Kecamatan Kebumen	347.000.000,00
	JUMLAH	26.208.685.494,00

- 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD senilai Rp8.549.381.811,00 secara rinci disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 159. Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
dari Belanja Modal BLUD TA 2022**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Buayan	8.208.000,00
2	Puskesmas Puring	74.338.000,00
3	Puskesmas Klirong I	49.100.000,00
4	Puskesmas Bulus Pesantren II	15.300.000,00
5	Puskesmas Sruweng	95.774.000,00
6	Puskesmas Sempor I	196.381.000,00
7	Puskesmas Karanggayam I	69.830.000,00
8	Puskesmas Karanggayam II	26.000.000,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	2.205.156.311,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5.809.294.500,00
	JUMLAH	8.549.381.811,00

- 3) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

**Tabel 160. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa**

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.570.500,00
2	Bagian Umum	602.415.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.216.166.400,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	462.990.100,00
5	Puskesmas Petanahan	10.950.000,00
6	Puskesmas Mirit	33.046.254,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	599.935.225,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	524.354.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.300.000,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	45.337.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	74.992.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.500.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	139.289.000,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73.477.000,00
15	Kelurahan Panjatan	233.377.000,00
	Jumlah	6.189.699.479,00

- 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD senilai Rp69.115.141.461,00 disajikan dalam tabel **Lampiran 37**.
- 5) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan hibah disajikan pada SKPD sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 161. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah TA 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Puskesmas Karanggayam I	16.000.000,00	Hibah dari Perorangan
2	SMP Negeri 4 Kebumen	642.351.500,00	Hibah dari Komite Sekolah (BA No 900/010/2022)
3	SMP Negeri 1 Petanahan	307.608.000,00	Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/003/KOMITE/2022)
4	SMP Negeri 1 Sruweng	611.942.250,00	Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/149)
5	SMP Negeri 2 Adimulyo	344.250.000,00	Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/008/2022)
6	SMP Negeri 3 Gombong	621.881.071,00	Hibah dari Komite Sekolah
7	SMP Negeri 1 Ayah	80.000.000,00	Hibah dari Komite Sekolah (BA No 028/03/2022)
8	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	192.489.000,00	Hibah dari KPK (BA No BA-11/Ek.11/26/12/2022)
	Jumlah	2.816.521.821,00	

- 6) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp230.313.800,00 karena barang baru dicatat ada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 162. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Hasil Inventarisasi

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Puskesmas Mirit	98.181.800,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
2.	Puskesmas Karanggayam I	66.113.000,00	Bangunan Klinik/Puskesmas
3.	SD.N 2 Sadangkulon	66.019.000,00	Bangunan Gedung Perpustakaan
	Jumlah	230.313.800,00	

- 7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan adalah sebagai berikut.

Tabel 163. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Koreksi Pencatatan TA 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Puskesmas Petanahan	399.894.701,00	Koreksi penggabungan pencatatan
2.	Puskesmas Adimulyo	80.080.000,00	koreksi alih fungsi gedung
3.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	109.080.000,00	Koreksi penggabungan pencatatan (SMP 1 Adimulyo)
4.	Kelurahan Tamanwinangun	1.001.756.185,00	Koreksi rincian bidang gedung
5.	Kecamatan Poncowarno	1.736.358.000,00	Koreksi rincian bidang gedung
	Jumlah	3.327.168.886,00	

- 8) Sedangkan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 164. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
 Karena Penambahan dari Reklas TA 2022**

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	377.884.733,00	reklas dari peralatan dan mesin
2	Puskesmas Sempor I	390.758.000,00	reklas dari KDP
3	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	4.040.000,00	reklas dari ekstrakomptabel (SD 3 Donorojo Kecamatan Sempor)
4	Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan	375.029.000,00	reklas dari JIJ dan KDP
5	Dinas Perindustrian Perdagangan KUKM	39.789.000,00	reklas dari KDP
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.692.530.775,00	reklas dari JIJ
	JUMLAH	7.880.031.508,00	

Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 165. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kondisi Rusak Berat	8.953.142.461,00
2.	Mutasi antar SKPD	69.115.141.461,00
3.	Hibah	278.210.000,00
4.	Koreksi	7.420.235.151,00
5.	Reklas	7.333.482.959,00
	Jumlah	93.100.212.032,00

- 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Lain-lain atas barang kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 166. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
 Karena Diusulkan Hapus TA 2022**

No.	SKPD	Jumlah Barang (Unit)	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Alian	6	1.084.260.175,00
2	Puskesmas Kebumen III	1	46.965.000,00
3	Puskesmas Gombang I	1	1.024.800.000,00
4	Puskesmas Sadang	6	589.963.000,00
5	Dinas Pertanian dan Pangan	4	1.369.766.012,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	1.577.108.000,00
7	BPKPD (PPKD)	1	3.260.280.274,00
	Jumlah	27	8.953.142.461,00

- 2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.115.141.461,00 karena mutasi antar SKPD dijelaskan sebagaimana penambahannya dapat dilihat sebagaimana dalam **Lampiran 37**.
- 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena hibah berupa gedung Puskesmas Sruweng senilai Rp278.210.000,00 yang dihibahkan ke Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng dengan BAST Nomor 028/495.2 Tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 167 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
karena Koreksi Pencatatan TA 2022**

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Puskesmas Petanahan	399.894.701,00	Koreksi penggabungan pencatatan
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	4.282.226.265,00	Koreksi Eks Gedung Korwil (milik PGRI dan Koperasi Guru)
3	Kelurahan Tamanwinangun	1.001.756.185,00	Koreksi rincian per bidang gedung
4	Kecamatan Poncowarno	1.736.358.000,00	Koreksi rincian per bidang gedung
	Jumlah	7.420.235.151,00	

- 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 168. Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
karena Reklasifikasi TA 2022**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas Ke
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.990.000,00	Peralatan dan Mesin
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.291.500,00	Peralatan dan Mesin
3	Puskesmas Buayan	8.208.000,00	Barang Ekstrakomptabel
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	415.646.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
5	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5.809.294.500,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	308.251.950,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	687.101.100,00	Peralatan dan Mesin
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.900.000,00	Peralatan dan Mesin
9	Kelurahan Tamanwinangun	25.714.105,00	Peralatan dan Mesin
10	Kecamatan Poncowarno	41.085.804,00	Jalan Irigasi Jaringan (Jaringan Listrik)
	JUMLAH	7.333.482.959,00	

5.3.1.3.3 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022
Rp2.787.621.602.000,25

31 Desember 2021
Rp2.662.665.223.709,25

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 169. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022

Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.662.665.223.709,25	139.745.257.376,00	14.788.879.085,00	124.956.378.291,00	2.787.621.602.000,25

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari berikut.

Tabel 170. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal	126.398.806.275,00
2	Belanja BLUD	221.692.260,00
3	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	455.228.028,00
4	Mutasi dari Dinas Lain	1.106.024.000,00
5	Hibah	3.939.997.904,00
6	Hasil inventarisasi	5.753.844.185,00
7	Koreksi	1.621.884.855,00
8	Reklas	247.779.869,00
	Jumlah	139.745.257.376,00

- 1) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 171. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal TA 2022

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.905.067.678,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	11.906.433.300,00
3	Dinas Pertanian dan Pangan	24.809.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	533.700.297,00
5	Kecamatan Karanganyar	1.028.796.000,00
	JUMLAH	126.398.806.275,00

- 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD senilai Rp221.692.260,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 172. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal BLUD TA 2022

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Ambal I	9.392.260,00
2	Puskesmas Prembun	2.300.000,00
3	Puskesmas Karangsambung	40.000.000,00
4	Puskesmas Sadang	170.000.000,00
	JUMLAH	221.692.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 3) Penambahan nilai Aset Tetap karena Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp455.228.028,00 berupa pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan ada pada Kelurahan Jatiluhur senilai Rp121.854.000,00 dan Kelurahan Plarangan senilai Rp145.801.028,00.
- 4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 173. Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan
karena Mutasi antar SKPD TA 2022**

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	2.050.000,00	Mutasi regroup SD Kabekelan Prembun
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Kebumen	40.639.000,00	Jalan Menuju TPU Kebumen
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.063.335.000,00	Jalan Kompleks Perumahan RSS Jatimulyo Alian
Jumlah			1.106.024.000,00	

- 5) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari hibah senilai Rp3.939.997.904,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa sumur bor senilai Rp705.521.531,00 merupakan hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai BAST Nomor 363.BA/BN.07/SBG/2022, dan ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan berupa sarana prasarana jalan (PJU PLTS) senilai Rp3.234.476.373,00 sebagaimana BAST Nomor 030/0017144.
- 6) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena hasil inventarisasi senilai Rp5.753.844.185,00 secara rinci terdapat pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 174. Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan
karena Hasil Inventarisasi TA 2022**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kelurahan Tamanw inangun	34.912.131,00
2	Kelurahan Panjer	99.978.650,00
3	Kelurahan Kebumen	26.325.842,00
		103.222.053,00
		49.970.349,00
		75.939.930,00
		55.689.282,00
		109.516.638,00
		98.739.719,00
		42.586.045,00
4	Kelurahan Bumirejo	235.155.860,00
		280.129.005,00
		103.595.454,00
		471.509.193,00
		2.935.093.229,00
		49.865.588,00
		200.332.320,00
		304.000.000,00
5	Kelurahan Gombong	146.254.680,00
		100.790.000,00
		74.295.217,00
6	Kelurahan Wonokriyo	155.943.000,00
	Jumlah	5.753.844.185,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 7) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.621.884.855,00 berupa penggabungan nilai pada DI Tratas, DI Karangpucung, DI Jambreg.
- 8) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi terdapat pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 175. Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklas TA 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas dari
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206.694.065,00	Aset Tak Berwujud/ DED dan KDP
2	Kecamatan Poncowarno	41.085.804,00	Gedung dan Bangunan
	Jumlah	247.779.869,00	

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disebabkan sebagai berikut.

Tabel 176. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Mutasi antar SKPD	1.106.024.000,00
2.	Hibah	1.357.795.200,00
3.	Koreksi	4.163.763.705,00
4.	Reklas	8.161.296.180,00
	Jumlah	14.788.879.085,00

- 1) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.106.024.000,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. 173 Penambahan Karena Mutasi antar SKPD di atas.
- 2) Pengurangan Aset Tetap karena hibah senilai Rp1.357.795.200,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Pangan berupa tujuh bidang Jalan Khusus Lainnya yaitu Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang dihibahkan ke Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 177. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Hibah TA 2022

No	Nama Jalan	Penerima Hibah	Nilai (Rp)	Nomor BAST
1	Jalan Usaha Tani	Desa Sidobunder Puring	194.006.600,00	050/02/Distapang/BAST-APBD/2022
2	Jalan Usaha Tani	Desa Lemahduwur Kuwarasan	193.888.600,00	050/06/Distapang/BAST-APBD/2022
3	Jalan Usaha Tani	Desa Sidomulyo Petanahan	193.662.600,00	050/01/Distapang/BAST-APBD/2022
4	Jalan Usaha Tani	Desa Krakal Alian	194.188.600,00	050/05/Distapang/BAST-APBD/2022
5	Jalan Usaha Tani	Desa Jatijajar Ayah	194.018.600,00	050/07/Distapang/BAST-APBD/2022
6	Jalan Usaha Tani	Desa Adiluhur Adimulyo	193.956.600,00	050/03/Distapang/BAST-APBD/2022
7	Jalan Usaha Tani	Desa Ngasinan Bonorowo	194.073.600,00	050/04/Distapang/BAST-APBD/2022
	Jumlah		1.357.795.200,00	

- 3) Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi sebesar Rp4.163.763.705,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 178. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi TA 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.622.419.455,00	koreksi penggabungan
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11.021.250,00	tidak memenuhi kriteria aset tetap
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	2.207.994.000,00	tidak memenuhi kriteria aset tetap (pekerjaan di pemukiman kumuh wilayah Kecamatan Gombong dan Kebumen)
4	Kecamatan Karanggayam	322.329.000,00	tidak memenuhi kriteria aset tetap
JUMLAH		4.163.763.705,00	

- 4) Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp8.161.296.180,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel 179. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Reklas TA 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)	Reklas ke
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.101.644.145,00	Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya
2	Puskesmas Ambal I	9.392.260,00	Peralatan dan Mesin
3	Puskesmas Prembun	2.300.000,00	Peralatan dan Mesin
4	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	355.429.000,00	Gedung dan Bangunan
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.692.530.775,00	Gedung dan Bangunan
JUMLAH		8.161.296.180,00	

5.3.1.3.4 Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp143.266.418.481,00	Rp138.004.707.625,00

Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 180. Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya TA 2022

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
138.004.707.625,00	9.519.422.039,00	4.257.711.183,00	5.261.710.856,00	143.266.418.481,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 terdiri dari berikut ini.

Tabel 181. Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Modal	268.654.500,00
2.	Belanja Modal BOS/BLUD	7.114.033.659,00
3.	Mutasi antar SKPD	1.837.076.995,00
4.	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	550.000,00
5.	Reklas	299.106.885,00
	Jumlah	9.519.422.039,00

- 1) Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp268.654.500,00 berasal dari belanja modal SKPD berikut.

Tabel 182. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal TA 2022

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bagian Umum	4.999.500,00	Buku
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.875.000,00	Aplikasi
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.998.000,00	Aplikasi
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.300.000,00	Alat Musik
5	Dinas Tenaga Kerja	2.000.000,00	Buku
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	600.000,00	Buku
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.260.000,00	Buku
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	78.622.000,00	Buku
	Jumlah	268.654.500,00	

- 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan Belanja Modal BLUD disajikan sebagai berikut.

Tabel 183. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS/ BLUD TA 2022

No.	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	311.987.000,00	Aplikasi
2	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5.400.000,00	Buku
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.796.646.659,00	Belanja BOS
	JUMLAH	7.114.033.659,00	

- 3) Penambahan Aset Tetap Lainnya karena mutasi antar SKPD ada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 184. Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Mutasi antar SKPD TA 2022

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Bagian Umum	Bagian Hukum	4.999.500,00	
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.832.077.495,00	Regrup SD Negeri
	Jumlah		1.837.076.995,00	

- 4) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang Jasa menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berupa buku pada SMP Negeri 1 Puring senilai Rp550.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 5) Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanaman senilai Rp299.106.885,00 merupakan reklas dari belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 disebabkan oleh berikut ini.

Tabel 185. Pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kondisi Rusak Berat/Usul Hapus	892.871.748,00
2.	Mutasi antar SKPD	1.837.076.995,00
3.	Koreksi	1.035.733.840,00
4.	Reklas	492.028.600,00
	Jumlah	4.257.711.183,00

- 1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa barang kondisi rusak berat ada pada SKPD sebagai berikut.

**Tabel 186. Pengurangan Aset Tetap Lainnya
Karena Barang Rusak Berat/Diusulkan hapus TA 2022**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Mirit	350.000,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	889.671.748,00
3	Kelurahan Wonokriyo	2.850.000,00
	Jumlah	892.871.748,00

- 2) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.837.076.995,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 184 Penambahan Karena Mutasi antar SKPD di atas.
- 3) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena koreksi terletak pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 187. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Koreksi TA 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.875.000,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.023.793.840,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.065.000,00
	JUMLAH	1.035.733.840,00

- 4) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 188. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi TA 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.998.000,00	reklas ke Aset Tak Berwujud
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	311.987.000,00	reklas ke Aset Tak Berwujud
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.043.600,00	reklas ke Peralatan dan Mesin
	JUMLAH	492.028.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3.1.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2022

Rp8.911.032.658,00

31 Desember 2021

Rp4.355.619.173,00

Saldo KDP per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp8.911.032.658,00 secara rinci kami sajikan dalam tabel berikut

Tabel 189. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2022

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.497.166.147,00	DED dan <i>stackingout</i> tanah
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58.674.000,00	DED PKM Alian
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	415.646.000,00	Bangunan Ruang HD
4	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5.809.294.500,00	DED dan Bangunan Gedung
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	98.829.000,00	DED Tugu Batas Kota, DED IPAL
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	790.350.011,00	DED
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	241.073.000,00	DED
		8.911.032.658,00	

Bertambah dan berkurangnya KDP selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 190. Bertambah dan Berkurang Konstruksi dalam Pengerjaan TA 2022

Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31-Des-22 (Rp)
4.355.619.173,00	6.533.192.450,00	1.977.778.965,00	4.555.413.485,00	8.911.032.658,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2022 merupakan reklas yang ada pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 191. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Karena Reklasifikasi TA 2022

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	415.646.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5.809.294.500,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	308.251.950,00
	JUMLAH	6.533.192.450,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.977.778.965,00 merupakan pengurangan karena koreksi senilai Rp1.083.409.900,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 192. Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan karena Koreksi TA 2022

No	Jenis KDP	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	39.444.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2013
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	22.363.500,00	Sudah dilaksanakan tahun 2013
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	29.500.000,00	Sudah dilaksanakan pembangunan pagar dan DED sudah diserahkan ke Dinas PerkimLH)
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	49.534.000,00	DED sudah diserahkan ke Kantor Ketahanan Pangan
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	132.176.000,00	Sudah dilaksanakan secara bertahap (aset sudah tercatat di Dinas PerkimLH
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	14.780.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2016 (aset sudah tercatat di Kecamatan Prembun
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	49.500.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2016 (aset tercatat di Dinas Pertanian dan Peternakan
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	87.550.000,00	Sudah dilaksanakan dan Aset tercatat di Kecamatan Prembun)
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	87.550.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan aset sudah tercatat di Kecamatan Prembun
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	49.850.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan aset tercatat di Dinas PerkimLH
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	34.636.000,00	sudah dilaksanakan tahun 2013
12	Jalan Kabupaten Lain-lain	16.513.000,00	Sudah dilaksanakan bertahap tahun 2021
13	Jalan Kabupaten Lain-lain	54.800.000,00	Refocusing
14	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	49.452.000,00	Milik desa, hanya pembuatan DEDnya saja.
15	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	44.500.000,00	Milik desa, hanya pembuatan DEDnya saja.
16	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	9.901.800,00	Tidak dilaksanakan
17	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	34.256.000,00	Milik desa, hanya pembuatan DEDnya saja.
18	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	48.154.000,00	Refocusing
19	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa a Ir	69.476.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2021
20	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigas	32.600.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2020
21	Saluran Drainase	4.154.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2018
22	Saluran Drainase	29.784.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2020
23	Saluran Drainase	28.350.000,00	Sudah dilaksanakan tahun 2020
24	Saluran Pembawa a Air Baku Terbuka	34.732.000,00	Kewenangan Dinas LH, Perikanan dan Kelautan
25	Bangunan air kotor lainnya	9.951.200,00	Sudah dilaksanakan tahun 2017
26	Bangunan air kotor lainnya	9.951.200,00	Sudah dilaksanakan tahun 2017
27	Bangunan air kotor lainnya	9.951.200,00	Sudah dilaksanakan tahun 2017
Jumlah		1.083.409.900,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dan reklas senilai Rp894.369.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 193. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Karena Reklasifikasi TA 2022

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216.458.065,00	Reklas ke Aset Tetap
		227.764.000,00	Reklas ke Aset Lainnya
2	Puskesmas Sempor	390.758.000,00	Reklas ke Aset Tetap
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	19.600.000,00	Reklas ke Aset Tetap
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	39.789.000,00	Reklas ke Aset Tetap
	JUMLAH	894.369.065,00	

5.3.1.3.6 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp2.533.703.596.021,04)	(Rp2.240.830.838.853,54)

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 per jenis akun disajikan sebagai berikut.

Tabel 194. Nilai Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun TA 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	794.019.449.045,55		794.019.449.045,55
2.	Peralatan dan Mesin	1.093.674.209.974,00	(824.733.775.708,00)	268.940.434.266,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.662.610.283.638,00	(385.414.199.331,00)	1.277.196.084.307,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.788.268.018.117,25	(1.323.555.620.982,04)	1.464.712.397.135,21
5.	Aset Tetap Lainnya	142.967.311.596,00		142.967.311.596,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.911.032.658,00		8.911.032.658,00
	Jumlah	6.490.450.305.028,80	(2.533.703.596.021,04)	3.956.746.709.007,76

5.3.1.4 Dana Cadangan

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp15.000.000.000,00	Rp0,00

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka dibentuklah Dana Cadangan. Ketentuan Dana Cadangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024. Penyisihan atas penerimaan Daerah untuk Dana Cadangan dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu dua tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dengan rincian anggaran yang disisihkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pada Tahun 2022 telah dianggarkan belanja Dana Cadangan pada rekening Pengeluaran Pembiayaan dan telah dicairkan dengan SP2D Nomor 01789/LS-PEMBY/DAU/2022 tanggal 13 Desember 2022 senilai Rp15.000.000.000,00 yang tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1.008.01018.4. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat bunga jasa giro sebesar Rp9.246.576,00 yang diakui sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah, dan pada Tahun 2023 akan dipindahkan ke rekening dana cadangan.

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp141.213.492.244,00	Rp122.603.749.588,18

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan sebagai berikut.

Tabel 195. Aset Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Tagihan jangka Panjang	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	-	-
Aset Tidak berwujud	5.873.323.030,00	5.253.586.030,00	619.737.000,00	11,80
Aset Lain-lain	121.819.628.982,00	103.407.577.455,00	18.412.051.527,00	17,81
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.614.022.456,00)	(2.191.976.584,82)	(422.045.871,18)	19,25
Jumlah	141.213.492.244,00	122.603.749.588,18	18.609.742.655,82	15,18

Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2022 tidak menyajikan akumulasi penyusutan, sebagaimana ketentuan Point e Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019, bahwa Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang.

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp16.134.562.688,00	Rp16.134.562.688,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau *Built Operate Transfer (BOT)*. Aktiva lain-lain BOT adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2022 dan perinciannya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 196. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo	15.379.170.688,00
Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m ² , di Pasar Gombang Wonokriyo	755.392.000,00
Jumlah	16.134.562.688,00

Nilai BOT di atas merupakan nilai pembangunan pasar Wonokriyo Gombang pada Tahun 1995, sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP-SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Dalam pembangunan Pasar Wonokriyo Gombang, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805 m² senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombang. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun.

Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang dimitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00.

Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928 m² atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklas ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp5.873.323.030,00	Rp5.253.586.030,00

Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut

Tabel 197. Aset Tidak Berwujud TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
DED	1.511.168.000,00	1.375.216.000,00	135.952.000,00	9,00
Software	4.362.155.030,00	3.878.370.030,00	483.785.000,00	11,09
Jumlah Nilai Perolehan	5.873.323.030,00	5.253.586.030,00	619.737.000,00	10,55



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rincian aset tidak berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel 198. Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2022

No	OPD	Kajian (Rp)	Software (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bagian Hukum		80.473.300,00	80.473.300,00
2	Bagian Pembangunan		82.809.000,00	82.809.000,00
3	Bagian Organisasi		54.340.000,00	54.340.000,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		122.658.800,00	122.658.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.335.506.000,00	7.900.000,00	1.343.406.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		173.998.000,00	173.998.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	175.662.000,00	181.945.900,00	357.607.900,00
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		15.690.000,00	15.690.000,00
9	Puskesmas Petanahan		79.600.000,00	79.600.000,00
10	Puskesmas Karanggayam II		4.000.000,00	4.000.000,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman		1.713.943.000,00	1.713.943.000,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun		33.000.000,00	33.000.000,00
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		69.025.600,00	69.025.600,00
14	Dinas Tenaga Kerja		96.765.000,00	96.765.000,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		259.148.180,00	259.148.180,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		575.311.000,00	575.311.000,00
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		105.862.000,00	105.862.000,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		121.110.000,00	121.110.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		35.000.000,00	35.000.000,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika		350.317.150,00	350.317.150,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		194.258.100,00	194.258.100,00
22	Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH	1.511.168.000,00	4.362.155.030,00	5.873.323.030,00

Rincian *software* masing-masing SKPD sebagaimana **Lampiran 39**.

Bertambah dan berkurangnya Aset Tak Berwujud selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 199. Bertambah dan Berkurang Aset Tak Berwujud TA 2022

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Mutasi Bersih	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.253.586.030,00	661.647.000,00	41.910.000,00	619.737.000,00	5.873.323.030,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penambahan Aset Tak Berwujud selama tahun 2022 senilai Rp661.647.000,00 terdiri dari:

1. Penambahan Aset Tak Berwujud berasal dari belanja barang dan jasa berupa kajian ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan senilai Rp175.662.000,00.
2. Penambahan Aset Tak Berwujud berupa *software* aplikasi berasal dari reklas belanja aset tetap lainnya ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp173.998.000,00 dan pada RSUD dr. Soedirman senilai Rp311.987.000,00.

Pengurangan Aset Tak Berwujud selama Tahun 2022 senilai Rp41.910.000,00 terdiri dari Barang rusak berat berupa *software* ada pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp2.200.000,00 dan karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan senilai Rp39.710.000,00 direklas ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan (Jalan Kabupaten Ruas Jalan Puring-Pantai).

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp121.819.628.982,00	Rp103.407.577.455,00

Aset Lain-lain disajikan sebagai berikut:

Tabel 200. Aset Lainnya Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Aset Lainnya (tanah JJLS dan Jalan Desa)	94.959.021.958,00	99.329.551.387,00	(4.370.529.429,00)	(4,60)
Aset Lainnya DED	464.149.500,00	1.385.864.202,00	(921.714.702,00)	(198,58)
Aset Rusak Berat	26.396.457.524,00	25.068.003.050,00	1.328.454.474,00	5,03
Jumlah Nilai Perolehan	121.819.628.982,00	125.783.418.639,00	(3.963.789.657,00)	(3,25)

Bertambah dan berkurangnya Aset Lain-lain selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 201 Bertambah dan Berkurang Aset Lain-lain TA 2022

31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
125.783.418.639,00	18.189.743.307,00	22.153.532.964,00	(3.963.789.657,00)	121.819.628.982,00

Penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2022 senilai Rp18.189.743.307,00 terdiri dari

1. Penambahan barang rusak berat senilai Rp17.961.979.307,00 berada pada SKPD sebagaimana tabel pada **Lampiran 38**.
2. Penambahan Aset lain-lain karena reklas senilai Rp227.764.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa reklas dari KDP berupa DED yang tidak jadi dibangun.

Pengurangan Aset Lain-lain terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 202. Pengurangan Aset lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghapusan (terbit SK)	17.591.724.046,00
2.	Hibah	3.741.332.924,00
3.	Koreksi	726.575.994,00
4.	Reklas	93.900.000,00
	Jumlah	22.153.532.964,00

- 1) Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp17.591.724.046,00 merupakan aset rusak berat yang sudah terbit SK Penghapusan.
- 2) Pengurangan Aset Lain-lain karena hibah senilai Rp3.741.332.924,00 secara rinci ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa tanah jalan desa yang telah dihibahkan sebagaimana SK Hibah Nomor 028/322 Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 203. Pengurangan Aset Lain-lain karena Hibah TA 2022

No	Penerima Hibah	Nilai (Rp)
1	Desa Kembaran Kecamatan Kebumen	12.549.046,00
2	Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong	39.549.252,00
3	RT.02/RW.05 Desa Sruweng Kecamatan Sruweng	29.880.258,00
4	Dk.Paruk RT.01/04 Desa Glontor Kecamatan Karangasambung	31.563.898,00
5	Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam	10.895.388,00
6	Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele	69.612.000,00
7	Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen	12.500.453,00
8	Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren	52.535.132,00
9	Desa Wero Kecamatan Gombang	27.224.629,00
10	Desa Wero Kecamatan Gombang	26.089.480,00
11	Desa Mergosono Kecamatan Buayan	30.105.852,00
12	Desa Podoluhur Kecamatan Klirong	27.291.669,00
13	Dk. Pencil Desa Seboro Kecamatan Sadang	52.116.760,00
14	Desa Podourip Kecamatan Petanahan	37.124.925,00
15	Desa Mengkrowo Kecamatan Kebumen	27.308.808,00
16	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen	22.495.285,00
17	Desa Plumbon Kecamatan Karangasambung	35.257.877,00
18	Desa dalemwetan Kecamatan Puring	30.550.435,00
19	Desa Adikarso RT.02/Rw.04 Kecamatan Kebumen	9.950.399,00
20	Desa Prembun Kecamatan Prembun	51.847.086,00
21	Desa Givangretno Kecamatan Sruweng	26.954.452,00
22	Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren	45.107.500,00
23	Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun	111.214.050,00
24	Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun	123.173.250,00
25	Desa Seliling Kecamatan Alian	34.808.300,00
26	Desa Patemon Kecamatan Gombang	43.012.100,00
27	Desa Kedungwinangun, Wotbunono, Ranterejo, Kedungsari, Jerukagung (Jalan Lingkar Klirong)	1.210.702.740,00
28	Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal	138.637.100,00
29	Desa Entak Kecamatan Ambal	139.720.000,00
30	Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar	139.873.300,00
31	Dk.Jagalan Rw.007 Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun	138.519.500,00
32	Dk.Kalitapan Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun	139.650.000,00
33	Desa Sрати Kecamatan Ayah	186.385.500,00
34	Desa Sidodadi Kecamatan Puring	102.270.000,00
35	Desa Soka Kecamatan Poncowarno	122.694.600,00
36	Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno	122.998.400,00
37	Desa Widoro Kecamatan Karangasambung	138.733.000,00
38	Desa Wiromartan Kecamatan Mirit	140.430.500,00
	Jumlah	3.741.332.924,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 3) Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi senilai Rp726.575.994,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp629.196.505,00 karena pencatatan ganda dengan ruas jalan Giyanti-Sempor, Puskesmas Adimulyo senilai Rp80.080.000,00 karena koreksi alih fungsi bangunan rumah dinas, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp17.299.489,00 karena koreksi aset lain-lain berupa barang rusak berat.
- 4) Pengurangan karena reklas Aset Lain-lain senilai Rp93.900.000,00 terdiri dari reklas pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) senilai Rp3.900.000,00 berupa sepeda motor yang direklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan pada Puskesmas Buayan berupa Ambulan rusak berat yang direklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp90.000.000,00.

Aset Lain-lain per SKPD disajikan sebagaimana **Lampiran 39** yang terdiri dari:

1. Aset lainnya berupa tanah jalan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Desa senilai Rp94.959.021.958,00.
2. Aset lainnya berupa DED (*Detail Engineering Design*) senilai Rp1.385.864.202,00 terdiri dari:
 - a) DED jembatan jalan desa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp61.473.000,00.
 - b) DED desa wisata Seboro, Karangsambung, Desa Pasir, Desa Tirtomoyo pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata senilai Rp83.526.000,00.
 - c) DED GOR Desa Ambalresmi, Jembatan Ambalkliwonan, Gedung Mapolres Kebumen, Jaringan Irigasi pedesaan, Jalan Desa Gemeksekti, dan DED perbaikan tebing tanggul sungai serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp319.150.500,00.
3. Barang Rusak Berat yang telah dihentikan penggunaannya oleh SKPD namun belum dihapuskan dari daftar Barang Inventaris senilai Rp26.396.457.524,00.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp2.614.022.456,00)	(Rp2.191.976.584,82)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud masing-masing SKPD disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 204. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Bagian Hukum	80.473.300,00	(56.331.310,00)	24.141.990,00
2	Bagian Pembangunan	82.809.000,00	(74.528.100,00)	8.280.900,00
3	Bagian Organisasi	54.340.000,00	(38.038.000,00)	16.302.000,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	122.658.800,00	(61.329.400,00)	61.329.400,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.343.406.000,00	(379.362.200,00)	964.043.800,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.998.000,00	(17.399.800,00)	156.598.200,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	357.607.900,00	(108.539.150,00)	249.068.750,00
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.690.000,00	(4.188.000,00)	11.502.000,00
9	Puskesmas Petanahan	79.600.000,00	(15.920.000,00)	63.680.000,00
10	Puskesmas Karanggayam II	4.000.000,00	(1.600.000,00)	2.400.000,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	1.713.943.000,00	(783.262.100,00)	930.680.900,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	33.000.000,00	(13.200.000,00)	19.800.000,00
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	69.025.600,00	(29.809.380,00)	39.216.220,00
14	Dinas Tenaga Kerja	96.765.000,00	(51.578.500,00)	45.186.500,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	259.148.180,00	(162.704.326,00)	96.443.854,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	575.311.000,00	(314.743.000,00)	260.568.000,00
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	105.862.000,00	(69.588.000,00)	36.274.000,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	121.110.000,00	(79.827.000,00)	41.283.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.000.000,00	(28.000.000,00)	7.000.000,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.317.150,00	(235.229.650,00)	115.087.500,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	194.258.100,00	(86.344.540,00)	107.913.560,00
22	Kecamatan Kutowinangun	5.000.000,00	(2.500.000,00)	2.500.000,00
		5.873.323.030,00	(2.614.022.456,00)	3.259.300.574,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2022

Rp36.584.708.422,94

31 Desember 2021

Rp63.997.463.892,83

Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 205. Rincian Kewajiban TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kewajiban Jangka Pendek	36.584.708.422,94	63.997.463.892,83	(27.412.755.469,89)	(42,83)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	36.584.708.422,94	63.997.463.892,83	(27.412.755.469,89)	(42,83)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2022

Rp36.584.708.422,94

31 Desember 2021

Rp63.997.463.892,83

Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 206. Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 dan TA 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	9.326.302,00	0,00	9.326.302,00	100,00
Pendapatan diterima Dimuka	1.109.331.028,94	917.294.717,83	192.036.311,11	20,94
Utang Belanja	35.466.051.092,00	63.080.169.175,00	(27.614.118.083,00)	(43,78)
Jumlah	36.584.708.422,94	63.997.463.892,83	(27.412.755.469,89)	(42,83)

Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 sebesar Rp36.584.708.422,94 dibandingkan TA 2021 yang senilai Rp63.997.463.892,83 mengalami penurunan sebesar 42,83%,

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2022

Rp9.326.302,00

31 Desember 2021

Rp00,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.326.302,00 merupakan keterlambatan penyetoran pajak atas belanja dana BOS. Utang Perhitungan Pihak Ketiga per sekolah dirinci pada **Lampiran 41**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2022

Rp1.109.331.028,94

31 Desember 2021

Rp917.294.717,83

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2022 diterima SKPD sebagai berikut:

Tabel 207. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD TA 2022

No.	SKPD	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	
		2022	2021
1.	RSUD dr. Soedirman	90.416.666,67	134.200.000,00
2.	Bagian Umum Setda Kebumen	31.123.800,00	45.921.600,00
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	643.295.044,02	353.470.656,83
4.	Kecamatan Kebumen	62.989.480,75	91.316.686,00
5.	Kecamatan Karanganyar	191.630.037,50	188.232.650,00
6.	Kecamatan Gombong	89.876.000,00	104.153.125,00
	Jumlah	1.109.331.028,94	917.294.717,83

1. Pendapatan diterima dimuka pada RSUD dr. Soedirman merupakan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 208. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD dr. Soedirman TA 2022

No	Nom or Perjanjian	Nama Subyek Perjanjian	Nilai Perjanjian (Rp)	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Jumlah Pendapatan diterima dimuka (Rp)
1	026/MSD/ADD-RSUDDSK/XII/2015	PT MAC SARANA DJAYA	275.000.000,00	1 April 2015 - 1 April 2025	120	27	61.875.000,00
2	445/0459a/PKS/XII/2019	STIKES MADANI YOGYAKARTA	5.000.000,00	23 Desember 2019 - 22 Desember 2024	60	24	2.000.000,00
3	001/KSO/B/AK. Alkahfi/III/2020	AKADEMI KOMUNITAS AL KAHFI	750.000,00	11 Maret 2020 - 10 Maret 2023	36	2	41.666,67
4	007/B/MoU/UAA/II/2020	UNIVERSITAS ALMA ATA	7.500.000,00	21 Februari 2020 - 20 Februari 2025	60	26	3.250.000,00
5	KBM/SEWA/003	BNI CABANG KEBUMEN	50.000.000,00	1 April 2020 - 31 Maret 2025	60	27	22.500.000,00
6	445/2181/PKS/V/2021	AKPER PURWOREJO	750.000,00	2021 - 2023	36	12	250.000,00
7	445/3187/PKS/IX/2020	STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA	1.500.000,00	2021 - 2023	36	12	500.000,00
	Jumlah		340.500.000,00				90.416.666,67



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

2. Pendapatan diterima dimuka pada Bagian Umum Setda Kebumen berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 209. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bag.Umum Setda Kebumen TA 2022

No	Nomor Perjanjian	Nama Subyek Perjanjian	Nilai Perjanjian (Rp)	Jangka Waktu	Masa Manfaat (bulan)	Sisa Masa Manfaat (bulan)	Jumlah Pendapatan diterima dimuka (Rp)
1	030/1556 - 49/A.02/Org/XI/2022	Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen	4.428.000,00	16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023	12	8	2.952.000,00
2	030/1556.1 - 49/A.02/ORG/XI/2022	Ketua Koperasi Sumber Agung (SAGU) Kebumen	5.940.000,00	16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023	12	8	3.960.000,00
3	030/1556.2 - B.51.1/Set/DWP. K.KBM/IX/2022	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab Kebumen	5.184.000,00	16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023	12	8	3.456.000,00
4	030/1556.3 - B.06.1/Set/DWP. Setda/IX/2022	Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Kebumen	3.780.000,00	16 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023	12	8	2.520.000,00
5	030/1470	PT.Bank Jateng Cabang Kebumen	32.670.000,00	1 Juli 2018 s/d 31 Juni 2023	60	6	3.267.000,00
6	030/1192.1	PT.Bank Jateng Cabang Kebumen	33.264.000,00	1 April 2020 s/d 31 Mei 2025	60	27	14.968.800,00
	JUMLAH		85.266.000,00				31.123.800,00

3. Pendapatan diterima dimuka pada BPKPD Kabupaten Kebumen berasal dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa dan Pajak reklame. Pendapatan diterima dimuka atas pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa Tahun 2022 sebesar Rp240.385.484,17, secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 42**. Sedangkan rincian pendapatan diterima dimuka pajak reklame dirinci sebagai berikut.

Tabel 210. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Pajak Reklame TA 2022

No	URAIAN	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	Pajak Reklame Permanen	353.515.724,50
2	Pajak Reklame Non Permanen	49.393.835,35
	JUMLAH	402.909.559,85

Rincian pajak reklame permanen dan pajak reklame non permanen dijelaskan pada **Lampiran 43**.

4. Pendapatan diterima dimuka pada kecamatan berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan yaitu Kecamatan Kebumen sebesar Rp62.989.480,75, Kecamatan Karanganyar sebesar Rp191.630.037,50 dan Kecamatan Gombong sebesar Rp89.876.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 44**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2021

5.3.2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2022
Rp35.466.051.092,00

31 Desember 2021
Rp63.080.169.175,00

Utang Belanja merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum ditunaikan oleh SKPD, yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 211. Rincian Utang Belanja TA 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Pegawai	10.274.076.900,00	8.940.199.079,00	1.333.877.821,00	14,92
Utang Belanja Barang dan Jasa	25.191.974.192,00	54.139.970.096,00	(28.947.995.904,00)	(53,47)
Jumlah	35.466.051.092,00	63.080.169.175,00	(27.614.118.083,00)	(43,78)

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 merupakan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan. Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor/jasa lainnya pada SKPD yang belum dibayarkan, serta jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas & RSUD sampai dengan 31 Desember 2022. Tabel Rincian Utang Belanja per SKPD dijelaskan pada **Lampiran 45**.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3.3.1 Ekuitas

31 Desember 2022
Rp4.592.239.658.445,71

31 Desember 2021
Rp4.614.349.431.228,11

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.592.239.658.445,71 berkurang sebesar Rp22.109.772.782,40 atau 0,48% dari nilai Ekuitas TA 2021 yang sebesar Rp4.614.349.431.228,11.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun dengan basis akrual, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah.

5.4.1 Pendapatan-LO

TA 2022	TA 2021
Rp2.325.032.220.885,83	Rp2.464.784.578.786,17

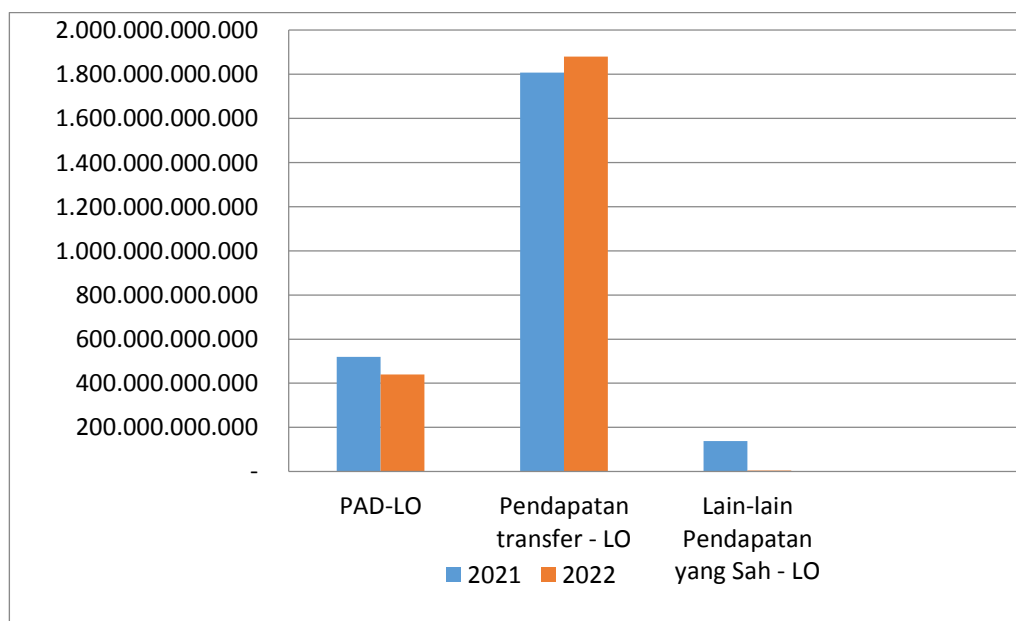
Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 212. Rincian Pendapatan-LO per Jenis TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	439.947.986.564,83	519.971.168.999,17	(80.023.182.434,34)	(15,39)
Pendapatan Transfer - LO	1.879.833.663.558,00	1.807.428.442.052,00	72.405.221.506,00	4,01
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	5.250.570.763,00	137.384.967.735,00	(132.134.396.972,00)	(96,18)
Jumlah	2.325.032.220.885,83	2.464.784.578.786,17	(139.752.357.900,34)	(5,67)

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan-LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp139.752.357.900,34 atau sebesar 5,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Pendapatan-LO Kabupaten Kebumen sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

Grafik 2. Komposisi Pendapatan-LO TA 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.1.1 PAD-LO

TA 2022	TA 2021
Rp439.947.986.564,83	Rp519.971.168.999,17

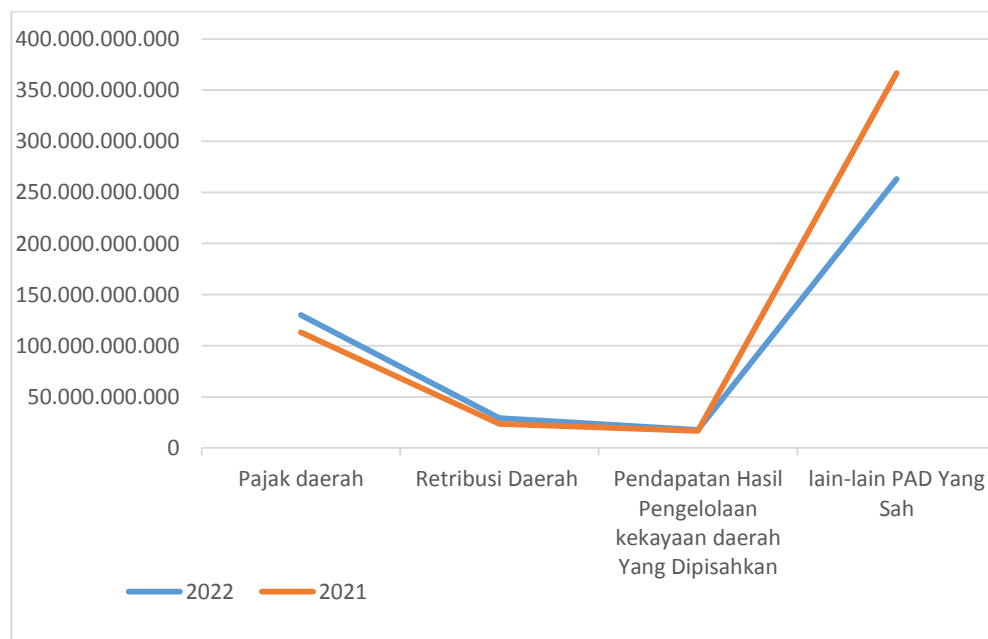
Saldo PAD-LO TA 2022 sebesar Rp439.947.986.564,83 sedangkan Saldo PAD TA 2021 sebesar Rp519.971.168.999,17 atau mengalami penurunan sebesar 14,56%.

Tabel 213. Rincian PAD-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Pajak Daerah - LO	129.947.088.731,15	113.104.675.786,00	16.842.412.945,15	14,89
Retribusi Daerah - LO	29.168.471.204,41	23.670.320.904,17	5.498.150.300,24	23,23
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO	17.640.585.052,00	16.552.860.815,00	1.087.724.237,00	6,57
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	263.191.841.577,27	366.643.311.494,00	(103.451.469.916,73)	(28,22)
Jumlah	439.947.986.564,83	519.971.168.999,17	(80.023.182.434,34)	(15,39)

Perbandingan per jenis PAD-LO dari tahun sebelumnya tergambar pada grafik berikut:

Grafik 3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

TA 2022	TA 2021
Rp129.947.088.731,15	Rp113.104.675.786,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 214. Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel-LO	2.460.004.956,00	1.466.544.162,00	993.460.794,00	67,74
Pajak Restoran-LO	11.176.837.800,00	8.507.751.486,00	2.669.086.314,00	31,37
Pajak Hiburan-LO	545.284.159,00	293.001.222,00	252.282.937,00	86,10
Pajak Reklame-LO	1.599.115.143,15	1.586.495.895,00	12.619.248,15	0,80
Pajak Penerangan Jalan-LO	39.261.189.956,00	31.323.888.090,00	7.937.301.866,00	25,34
Pajak Parkir-LO	635.175.253,00	405.336.131,00	229.839.122,00	56,70
Pajak Air Tanah-LO	454.150.360,00	369.024.300,00	85.126.060,00	23,07
Pajak Sarang Burung Walet-LO	5.100.000,00	5.500.000,00	(400.000,00)	(7,27)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	715.667.750,00	1.131.544.726,00	(415.876.976,00)	(36,75)
PBBP2-LO	57.110.930.395,00	49.675.793.360,00	7.435.137.035,00	14,97
BPHTB-LO	15.983.632.959,00	18.339.796.414,00	(2.356.163.455,00)	(12,85)
Jumlah	129.947.088.731,15	113.104.675.786,00	16.842.412.945,15	14,89

Pendapatan Pajak-LO dikelola oleh BPKPD, yang untuk tahun 2022 naik sebesar Rp16.842.412.945,15 atau sebesar 14,89% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan nilai LO dan LRA adalah sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp129.947.088.731,15 sedangkan saldo Pendapatan Pajak LRA TA 2021 sebesar Rp129.843.875.322,00 Selisih saldo Pendapatan Pajak LRA dan saldo Pendapatan Pajak-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 215. Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA TA 2022 dan TA 2021

Pajak Hotel-LO	2.460.004.956,00	2.455.684.956,00	4.320.000,00
Pajak Restoran-LO	11.176.837.800,00	11.159.401.535,00	17.436.265,00
Pajak Hiburan-LO	545.284.159,00	543.034.159,00	2.250.000,00
Pajak Reklame-LO	1.599.115.143,15	2.001.768.503,00	(402.653.359,85)
Pajak Penerangan Jalan-LO	39.261.189.956,00	39.261.189.956,00	-
Pajak Parkir-LO	635.175.253,00	631.035.253,00	4.140.000,00
Pajak Air Tanah-LO	454.150.360,00	451.312.560,00	2.837.800,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	5.100.000,00	5.100.000,00	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	715.667.750,00	702.807.750,00	12.860.000,00
PBBP2-LO	57.110.930.395,00	56.649.407.691,00	461.522.704,00
BPHTB-LO	15.983.632.959,00	15.983.132.959,00	500.000,00
Jumlah	129.947.088.731,15	129.843.875.322,00	103.213.409,15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Selisih sebesar Rp103.213.409,15 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak hotel selisih sebesar Rp4.320.000,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak hotel per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.790.000,00 dan saldo piutang pajak hotel 31 Desember 2021 sebesar Rp470.000,00.
2. Pajak Restoran selisih sebesar Rp17.436.265,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak restoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.837.993,00 dan saldo piutang pajak restoran 31 Desember 2021 sebesar Rp10.401.728,00.
3. Pajak Hiburan selisih sebesar Rp2.250.000,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak hiburan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.400.000,00 dan saldo piutang pajak hiburan hotel 31 Desember 2021 sebesar Rp150.000,00.
4. Pajak reklame selisih sebesar Rp402.653.359,85 merupakan selisih saldo Piutang Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.236.750,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp45.980.550,00 dikurangi Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp402.909.559,85.
5. Pajak Parkir selisih sebesar Rp4.140.000,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.790.000,00 dan saldo piutang pajak parkir 31 Desember 2021 sebesar Rp650.000,00.
6. Pajak air tanah selisih sebesar Rp2.837.800,00 merupakan selisih saldo Piutang pajak air tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.533.100,00 dan saldo piutang pajak air tanah 31 Desember 2021 sebesar Rp7.695.300,00.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selisih sebesar Rp12.860.000,00 merupakan selisih saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.860.000,00 dan saldo piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
8. PBB-P2 selisih sebesar Rp461.522.704,00 merupakan selisih saldo Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.870.564.684,00 dan saldo piutang Pajak PBBP2 31 Desember 2021 sebesar Rp7.409.041.980,00.
9. BPHTB selisih sebesar Rp500.000,00 merupakan selisih saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp500.000,00 dan saldo piutang Pajak BPHTB 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

TA 2022	TA 2021
<u>Rp29.168.471.204,41</u>	<u>Rp23.670.320.904,17</u>

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp29.168.471.204,41 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 216. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.305.252.800,00	1.500.485.137,00	(195.232.337,00)	(13,01)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.363.595.100,00	1.217.025.100,00	146.570.000,00	12,04
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.259.225.000,00	599.618.000,00	659.607.000,00	110,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	6.612.857.639,00	6.633.334.600,00	(20.476.961,00)	(0,31)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	621.044.000,00	624.970.000,00	(3.926.000,00)	(0,63)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang-LO	117.611.500,00	108.471.500,00	9.140.000,00	8,43
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	85.128.000,00	69.468.000,00	15.660.000,00	22,54
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.808.616.000,00	545.592.000,00	1.263.024.000,00	231,50
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.903.130.772,41	3.380.341.226,17	522.789.546,24	15,47
Retribusi Tempat Pelelangan-LO	893.216.161,00	1.738.334.141,00	(845.117.980,00)	(48,62)
Retribusi Terminal-LO	97.994.200,00	67.417.800,00	30.576.400,00	45,35
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	4.183.632.300,00	3.489.110.000,00	694.522.300,00	19,91
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa-LO	26.740.000,00	51.940.000,00	(25.200.000,00)	(48,52)
Retribusi Rumah Potong Hew an-LO	25.950.000,00	17.807.500,00	8.142.500,00	45,73
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	4.973.498.300,00	2.528.493.500,00	2.445.004.800,00	96,70
Retribusi PBG-LO	1.863.794.432,00	1.083.972.400,00	779.822.032,00	71,94
Retribusi Izin Trayek-LO	27.185.000,00	13.940.000,00	13.245.000,00	95,01
Jumlah	29.168.471.204,41	23.670.320.904,17	5.498.150.300,24	23,23

Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO tahun sebelumnya sebesar Rp5.498.150.300,24 atau 23,23%. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 217. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 per SKPD

No.	OPD	TA 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	115.435.400,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.305.252.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.516.194.432,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2.327.999.450,00
5	Dinas Pertanian dan Pangan	117.283.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan	2.070.635.911,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	247.158.692,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11.286.958.939,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Stau Pintu	1.808.616.000,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.664.696.104,00
11	Dinas Tenaga Kerja	85.128.000,00
12	Sekretariat Daerah	64.849.800,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	720.497.372,66
14	Kecamatan Prembun	2.000.000,00
15	Kecamatan Kutow inangun	1.000.000,00
16	Kecamatan Kebumen	165.276.236,25
17	Kecamatan Sempor	1.080.000,00
18	Kecamatan Gombong	253.857.125,00
19	Kecamatan Karanganayar	414.551.942,50
Jumlah		29.168.471.204,41

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA adalah sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp29.168.471.204,41 sedangkan saldo Pendapatan Retribusi LRA TA 2022 sebesar Rp28.375.110.419,00. Selisih saldo Pendapatan Retribusi LRA dan saldo Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 218. Rincian Pendapatan Retribusi dan Penjelasan Nilai LO dan LRA

Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.305.252.800,00	1.305.252.800,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.363.595.100,00	1.363.595.100,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.259.225.000,00	1.259.225.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	6.612.857.639,00	6.182.853.889,00	430.003.750,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	621.044.000,00	621.044.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang-LO	117.611.500,00	117.611.500,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	85.128.000,00	85.128.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.808.616.000,00	1.808.616.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.903.130.772,41	3.715.634.737,00	187.496.035,41
Retribusi Tempat Pelelangan-LO	893.216.161,00	893.216.161,00	0,00
Retribusi Terminal-LO	97.994.200,00	97.994.200,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	4.183.632.300,00	4.183.632.300,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa-LO	26.740.000,00	26.740.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	4.973.498.300,00	4.973.498.300,00	0,00
Retribusi PBG-LO	1.863.794.432,00	1.687.933.432,00	175.861.000,00
Retribusi Izin Trayek-LO	27.185.000,00	27.185.000,00	0,00
Jumlah	29.168.471.204,41	28.375.110.419,00	793.360.785,41

Selisih sebesar Rp793.360.785,41 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Pasar selisih Rp430.003.750,00 merupakan selisih saldo Piutang Retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.083.826.850,00 dan saldo piutang retribusi pelayanan pasar 31 Desember 2021 sebesar Rp653.823.100,00.
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selisih Rp187.496.035,41 merupakan selisih saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.747.602.550,00 dan saldo piutang 31 Desember 2021 sebesar Rp1.727.196.430,00 serta selisih antara Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp616.004.802,42 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp783.094.717,83.
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) selisih Rp175.861.000,00 merupakan selisih saldo piutang PBG 31 Desember 2022 sebesar Rp175.861.000,00 dan saldo piutang PBG per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

TA 2022	TA 2021
Rp17.640.585.052,00	Rp16.552.860.815,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp17.640.585.052,00 yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 219. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD-LO	17.640.585.052,00	16.552.860.815,00	1.087.724.237,00	6,57
Jumlah	17.640.585.052,00	16.552.860.815,00	1.087.724.237,00	6,57

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut:

Tabel 220. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bank Jateng	10.332.638.637,00
2	PD. BPR BKK Kebumen	3.602.748.954,00
3	PD BPR Bank Kebumen	1.488.038.292,00
4	PDAM	2.026.822.323,00
5	PD Apotik Lukulo	190.336.846,00
	JUMLAH	17.640.585.052,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 221. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Penjelasan Nilai LO dan LRA

Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17.640.585.052,00	17.640.585.052,00	-
Jumlah	17.640.585.052,00	17.640.585.052,00	-

Pengesahan RUPS/RUPM pembagian laba tahun 2021 baru dilakukan pada tahun 2022 sehingga tidak ada pencatatan piutang Deviden pada akhir tahun 2021. Sementara pengesahan RUPS/RUPM pembagian laba tahun 2022 belum disahkan s.d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diotorisasi untuk terbit. Oleh karena itu, saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 pada LO bernilai sama dengan LRA.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

TA 2022	TA 2021
Rp263.191.841.577,27	Rp366.643.311.494,00

Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp263.191.841.577,27 terdiri dari berikut.

Tabel 222. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LO TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		125.350.000,00	(125.350.000,00)	(100,00)
Hasil Kerjasama Daerah	11.204.594,00	27.915.525,00	(16.710.931,00)	(59,86)
Penerimaan Jasa Giro	2.205.784.880,00	2.525.596.113,00	(319.811.233,00)	(12,66)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	41.875.000,00	461.625.606,00	(419.750.606,00)	(90,93)
Pendapatan Bunga	9.845.890.393,00	10.048.808.180,00	(202.917.787,00)	(2,02)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	101.398.261,00	(101.398.261,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak	188.643.433,94	762.577.548,00	(573.934.114,06)	(75,26)
Pendapatan Denda Retribusi	372.197.893,00	19.375.800,00	352.822.093,00	1.820,94
Pendapatan dari Pengembalian	302.104.274,00	439.796.371,00	(137.692.097,00)	(31,31)
Pendapatan BLUD	248.909.893.495,33	342.699.781.283,00	(93.789.887.787,67)	(27,37)
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	978.602.614,00	9.055.846.807,00	(8.077.244.193,00)	(89,19)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	335.645.000,00	375.240.000,00	(39.595.000,00)	(10,55)
Jumlah	263.191.841.577,27	366.643.311.494,00	(103.451.469.916,73)	(28,22)

Pendapatan BLUD-LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK-BLUD. Rincian pendapatan BLUD per entitas dijelaskan pada **Lampiran 44**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut
 Saldo Pendapatan Lain lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp263.191.841.577,27 sedangkan saldo Pendapatan Pendapatan Lain lain PAD yang Sah LRA TA 2021 sebesar Rp336.486.804.682,00. Selisih saldo Pendapatan Retribusi LRA dan saldo Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 223. Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dan Penjelasan Nilai LO dan LRA

Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan		1.829.716.362,00	(1.829.716.362,00)
Hasil Kerjasama Daerah	11.204.594,00	11.204.594,00	-
Penerimaan Jasa Giro-LO	2.205.784.880,00	2.205.784.880,00	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	41.875.000,00	42.750.000,00	(875.000,00)
Pendapatan Bunga-LO	9.845.890.393,00	9.845.890.393,00	-
Pendapatan Denda Pajak-LO	188.643.433,94	231.123.774,00	(42.480.340,06)
Pendapatan Denda Retribusi-LO	372.197.893,00	372.197.893,00	-
Pendapatan dari Pengembalian-LO	302.104.274,00	302.104.274,00	-
Pendapatan BLUD-LO	248.909.893.495,33	320.331.784.898,00	(71.421.891.402,67)
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	978.602.614,00	978.602.614,00	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	335.645.000,00	335.645.000,00	-
Jumlah	263.191.841.577,27	336.486.804.682,00	(71.465.246.742,73)

Selisih sebesar Rp71.465.246.742,73 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan selisih Rp1.829.716.362,00 merupakan Jurnal reklas penjualan hasil penghapusan peralatan mesin alat angkutan Tahun 2022 sebesar Rp1.521.719.362,00. Jurnal reklas penjualan hasil penghapusan penjualan bangunan gedung Tahun 2022 sebesar Rp249.797.000,00 dan Jurnal reklas reklas penjualan hasil penghapusan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan Tahun 2022 sebesar Rp58.200.000,00.
2. Hasil pengelolaan dana bergulir selisih Rp875.000,00 merupakan selisih saldo piutang dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp624.230.401,00 dan saldo piutang dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp625.105.401,00. Selisih tersebut merupakan pelunasan atas piutang dana bergulir pada tahun 2021 sebesar Rp875.000,00 namun baru diakui pada tahun 2022.
3. Pendapatan Denda Pajak selisih sebesar Rp42.480.340,06 merupakan selisih saldo Piutang denda pajak per 31 Desember 2022 sebesar 2.665.717.308,94 dan saldo piutang denda pajak 31 Desember 2021 sebesar Rp2.708.197.649,00. Selisih tersebut pada tahun 2022 telah terdapat pembayaran atas piutang denda pajak.
4. Pendapatan BLUD selisih Rp71.421.891.402,67 merupakan selisih saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.100.700.227,00 dan saldo piutang BLUD 31 Desember 2021 sebesar Rp88.566.374.963,00 serta selisih pendapatan diterima di muka 2022 sebesar Rp90.416.666,67 dan pendapatan diterima di muka 2021 sebesar Rp134.200.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

TA 2022	TA 2021
Rp1.879.833.663.558,00	Rp1.807.428.442.052,00

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.879.833.663.558,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 224. Pendapatan Transfer-LO TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.674.759.689.978,00	1.607.599.153.080,00	67.160.536.898,00	4,18
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	46.433.860.000,00	(46.433.860.000,00)	(100,00)
Transfer Pemerintah Provinsi	205.073.973.580,00	153.395.428.972,00	51.678.544.608,00	33,69
Jumlah	1.879.833.663.558,00	1.807.428.442.052,00	72.405.221.506,00	4,01

Dari tabel diatas dapat diketahui Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 naik sebesar Rp72.405.221.506,00 atau sebesar 4,01% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain pendapatan Transfer-LO tersebut di atas, terbitnya PMK No 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Melalui Fasilitas *TDF*, dimana *TDF* merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penyaluran dana DBH-LO pada rekening *TDF* sebagaimana diinformasikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Februari 2023 Nomor S-802/WPB.14/2023 hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *TDF* ke Daerah (*TDF*-TKD) Tahun 2022, bahwa pada Bulan Desember 2022 telah disalurkan DBH-LO melalui Rekening *TDF* pada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui Nomor Rekening 519000345980 dengan nama rekening Rek Lain BI *TDF*-TKD Kab Kebumen. Adapun nilai Saldo Pokok per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.228.271.591,00 dan Remunerasi bulan Desember 2022 sebesar Rp1.025.484,44. Terhadap pendapatan transfer DBH-LO tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum melakukan pencatatan pada *onface* LKPD Kabupaten Kebumen karena belum ada peraturan yang memuat tentang BAS terkait dana *TDF*-TKD.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

TA 2022	TA 2021
Rp1.674.759.689.978,00	Rp1.607.599.153.080,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.674.759.689.978,00 disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 225. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil	38.220.093.261,00	41.397.337.217,00	(3.177.243.956,00)	(7,67)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.176.172.068.800,00	1.179.288.910.000,00	(3.116.841.200,00)	(0,26)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	460.367.527.917,00	386.912.905.863,00	73.454.622.054,00	18,98
Jumlah	1.674.759.689.978,00	1.607.599.153.080,00	67.160.536.898,00	4,18

Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2022 sebesar Rp38.220.093.261,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 226. Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
DBH PBB - LO	7.280.169.217,00	11.321.276.739,00	(4.041.107.522,00)	(35,69)
DBH PPh Pasal 21-LO	15.598.200.774,00	16.423.637.908,00	(825.437.134,00)	-
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	-	2.612.765.190,00	(2.612.765.190,00)	(100,00)
DBH CHT-LO	11.006.705.380,00	8.650.954.298,00	2.355.751.082,00	27,23
DBH SDA Minyak Bumi-LO	1.630.978.982,00	213.027.500,00	1.417.951.482,00	665,62
DBH SDA Gas Bumi-LO	-	62.242.900,00	(62.242.900,00)	(100,00)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	265.591.359,00	108.913.482,00	156.677.877,00	143,86
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	-	4.701.350,00	(4.701.350,00)	(100,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	2.629.718,00	2.168.975,00	460.743,00	21,24
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	477.506.831,00	640.029.725,00	(162.522.894,00)	(25,39)
DBH SDA Perikanan-LO	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00	44,25
Jumlah	38.220.093.261,00	41.397.337.217,00	(3.177.243.956,00)	(7,67)

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.176.172.068.800,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 227. Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Alokasi Umum	1.176.172.068.800,00	1.179.288.910.000,00	(3.116.841.200,00)	(0,26)
Jumlah	1.176.172.068.800,00	1.179.288.910.000,00	(3.116.841.200,00)	(0,26)

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2022 sebesar Rp460.367.527.917,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 228. Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
DAK Fisik - LO	70.275.269.743,00	78.732.325.023,00	(8.457.055.280,00)	(10,74)
DAK Non Fisik - LO	390.092.258.174,00	308.180.580.840,00	81.911.677.334,00	26,58
Jumlah	460.367.527.917,00	386.912.905.863,00	73.454.622.054,00	18,98

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut. Saldo Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-LO TA 2022 sebesar Rp1.674.759.689.978,00, sedangkan saldo Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan LRA TA 2022 sebesar Rp2.123.296.694.941,00. Selisih saldo Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA dan saldo Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 229. Rincian Pendapatan Transfer Pusat -Dana Perimbangan-LO
TA 2022 dan LRA TA 2021**

URAIAN	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.220.093.261,00	38.220.093.261,00	-
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.176.172.068.800,00	1.173.705.068.800,00	2.467.000.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70.275.269.743,00	70.275.269.743,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	390.092.258.174,00	424.339.890.137,00	(34.247.631.963,00)
Dana Desa	0,00	416.756.373.000,00	(416.756.373.000,00)
Jumlah	1.674.759.689.978,00	2.123.296.694.941,00	(448.537.004.963,00)

Selisih sebesar Rp448.537.004.963,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Dana Transfer Umum-DAU-LO sebesar Rp2.467.000.000,00 merupakan Pembayaran untuk tenaga insentif kepada tenaga Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19, berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pemotongan penyaluran DAU atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19.
2. Pendapatan DAK Non Fisik sebesar Rp34.247.631.963,00 merupakan pendapatan yang tidak dicatat dalam Laporan Operasional karena merupakan dana transitoris dan bukan merupakan beban operasional Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari pendapatan DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp19.731.047.000,00 dan pendapatan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.441.000.000,00, serta Dana BOS atas SD dan SMP swasta yang masuk ke rekening DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp13.075.584.963,00.
3. Dana Desa sebesar Rp416.756.373.000,00 merupakan pendapatan yang tidak dicatat dalam Laporan Operasional karena merupakan dana transitoris dan bukan merupakan beban operasional Pemerintah Kabupaten Kebumen.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

TA 2022	TA 2021
Rp0,00	Rp46.433.860.000,00

Pada TA 2022 tidak terdapat realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, sedangkan pada TA 2021 terdapat realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp46.433.860.000,00 yang merupakan atas pendapatan Dana Insentif Daerah (DID).

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO

TA 2022	TA 2021
Rp205.073.973.580,00	Rp153.395.428.972,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2022 sebesar Rp205.073.973.580,00 terdiri dari:

Tabel 230. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO
TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Bagi hasil Pajak - LO	174.430.162.580,00	147.547.358.972,00	26.882.803.608,00	18,22
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	30.643.811.000,00	5.848.070.000,00	24.795.741.000,00	424,00
Jumlah	205.073.973.580,00	153.395.428.972,00	51.678.544.608,00	33,69

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 naik sebesar Rp51.678.544.608,00 atau sebesar 33,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan hak Pemerintah daerah atas Bagi Hasil Pajak / Retribusi dari Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Rincian pendapatan transfer Pemerintah Provinsi dapat dilihat dari tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 231. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO
TA 2022 dan TA 2021**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	63.772.323.610,00	36.520.320.649,00	27.252.002.961,00	74,62
Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(175.466.888,00)	20.413.378.061,00	(20.588.844.949,00)	(100,86)
Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.770.398.873,00	33.321.531.186,00	6.448.867.687,00	19,35
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	377.838.619,00	346.069.816,00	31.768.803,00	9,18
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	70.685.068.366,00	56.946.059.260,00	13.739.009.106,00	24,13
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	30.643.811.000,00	5.848.070.000,00	24.795.741.000,00	424,00
Jumlah	205.073.973.580,00	153.395.428.972,00	51.678.544.608,00	33,69

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO TA 2022 sebesar Rp205.073.973.580,00 sedangkan saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA TA 2022 sebesar Rp206.460.947.000,00. Selisih saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA dan saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 232. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
dan Penjelasan Nilai LO dan LRA TA 2022**

Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	174.430.162.580,00	175.763.136.000,00	(1.332.973.420,00)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	30.643.811.000,00	30.643.811.000,00	-
Jumlah	205.073.973.580,00	206.406.947.000,00	(1.332.973.420,00)

Selisih sebesar Rp1.332.973.420,00 merupakan selisih saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.437.96.245,00 dengan saldo piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.770.941.665,00.

5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp5.250.570.763,00	Rp137.384.967.735,00

Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 233. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	5.250.570.763,00	8.794.749.700,00	(3.544.178.937,00)	(40,30)
Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	128.590.218.035,00	(128.590.218.035,00)	(100,00)
Jumlah	5.250.570.763,00	137.384.967.735,00	(132.134.396.972,00)	(96,18)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2022 merupakan atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.250.570.763,00 berupa pendapatan hibah air minum, hibah *IPDMIP*, dan hibah *sanitation Australia-Indonesia Infrastructure Grants (sAIIG)*. Pada tahun 2021 Lain lain pendapatan daerah yang sah terdapat pendapatan hibah dana BOS, namun pada Tahun 2022 pendapatan hibah Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku masuk ke dalam rekening Pendapatan DAK Non Fisik. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan atas Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2022
 Rp5.250.570.763,00

Tahun 2021
 Rp8.794.749.700,00

Pendapatan hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp5.250.570.763,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 234. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Hibah Air Minum	2.285.500.000,00	1.764.000.000,00	521.500.000,00	29,56
Hibah <i>IPDMIP</i>	2.860.499.988,00	6.508.749.700,00	(3.648.249.712,00)	(56,05)
Hibah <i>sAIIG</i>		522.000.000,00	(522.000.000,00)	(100,00)
Hibah Lainnya	104.570.775,00	-	104.570.775,00	-
Jumlah	5.250.570.763,00	8.794.749.700,00	(3.544.178.937,00)	(40,30)

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Hibah-LO TA 2022 sebesar Rp5.250.570.763,00 sedangkan saldo Pendapatan Hibah LRA TA 2022 sebesar Rp5.145.999.988,00. Selisih saldo Pendapatan Hibah LRA dan saldo Pendapatan Hibah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 235. Rincian Pendapatan Hibah dan Penjelasan Nilai LO dan LRA TA 2022

Uraian	LO TA. 2022 (Rp)	LRA TA. 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Hibah	5.250.570.763,00	5.145.999.988,00	104.570.775,00
Jumlah	5.250.570.763,00	5.145.999.988,00	104.570.775,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Selisih pendapatan hibah sebesar Rp104.570.775,00 merupakan pengakuan atas Pendapatan Hibah Bahan Pakai Habis dari Kementerian Kesehatan berupa Strip HB Meter TA 2022 pada Dinas Kesehatan.

5.4.2 Beban

TA 2022	TA 2021
Rp2.370.418.850.768,09	Rp2.429.794.708.383,89

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 236. Rincian Beban per Jenis TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Pegawai	1.143.541.014.988,00	1.143.794.892.346,00	(253.877.358,00)	(0,02)
2	Beban Persediaan	129.227.982.839,05	93.175.266.574,68	36.052.716.264,37	38,69
3	Beban Jasa	438.028.568.766,54	516.682.781.856,14	(78.654.213.089,60)	(15,22)
4	Beban Pemeliharaan	36.243.110.638,00	31.852.958.221,00	4.390.152.417,00	13,78
5	Beban Perjalanan Dinas	47.731.989.155,00	36.181.261.230,00	11.550.727.925,00	31,92
6	Beban Subsidi	313.864.348,00	484.527.400,00	(170.663.052,00)	(35,22)
7	Beban Hibah	37.491.422.414,00	73.785.584.651,00	(36.294.162.237,00)	(49,19)
8	Beban Bantuan Sosial	11.088.807.122,00	22.630.398.729,00	(11.541.591.607,00)	(51,00)
9	Beban Penyisihan Piutang	1.426.171.211,00	1.838.410.661,25	(412.239.450,25)	(22,42)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	309.591.026.986,50	304.083.563.064,82	5.507.463.921,68	1,81
11	Beban Transfer	215.734.892.300,00	205.285.063.650,00	10.449.828.650,00	5,09
	Jumlah	2.370.418.850.768,09	2.429.794.708.383,89	(59.375.857.615,80)	(2,44)

5.4.2.1 Beban Pegawai

TA 2022	TA 2021
Rp1.143.541.014.988,00	Rp1.143.794.892.346,00

Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp1.143.541.014.988,00. Rincian Beban Pegawai tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 237. Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	728.066.126.907,00	720.872.064.041,00	7.194.062.866,00	1,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	110.938.520.115,00	93.394.279.523,00	17.544.240.592,00	18,79
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246.113.135.845,00	269.466.287.145,00	(23.353.151.300,00)	(8,67)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	30.583.723.917,00	29.959.433.106,00	624.290.811,00	2,08
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	510.222.879,00	509.329.781,00	893.098,00	0,18
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	966.170.000,00	993.080.000,00	(26.910.000,00)	(2,71)
7	Beban Pegawai BOS	25.914.114.000,00	28.196.816.750,00	(2.282.702.750,00)	(8,10)
8	Beban Pegawai BLUD	449.001.325,00	403.602.000,00	45.399.325,00	11,25
	Jumlah	1.143.541.014.988,00	1.143.794.892.346,00	(253.877.358,00)	(0,02)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rincian Beban Pegawai per SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 238. Rincian Beban Pegawai per SKPD TA 2022 dan TA 2021

No	SKPD	LO TA 2022 (Rp)	LO TA 2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	765.609.611.451,00	764.899.099.217,00	710.512.234,00	0,1
2	Dinas Kesehatan PPKB	131.838.058.135,00	140.432.567.823,00	(8.594.509.688,00)	(6,1)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.576.908.740,00	19.058.972.987,00	517.935.753,00	2,7
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.734.666.441,00	2.611.804.335,00	122.862.106,00	4,7
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5.987.386.157,00	13.803.655.688,00	(7.816.269.531,00)	(56,6)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.884.656.033,00	2.418.085.357,00	466.570.676,00	19,3
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5.979.716.001,00	5.524.376.294,00	455.339.707,00	8,2
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.442.029.598,00	3.909.208.545,00	(467.178.947,00)	(12,0)
9	Dinas Tenaga Kerja	5.266.716.870,00	5.719.822.010,00	(453.105.140,00)	(7,9)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.071.559.104,00	3.388.423.400,00	683.135.704,00	20,2
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.752.366.723,00	4.308.154.368,00	(555.787.645,00)	(12,9)
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.733.429.421,00	3.594.747.263,00	138.682.158,00	3,9
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.166.879.121,00	3.249.818.288,00	(82.939.167,00)	(2,6)
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.568.850.163,00	5.822.866.519,00	(254.016.356,00)	(4,4)
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.602.833.009,00	2.286.418.693,00	316.414.316,00	13,8
16	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	10.954.508.534,00	4.026.426.852,00	6.928.081.682,00	172,1
17	Dinas Pertanian dan Pangan	17.432.157.331,00	17.480.126.363,00	(47.969.032,00)	(0,3)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	10.399.613.628,00	9.599.720.215,00	799.893.413,00	8,3
19	Sekretariat Daerah	19.561.904.791,00	18.269.084.149,00	1.292.820.642,00	7,1
20	Sekretariat DPRD	34.617.225.334,00	33.601.055.051,00	1.016.170.283,00	3,0
21	Kecamatan dan Kelurahan	52.137.529.891,00	48.941.114.620,00	3.196.415.271,00	6,5
22	Inspektorat Daerah	6.882.962.338,00	5.810.377.963,00	1.072.584.375,00	18,5
23	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.847.557.832,00	4.854.969.973,00	(7.412.141,00)	(0,2)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14.865.896.435,00	14.635.036.635,00	230.859.800,00	1,6
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.625.991.907,00	5.548.959.738,00	77.032.169,00	1,4
	Jumlah	1.143.541.014.988,00	1.143.794.892.346,00	(253.877.358,00)	(0,0)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.2.2 Beban Persediaan

TA 2022	TA 2021
Rp129.227.982.839,05	Rp93.175.266.574,68

Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp129.227.982.839,05. Rincian Beban Persediaan per SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 239. Rincian Beban Persediaan per SKPD TA 2022 dan TA 2021

No	SKPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan (Rp))	%
1	Dinas Dikpora	5.416.156.497,00	6.266.490.399,00	(850.333.902,00)	(13,57)
2	Dinas Kesehatan PPKB	57.446.021.875,05	26.498.352.941,68	30.947.668.933,37	116,79
3	Dinas PUPR	3.008.101.240,00	2.589.860.555,00	418.240.685,00	16,15
4	BPBD	3.915.606.545,00	7.222.018.093,00	(3.306.411.548,00)	(45,78)
5	Dinas Perkimhub	3.160.358.149,00	2.520.761.462,00	639.596.687,00	25,37
6	Badan Kesbangpol	1.084.716.809,00	1.583.640.562,00	(498.923.753,00)	(31,50)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.321.436.125,00	4.874.161.214,00	(3.552.725.089,00)	(72,89)
8	Dinsos PPPA	2.216.614.560,00	3.762.861.367,00	(1.546.246.807,00)	(41,09)
9	Dinas Tenaga Kerja	1.320.511.178,00	2.616.797.806,00	(1.296.286.628,00)	(49,54)
10	Dinas Dukcapil	2.055.307.242,00	1.377.016.246,00	678.290.996,00	49,26
11	Dinas PMD	2.673.782.034,00	2.414.548.474,00	259.233.560,00	10,74
12	Dinas Kominfo	685.464.529,00	874.746.318,00	(189.281.789,00)	(21,64)
13	DPMPSTP	1.037.590.741,00	1.662.810.508,00	(625.219.767,00)	(37,60)
14	Dinas Parbud	1.477.976.896,00	460.086.567,00	1.017.890.329,00	221,24
15	Dinas Arpus	296.909.450,00	1.819.596.157,00	(1.522.686.707,00)	(83,68)
16	Dinas LHKP	7.560.371.750,00	4.835.554.217,00	2.724.817.533,00	56,35
17	Dinas Tapang	10.057.554.355,00	1.357.961.228,00	8.699.593.127,00	640,64
18	DisperindagKUKM	2.452.909.441,00	3.696.945.603,00	(1.244.036.162,00)	(33,65)
19	Sekretariat Daerah	5.114.551.466,00	507.439.823,00	4.607.111.643,00	907,91
20	Sekretariat DPRD	2.647.620.393,00	1.204.151.471,00	1.443.468.922,00	119,87
21	Kecamatan dan Kelurahan	7.862.039.865,00	1.262.448.755,00	6.599.591.110,00	522,76
22	Inspektorat Daerah	557.697.662,00	1.597.189.029,00	(1.039.491.367,00)	(65,08)
23	Bappelitbangda	1.044.045.156,00	547.736.698,00	496.308.458,00	90,61
24	BPKPD	4.135.979.424,00	11.032.277.971,00	(6.896.298.547,00)	(62,51)
25	BKPSDM	678.659.457,00	589.813.110,00	88.846.347,00	15,06
	Jumlah	129.227.982.839,05	93.175.266.574,68	36.052.716.264,37	38,69

5.4.2.3 Beban Jasa

TA 2022	TA 2021
Rp438.028.568.766,54	Rp516.682.781.856,14

Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp438.028.568.766,54. Rincian Beban Jasa tahun 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 240. Rincian Beban Jasa TA 2022 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan	%
				(Penurunan) (Rp)	
1	Beban Jasa	158.308.598.799,86	181.484.175.464,14	(23.175.576.664,28)	(12,77)
2	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.422.897.000,00	1.412.463.000,00	4.010.434.000,00	283,93
3	Beban Barang dan Jasa BOS	75.015.922.915,00	70.636.055.279,00	4.379.867.636,00	6,20
4	Beban Barang dan Jasa BLUD	199.281.150.051,68	263.150.088.113,00	(63.868.938.061,32)	(24,27)
	Jumlah	438.028.568.766,54	516.682.781.856,14	(78.654.213.089,60)	(15,22)

Rincian Beban Jasa per SKPD tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 241. Rincian Beban Jasa per SKPD TA 2022 dan TA 2022

No	SKPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	97.821.553.237,00	107.217.069.112,00	(9.395.515.875,00)	(8,76)
2	Dinas Kesehatan PPKB	245.538.326.406,68	322.607.703.448,00	(77.069.377.041,32)	(23,89)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.138.436.405,00	6.803.537.237,00	1.334.899.168,00	19,62
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.099.564.127,00	1.134.821.030,00	(35.256.903,00)	(3,11)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	12.396.086.328,00	18.402.151.779,00	(6.006.065.451,00)	(32,64)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.113.628.350,00	284.744.070,00	1.828.884.280,00	642,29
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.817.766.718,00	3.757.101.249,00	60.665.469,00	1,61
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.452.624.531,00	2.864.115.523,00	(1.411.490.992,00)	(49,28)
9	Dinas Tenaga Kerja	1.393.891.630,00	2.774.184.865,00	(1.380.293.235,00)	(49,75)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.385.460.718,00	1.520.908.073,00	(135.447.355,00)	(8,91)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.771.072.004,00	5.736.740.139,00	34.331.865,00	0,60
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.354.841.463,00	4.821.054.536,00	(466.213.073,00)	(9,67)
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	902.814.030,00	919.040.994,00	(16.226.964,00)	(1,77)
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.976.628.668,00	3.263.763.858,00	712.864.810,00	21,84
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	762.095.777,00	845.274.841,00	(83.179.064,00)	(9,84)
16	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	9.022.773.246,00	1.983.786.045,00	7.038.987.201,00	354,83
17	Dinas Pertanian dan Pangan	7.551.234.051,00	4.274.626.603,00	3.276.607.448,00	76,65
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	5.047.207.025,00	4.112.826.763,00	934.380.262,00	22,72
19	Sekretariat Daerah	4.169.131.155,00	3.838.363.350,00	330.767.805,00	8,62



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan	%
20	Sekretariat DPRD	3.618.607.330,00	3.363.270.777,00	255.336.553,00	7,59
21	Kecamatan dan Kelurahan	4.152.308.702,00	3.782.878.904,00	369.429.798,00	9,77
22	Inspektorat Daerah	319.434.773,00	389.679.444,00	(70.244.671,00)	(18,03)
23	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.042.446.283,00	1.837.401.977,00	(794.955.694,00)	(43,27)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.304.584.695,86	5.533.428.593,14	3.771.156.102,72	68,15
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.876.051.113,00	4.614.308.646,00	(1.738.257.533,00)	(37,67)
	Jumlah	438.028.568.766,54	516.682.781.856,14	(78.654.213.089,60)	(15,22)

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

TA 2022
Rp36.243.110.638,00

TA 2021
Rp31.852.958.221,00

Nilai Beban Pemeliharaan-LO berbeda dengan nilai belanja pemeliharaan LRA sebesar Rp38.518.790.266,00. Rincian beban pemeliharaan per SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 242. Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD TA 2022 dan TA 2021

No	SKPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	108.262.163,00	1.515.918.183,00	(1.407.656.020,00)	(92,86)
2	Dinas Kesehatan PPKB	746.895.500,00	1.260.226.854,00	(513.331.354,00)	(40,73)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	23.390.099.881,00	18.266.651.939,00	5.123.447.942,00	28,05
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	230.975.427,00	208.478.309,00	22.497.118,00	10,79
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	629.346.517,00	1.416.637.228,00	(787.290.711,00)	(55,57)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.435.000,00	19.365.000,00	(7.930.000,00)	(40,95)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	49.833.700,00	53.394.900,00	(3.561.200,00)	(6,67)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	77.463.000,00	22.119.000,00	55.344.000,00	250,21
9	Dinas Tenaga Kerja	148.014.539,00	241.423.400,00	(93.408.861,00)	(38,69)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	209.355.030,00	120.067.000,00	89.288.030,00	74,37
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	42.483.000,00	39.478.000,00	3.005.000,00	7,61
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	174.702.000,00	168.081.450,00	6.620.550,00	3,94
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	108.999.800,00	415.791.025,00	(306.791.225,00)	(73,78)
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	551.387.321,00	315.807.800,00	235.579.521,00	74,60
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	79.350.000,00	69.170.000,00	10.180.000,00	14,72
16	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	564.290.427,00	181.473.064,00	382.817.363,00	210,95
17	Dinas Pertanian dan Pangan	360.086.270,00	420.499.507,00	(60.413.237,00)	(14,37)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.332.666.362,00	959.693.082,00	372.973.280,00	38,86
19	Sekretariat Daerah	2.520.295.908,00	1.908.498.020,00	611.797.888,00	32,06



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
20	Sekretariat DPRD	353.462.605,00	408.505.545,00	(55.042.940,00)	(13,47)
21	Kecamatan dan Kelurahan	4.263.431.146,00	3.425.337.415,00	838.093.731,00	24,47
22	Inspektorat Daerah	54.168.192,00	64.610.000,00	(10.441.808,00)	(16,16)
23	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	95.117.338,00	73.215.000,00	21.902.338,00	29,92
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	104.940.980,00	230.802.500,00	(125.861.520,00)	(54,53)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.048.532,00	47.714.000,00	(11.665.468,00)	(24,45)
	Jumlah	36.243.110.638,00	31.852.958.221,00	4.390.152.417,00	13,78

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

TA 2022
 Rp47.731.989.155,00

TA 2021
 Rp36.181.261.230,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas-LO sama dengan nilai Belanja Perjalanan Dinas LRA sebesar Rp47.731.989.155,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 243. Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD TA 2022 dan TA 2021

No	OPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	984.574.204,00	520.198.694,00	464.375.510,00	89,27
2	Dinas Kesehatan PPKB	20.027.621.364,00	10.969.727.473,00	9.057.893.891,00	82,57
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	700.455.883,00	322.707.247,00	377.748.636,00	117,06
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	535.655.694,00	1.124.225.828,00	(588.570.134,00)	(52,35)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.120.067.728,00	1.426.472.000,00	(306.404.272,00)	(21,48)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	686.271.519,00	299.399.006,00	386.872.513,00	129,22
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	587.308.997,00	5.018.440.500,00	(4.431.131.503,00)	(88,30)
8	Dinas Tenaga Kerja	711.547.135,00	1.108.312.225,00	(396.765.090,00)	(35,80)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	266.138.970,00	132.672.855,00	133.466.115,00	100,60
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.121.742.102,00	668.992.495,00	452.749.607,00	67,68
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	383.669.668,00	400.484.410,00	(16.814.742,00)	(4,20)
12	Dinas PMPTSP	215.458.828,00	125.621.165,00	89.837.663,00	71,51
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	596.081.161,00	839.604.760,00	(243.523.599,00)	(29,00)
14	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	67.909.541,00	84.414.100,00	(16.504.559,00)	(19,55)
15	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	956.343.858,00	488.703.865,00	467.639.993,00	95,69
16	Dinas Pertanian dan Pangan	1.904.634.019,00	1.925.794.264,00	(21.160.245,00)	(1,10)
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.248.253.556,00	565.960.418,00	682.293.138,00	120,55
18	Sekretariat Daerah	1.748.001.803,00	1.024.013.415,00	723.988.388,00	70,70
19	Inspektorat Daerah	431.240.529,00	262.919.627,00	168.320.902,00	64,02



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	OPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
20	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	445.940.107,00	422.158.807,00	23.781.300,00	5,63
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.115.624.939,00	235.586.892,00	880.038.047,00	373,55
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	456.963.355,00	486.466.318,00	(29.502.963,00)	(6,06)
23	Sekretariat DPRD	9.264.077.285,00	6.100.824.511,00	3.163.252.774,00	51,85
24	Kecamatan dan Kelurahan	1.401.482.117,00	1.335.653.291,00	65.828.826,00	4,93
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	754.924.793,00	291.907.064,00	463.017.729,00	158,62
Jumlah		47.731.989.155,00	36.181.261.230,00	11.550.727.925,00	31,92

5.4.2.6 Beban Subsidi

TA 2022	TA 2021
Rp313.864.348,00	Rp484.527.400,00

Beban Subsidi pada tahun 2022 sebesar Rp313.864.348,00 merupakan beban atas subsidi bunga kepada BUMD Tahun Anggaran 2022 dengan total realisasi sebesar Rp500.000.000,00 dan pengembalian sebesar Rp186.135.652,00 pada tanggal 23 Desember 2022. Nilai Beban Subsidi-LO sama dengan nilai Belanja Subsidi LRA sebesar Rp313.864.348,00. Rincian Beban Subsidi tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 244. Rincian Beban Subsidi TA 2022

No	Nama Penyalur	No. SP2D /Tanggal	Nilai SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	Pengembalian (Rp)
1	PT BPR BKK Kebumen	034/SPP-LS/BUNGA/2.17.3.31.3.30.07.0000/DAU/2022 tanggal 24 Agustus 2022	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
2	PT BPR Bank Kebumen	035/SPP-LS/BUNGA/2.17.3.31.3.30.07.0000/DAU/2022 tanggal 24 Agustus 2022	200.000.000,00	51.357.057,00	148.642.943,00
3	PT BPR BKK Jateng	036/SPP-LS/BUNGA/2.17.3.31.3.30.07.0000/DAU/2022 tanggal 24 Agustus 2022	75.000.000,00	37.507.291,00	37.492.709,00
Jumlah			500.000.000,00	313.864.348,00	186.135.652,00

5.4.2.7 Beban Hibah

TA 2022	TA 2021
Rp37.491.422.414,00	Rp73.785.584.651,00

Beban Hibah secara rinci disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 245. Rincian Beban Hibah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Hibah Barang kepada Pemerintah	0,00	71.720.708.651,00	(71.720.708.651,00)	(100,00)
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	35.426.546.414,00	2.064.876.000,00	33.361.670.414,00	1615,67
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000,00	0,00	2.064.876.000,00	0,00
	Jumlah	37.491.422.414,00	73.785.584.651,00	(36.294.162.237,00)	(49,19)

Tabel 246. Rincian Selisih Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah LRA TA 2022

No	Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.426.546.414,00	57.687.775.931,00	(22.261.229.517,00)
2	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000,00	2.064.876.000,00	0,00
	Jumlah	37.491.422.414,00	59.752.651.931,00	(22.261.229.517,00)

Selisih beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp22.261.229.517,00 merupakan dana BOP Kesetaraan sebesar Rp1.441.000.000,00, BOP Paud sebesar Rp19.731.047.000,00 dan Dana BOS SMP Swasta sebesar Rp1.089.182.234,00.

Beban Hibah tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

- Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2022 sebesar Rp35.426.546.414,00

Tabel 247. Rincian Beban Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD TA 2022

No	OPD	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	4.097.829.520,00
2	Dinas Kesehatan PPKB	304.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.038.296.475,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	4.026.000.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	3.637.688.514,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	448.471.860,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	948.000.000,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	12.533.260.045,00
10	Sekretariat Daerah	6.373.000.000,00
	Jumlah	35.426.546.414,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- b. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.064.876.000,00 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 248. Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022

No	Nama Partai Politik	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	162.873.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	356.487.000,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	126.141.000,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	464.832.000,00
5	Partai Golongan Karya	228.741.000,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	281.346.000,00
7	Partai Demokrat	133.671.000,00
8	Partai Amanat Nasional	146.091.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	164.694.000,00
	Jumlah	2.064.876.000,00

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

TA 2022	TA 2021
Rp11.088.807.122,00	Rp22.630.398.729,00

Beban Bantuan Sosial secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 249. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	8.631.337.772,00	14.633.270.000,00	(6.001.932.228,00)	(41,02)
2	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu	0,00	2.372.371.729,00	(2.372.371.729,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.127.879.350,00	40.500.000,00	2.087.379.350,00	5.154,02
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Keluarga	0,00	4.384.257.000,00	(4.384.257.000,00)	(100,00)
5	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	329.590.000,00	1.200.000.000,00	(870.410.000,00)	(72,53)
	Jumlah	11.088.807.122,00	22.630.398.729,00	(11.541.591.607,00)	(51,00)

- a. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp8.631.337.772,00 dilaksanakan oleh tujuh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250. Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu TA 2022

No	SKPD Pengelola	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.492.570.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2.990.609.672,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	68.000.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.659.308.100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	448.050.000,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	563.400.000,00
7	Sekretariat Daerah	1.409.400.000,00
	Jumlah	8.631.337.772,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- b. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp2.127.879.350,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 251. Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga TA 2022

No	SKPD Pengelola	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.809.490.550,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	318.388.800,00
	Jumlah	2.127.879.350,00

- c. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp329.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 252. Rincian Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga TA 2022

No	SKPD Pengelola	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	29.590.000,00
	Jumlah	329.590.000,00

Tabel 253. Rincian Selisih Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2022

No	Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	8.631.337.772,00	8.631.337.772,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.127.879.350,00	2.127.879.350,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	329.590.000,00	329.590.000,00	0,00
	Jumlah	11.088.807.122,00	11.088.807.122,00	0,00

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2022

Rp1.426.171.211,00

Tahun 2021

Rp1.838.410.661,25

Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti yang diterbitkan / dokumen yang dipersamakan. Saldo Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp1.426.171.211,00 merupakan beban penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Kebumen sedangkan saldo beban penyisihan piutang TA 2021 sebesar Rp1.838.410.661,25 atau mengalami penurunan sebesar 22,42%. Beban penyisihan piutang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 254. Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(95.368.995,90)	674.689.809,50	(770.058.805,40)	(114,14)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.709.160.150,50	1.018.343.431,00	690.816.719,50	67,84
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(187.619.943,60)	1.754.653.692,00	(1.942.273.635,60)	(110,69)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(1.609.276.271,25)	1.609.276.271,25	(100,00)
Jumlah	1.426.171.211,00	1.838.410.661,25	(412.239.450,25)	(22,42)

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2022	TA 2021
Rp309.591.026.986,50	Rp304.083.563.064,82

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 sebesar Rp309.591.026.986,50 sedangkan Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 sebesar Rp304.083.563.064,82 atau mengalami peningkatan sebesar 1,81%.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 255. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112.223.012.603,00	109.836.850.241,00	2.386.162.362,00	2,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.534.401.059,00	32.085.433.601,00	448.967.458,00	1,40
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	164.260.560.121,50	161.640.497.288,00	2.620.062.833,50	1,62
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	573.053.203,00	520.781.934,82	52.271.268,18	10,04
Jumlah	309.591.026.986,50	304.083.563.064,82	5.507.463.921,68	1,81

Beban Penyusutan Peralatan Mesin TA 2022 sebesar Rp112.223.012.603,00 merupakan penyusutan atas aset tetap peralatan mesin tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 256. Rincian Beban Penyusutan Peralatan Mesin per SKPD TA 2022

No	OPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	31.995.569.398,00	28.538.401.173	3.457.168.225	12,11
2	Dinas Kesehatan PPKB	52.449.658.306,00	52.028.831.023	420.827.283	0,81
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.798.804.176,00	2.514.745.789	284.058.387	11,30
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.588.306.966,00	1.619.750.634	(31.443.668)	(1,94)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2.682.842.864,00	5.330.384.084	(2.647.541.220)	(49,67)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	94.959.844,00	99.968.732	(5.008.888)	(5,01)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.008.035.839,00	1.050.555.205	(42.519.366)	(4,05)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	333.647.355,00	1.046.512.877	(712.865.522)	(68,12)
9	Dinas Tenaga Kerja	777.768.562,00	1.066.804.274	(289.035.712)	(27,09)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	824.783.113,00	854.046.248	(29.263.135)	(3,43)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	429.282.650,00	249.684.521	179.598.129	71,93
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.906.692.110,00	2.625.934.368	(719.242.258)	(27,39)
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	266.187.943,00	312.428.144	(46.240.201)	(14,80)
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	698.772.100,00	752.254.772	(53.482.672)	(7,11)
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	452.335.888,00	496.140.518	(43.804.630)	(8,83)
16	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	3.196.383.463,00	398.310.921	2.798.072.542	702,48
17	Dinas Pertanian dan Pangan	616.248.044,00	555.506.894	60.741.150	10,93
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.451.469.987,00	1.263.116.366	188.353.621	14,91
19	Sekretariat Daerah	2.102.705.294,00	1.846.063.124	256.642.170	13,90
20	Sekretariat DPRD	987.246.459,00	937.785.064	49.461.395	5,27
21	Kecamatan dan Kelurahan	3.733.586.585,00	2.892.529.418	841.057.167	29,08
22	Inspektorat Daerah	262.523.584,00	269.031.390	(6.507.806)	(2,42)
23	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	250.722.055,00	240.312.254	10.409.801	4,33
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.151.666.222,00	2.645.674.055	(1.494.007.833)	(56,47)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162.813.796,00	202.078.393	(39.264.597)	(19,43)
	Jumlah	112.223.012.603,00	109.836.850.241	2.386.162.362	2,17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Beban penyusutan gedung dan bangunan TA 2022 sebesar Rp32.534.401.059,00 merupakan penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 257. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD

No	OPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	13.724.953.951,00	12.807.804.720,00	917.149.231,00	7,16
2	Dinas Kesehatan PPKB	7.161.029.060,00	7.082.891.786,00	78.137.274,00	1,10
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	259.636.976,00	246.939.722,00	12.697.254,00	5,14
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	359.282.270,00	1.151.091.373,00	(791.809.103,00)	(68,79)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	99.500.510,00	99.500.510,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.205.689,00	82.647.995,00	7.557.694,00	9,14
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	47.624.630,00	188.896.424,00	(141.271.794,00)	(74,79)
8	Dinas Tenaga Kerja	550.392.345,00	659.600.485,00	(109.208.140,00)	(16,56)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.745.526,00	75.745.526,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	35.562.492,00	35.560.590,00	1.902,00	0,01
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	92.469.729,00	92.469.729,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.381.734,00	75.644.198,00	-2262464,00	-2,99
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.308.279.056,00	1.758.883.814,00	(450.604.758,00)	(25,62)
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	156.446.902,00	156.038.992,00	407.910,00	0,26
16	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	1.153.580.429,00	302.889.150,00	850.691.279,00	280,86
17	Dinas Pertanian dan Pangan	384.795.199,00	393.543.970,00	(8.748.771,00)	(2,22)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	4.814.216.174,00	4.778.244.524,00	35.971.650,00	0,75
19	Sekretariat Daerah	348.502.199,00	304.104.993,00	44.397.206,00	14,60
20	Inspektorat Daerah	125.912.794,00	125.912.794,00	0,00	0,00
21	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14.625.449,00	14.625.449,00	0,00	0,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	338.685.295,00	334.260.399,00	4.424.896,00	1,32
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.232.108,00	35.232.108,00	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	316.083.780,00	334.240.024,00	(18.156.244,00)	(5,43)
26	Kecamatan dan Kelurahan	905.162.087,00	885.569.651,00	19.592.436,00	2,21
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	63.094.675,00	63.094.675,00	0,00	0,00
	Jumlah	32.534.401.059,00	32.085.433.601,00	448.967.458,00	1,40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Beban penyusutan jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp164.260.560.121,50 merupakan penyusutan atas aset tetap jalan jaringan dan irigasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 258. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

No	OPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	85.875.401,00	49.351.573,00	36.523.828,00	74,01
2	Dinas Kesehatan PPKB	1.833.907.458,00	1.825.139.168,00	8.768.290,00	0,48
3	Dinas PUPR	153.610.043.771,00	150.816.563.957,00	2.793.479.814,00	1,85
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2.025.955.654,00	4.313.592.250,00	(2.287.636.596,00)	(53,03)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	345.500,00	345.500,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	510.747.735,00	510.747.735,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.290.118,00	2.101.624,00	188.494,00	8,97
8	Dinas Tenaga Kerja	6.510.610,00	8.608.280,00	(2.097.670,00)	(24,37)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.968.717,00	2.968.717,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.383.346,00	2.383.346,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	181.005.882,00	181.005.882,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.665.650,00	1.665.650,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	571.649.849,00	1.340.833.061,00	(769.183.212,00)	(57,37)
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	2.606.787.304,00	163.375.876,00	2.443.411.428,00	1495,58
17	Dinas Pertanian dan Pangan	731.752.781,00	866.705.335,00	(134.952.554,00)	(15,57)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3.422.670,00	1.325.000,00	2.097.670,00	158,31
19	Sekretariat Daerah	10.926.558,00	10.926.558,00	0,00	0,00
20	Inspektorat Daerah	4.942.345,00	4.942.345,00	0,00	0,00
21	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.863.750,00	6.863.750,00	0,00	0,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	22.512.456,00	22.512.456,00	0,00	0,00
24	BKPSDM	4.132.505,00	4.132.505,00	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	53.876.715,00	53.876.715,00	0,00	0,00
26	Kecamatan dan Kelurahan	1.977.584.346,50	1.448.121.005,00	529.463.341,50	36,56
	Jumlah	164.260.560.121,50	161.640.497.288,00	2.620.062.833,50	1,62

Beban amortisasi aset tidak berwujud TA 2022 sebesar Rp573.053.203,00 merupakan penyusutan atas aset lainya berupa *software*, kajian dan aset tidak berwujud lainnya yang ada di OPD dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 259. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	421.936.403,00	355.094.193,00	66.842.210,00	18,82
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Kajian	151.116.800,00	141.511.931,82	9.604.868,18	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	24.175.810,00	(24.175.810,00)	(100,00)
Jumlah	573.053.203,00	520.781.934,82	52.271.268,18	10,04

Tabel 260. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.902.560,00	7.122.560,00	(220.000,00)	(3,1)
2	Dinas Kesehatan PPKB	184.623.300,00	153.424.600,00	31.198.700,00	20,3
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	134.340.600,00	133.734.931,82	605.668,18	0,5
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.399.800,00	-	17.399.800,00	-
5	Dinas Tenaga Kerja	9.676.500,00	9.676.500,00	0,00	0,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	35.760.790,00	18.194.590,00	17.566.200,00	96,5
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	35.031.715,00	35.031.715,00	0,00	0,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.111.000,00	12.111.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	19.425.810,00	19.425.810,00	0,00	0,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	25.914.818,00	25.914.818,00	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	34.028.110,00	34.028.110,00	0,00	0,00
12	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan	10.586.200,00	10.586.200,00	0,00	0,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	43.252.000,00	57.531.100,00	(14.279.100,00)	(24,8)
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Kutowinangun	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	573.053.203,00	520.781.934,82	52.271.268,18	10,04



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.2.11 Beban Transfer

TA 2022	TA 2021
Rp215.734.892.300,00	Rp205.285.063.650,00

Saldo Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp215.734.892.300,00 sedangkan Saldo Beban Transfer TA 2021 sebesar Rp205.285.063.650,00 atau mengalami kenaikan 5,09%.

Rincian Beban Transfer TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 261. Rincian Beban Transfer TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Beban Bagi Hasil	12.402.615.800,00	13.862.929.650,00	(1.460.313.850,00)	(10,53)
Beban Bantuan Keuangan	203.332.276.500,00	191.422.134.000,00	11.910.142.500,00	6,22
Jumlah	215.734.892.300,00	205.285.063.650,00	10.449.828.650,00	5,09

Beban bagi hasil tahun 2022 sebesar Rp12.402.615.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.460.313.850,00 atau 10,53%, yang merupakan bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa serta bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 262. Rincian Beban Bagi Hasil LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa	10.087.758.000,00	11.148.216.650,00	(1.060.458.650)	(9,51)
2	Beban Bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa	2.314.857.800,00	2.714.713.000,00	(399.855.200)	(14,73)
Jumlah		12.402.615.800,00	13.862.929.650,00	(1.460.313.850,00)	(10,53)

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai beban bagi hasil LO dan belanja bagi hasil LRA

Tabel 263. Rincian Beban Bagi Hasil LO 2022 dan LRA 2022

No	Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Selisih
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.087.758.000,00	10.087.758.000,00	0,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa	2.314.857.800,00	2.314.857.800,00	0,00
Jumlah		12.402.615.800,00	12.402.615.800,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Beban bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp203.332.276.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.910.142.500,00 atau 6,22%, yang merupakan bantuan keuangan umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa serta Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 264. Rincian Beban Bantuan Keuangan-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-
2	Beban bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	169.946.366.500,00	169.581.134.000,00	365.232.500,00	0,22
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	33.185.910.000,00	21.841.000.000,00	11.344.910.000,00	51,94
Jumlah		203.332.276.500,00	191.422.134.000,00	11.910.142.500,00	6,22

- Beban Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp200.000.000,00 yang digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam sesuai Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 988/405 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022.
- Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Ke Desa tahun 2022 sebesar Rp169.946.366.500,00 yang digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Umum untuk Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 449 Desa dari 26 Kecamatan.
- Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2022 sebesar Rp33.185.910.000,00 yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur sebanyak 234 kegiatan, dengan total penerima 163 desa. Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 460/371 tanggal 17 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 serta Operasional TPQ dengan kriteria TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2022, realisasi penerima TPQ sebesar Rp2.240.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp2.245.000.000 (sebanyak 448 desa penerima). Satu desa yang tidak menerima Bantuan Operasional TPQ adalah desa Karangglonggong



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kecamatan Klirong karena belum memiliki TPQ yang telah terdaftar pada Kementerian Agama. Bantuan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/264 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai Beban Bantuan Keuangan-LO dan belanja bantuan keuangan LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 65. Rincian Beban Bagi Bantuan Keuangan-LO 2022 dan LRA 2022

No	Uraian	LO TA 2022 (Rp)	LRA TA 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke	169.946.366.500,00	586.702.739.500,00	(416.756.373.000)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	33.185.910.000,00	33.185.910.000,00	0,00
	Jumlah	203.332.276.500,00	620.088.649.500,00	(416.756.373.000,00)

Selisih beban bantuan Keuangan dan belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2022 merupakan realisasi belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp416.756.373.000,00.

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

TA 2022	TA 2021
(Rp15.006.573.830,00)	(Rp11.103.569.757,00)

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp15.006.573.830,00) adalah sebagai berikut.

Tabel 266. Defisit Kegiatan Non Operasional

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	1.829.716.362,00	1.623.258.031,00	206.458.331,00	12,72
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	16.836.290.192,00	12.726.827.788,00	4.109.462.404,00	32,29
Jumlah	(15.006.573.830,00)	(11.103.569.757,00)	(3.903.004.073,00)	35,15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 2022 sebesar Rp1.829.716.362,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel 267. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan Alat Angkutan	1.521.719.362,00	1.290.265.031,00	231.454.331,00	17,94
Surplus Penjualan Bangunan Gedung	249.797.000,00	332.993.000,00	(83.196.000,00)	(24,98)
Surplus Penjualan Biota Perairan	58.200.000,00	0,00	58.200.000,00	-
Jumlah	1.829.716.362,00	1.623.258.031,00	206.458.331,00	12,72

5.4.3.2 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 2022 sebesar Rp16.836.290.192,00 berasal dari penghapusan aset tetap kondisi rusak berat, yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel 269. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No	Uraian	No SK Hapus	Jumlah (Rp)
1	SK Hapus Kendaraan (Tahap I)	028/040.1/KEP/2022	3.879.192.230,00
2	SK Hapus Kendaraan (Tahap II)	028/50/KEP/2022	1.539.574.385,00
3	SK Hapus Dinas, Badan, Sekda, Kecamatan/Kelurahan, SMP Negeri dan Korwil Biddik	028/1669/KEP/2022	5.696.483.832,00
4	SK Hapus Rumah Sakit, Puskesmas dan UP3	028/1670/KEP/2022	5.721.039.745,00
Jumlah			16.836.290.192,00

5.4.4 Pos Luar Biasa

TA 2022	TA 2021
Rp1.295.204.500,00	Rp315.318.400,00

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel 270. Rincian Pos Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	
Beban Luar Biasa	1.295.204.500,00	315.318.400,00	979.886.100,00	310,76
Jumlah	1.295.204.500,00	315.318.400,00	979.886.100,00	310,76



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.4.4.1 Beban Luar Biasa

TA 2022

Rp1.295.204.500,00

TA 2021

Rp315.318.400,00

Beban Luar Biasa 2022 sebesar Rp1.295.204.500,00 merupakan beban atas bantuan untuk korban bencana alam, bantuan korban kebakaran, bantuan Migran Korban Tindak kekerasan, bantuan orang kehabisan bekal/PMKS, Bantuan kepada Korban Kebakaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 271. Rincian Beban Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021

NO	NO SP2D	Tgl SP2D	URAIAN	NILAI (Rp)
1	00266/TU NIHIL/2022	4/28/2022	Belanja BBM guna Penanggulangan Bencana Banjir Tanggap Darurat Bencana Dampak Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kab Kebumen Th. 2022	49.995.500,00
2	00266/TU NIHIL/2022	4/28/2022	Belanja Karung Plastik (Penahan Tanggul) Penanganan Dampak Banjir Sub Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	130.000.000,00
3	00266/TU NIHIL/2022	4/28/2022	Bantuan Transport petugas (TIM DU 20 Org) Tim Evakuasi Tim LOGPAL Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung	42.000.000,00
4	00266/TU NIHIL/2022	4/28/2022	Belanja Upah Tenaga Kerja Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung	65.209.000,00
5	00162/LS/DAU/2022	4/11/2022	Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap I TA 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No 900/581 tanggal 28 Maret 2022	10.750.000,00
6	00266/TU NIHIL/2022	4/28/2022	Belanja Kebutuhan Pangan (Pengungsi dan Petugas) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kab. Kebumen Th. 2022	92.642.000,00
7	00266/TU NIHIL/2022	4/28/2022	Belanja Bronjong,Batu Belah,Bambu Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung	352.500.000,00
8	00266/TU NIHIL/2022	4/28/2022	Belanja Pengadaan Bahan Banjiran (Jembatan Darurat) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir , Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kab. Kebumen Th. 2022	199.958.000,00
9	00331/LS/DAU/2022	5/30/2022	Bantuan kepada Korban Bencana Alam Tahap I di Kabupaten Kebumen TA. 2022	87.500.000,00
10	00328/LS/DAU/2022	5/30/2022	Bantuan kepada Korban Kebakaran Tahap I di Kabupaten Kebumen TA. 2022	72.500.000,00
11	00354/LS/DAU/2022	6/3/2022	Bantuan Migran Korban Tindak Kekerasan Tahap I di Kabupaten Kebumen TA. 2022	3.000.000,00
12	00623/LS/DAU/20223	7/25/2022	Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap II TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/963 tanggal 28 Juni 2022	10.300.000,00
13	00778/LS/DAU/2022	8/16/2022	Bantuan Migran Korban Tindak Kekerasan Tahap 2 di Kabupaten Kebumen TA. 2022	1.000.000,00
14	00907/LS/DAU/2022	8/31/2022	Bantuan kepada Korban Kebakaran Tahap 2 di Kabupaten Kebumen TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/1339 tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp50.000.000,-	50.000.000,00
15	01000/LS/DAU/2022	9/15/2022	Bantuan Migran Korban Tindak Kekerasan Tahap 3 di Kabupaten Kebumen TA. 2022	2.000.000,00
16	01495/LS/DAU/2022	11/23/2022	Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap III TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/1764 tanggal 04 November	9.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

NO	NO SP2D	Tgl SP2D	URAIAN	NILAI (Rp)
			2022 sebesar Rp9.500.000,-	
17	01702/LS/DAU/2022	12/8/2022	Bantuan kepada Korban Bencana Alam Tahap II di Kabupaten Kebumen TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/1863 tanggal 22 November 2022 sebesar Rp80.000.000,-	80.000.000,00
18	01752/LS/DAU/2022	12/9/2022	Bantuan kepada Korban Kebakaran Tahap III di Kabupaten Kebumen TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/2022 tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp30.000.000,-	30.000.000,00
19	01786/LS/DAU/2022	12/13/2022	Bantuan Orang Kehabisan Bekal/PMKS Tahap IV TA. 2022 sesuai Persetujuan Bupati Kebumen No. 900/2031.2 tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp6.350.000,-	6.350.000,00
Jumlah				1.295.204.500,00

Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp1.295.204.500,00). Dengan demikian, surplus/defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp61.882.295.304,15) yang diperoleh dari surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar (Rp60.587.090.804,15) dan surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar (Rp1.295.204.500,00).



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode TA 2022 Kabupaten Kebumen. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Arus Kas Kabupaten Kebumen merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya, serta Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Laporan Arus Kas dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Informasi ini bertujuan untuk:

- Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah;
- Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas.

Saldo Awal Kas atau saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp269.179.627.198,98. Terjadi penurunan saldo kas selama tahun 2022 sebesar Rp10.352.950.019,00 sehingga saldo akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp258.826.677.179,98, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 272. Saldo Kas per 31 Desember 2022

No	Rincian SILPA	Kas (Rp)	Utang PFK (Rp)	SILPA (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	170.249.980.751,00	0,00	170.249.980.751,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	41.794.313,00	0,00	41.794.313,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.429.217,00	0,00	1.429.217,00
4	Kas d BLUD RSUD dr Soedirman	52.325.530.201,00	0,00	52.325.530.201,00
5	Kas di BLUD RSUD Prembun	30.578.253.474,00	0,00	30.578.253.474,00
6	Kas BLUD Puskesmas	4.592.561.339,98	0,00	4.592.561.339,98
7	Kas Dana BOS	1.037.127.884,00	9.326.302,00	1.027.801.582,00
	Jumlah	258.826.677.179,98	9.326.302,00	258.817.350.877,98

Penurunan saldo kas selama tahun 2022 sebesar Rp10.352.950.019,00 berasal dari aktivitas berikut.

Tabel 273. Arus Kas per Aktivitas TA 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	293.309.607.181,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(303.671.883.502,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9.326.302,00
	Jumlah	(10.352.950.019,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 274. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.845.366.301.042,00	2.830.411.757.702,00
Arus Kas Keluar	2.552.056.693.861,00	2.513.729.747.760,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	293.309.607.181,00	316.682.009.942,00

5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari:

Tabel 275. Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pajak Daerah	129.843.868.262,00	112.474.854.190,00
2	Retribusi Daerah	28.375.110.419,00	23.652.739.277,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.810.868.690,00	16.552.860.815,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	336.486.811.742,00	317.713.374.802,00
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.123.296.694.941,00	2.059.293.466.080,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.406.947.000,00	163.339.494.803,00
7	Pendapatan Hibah	5.145.999.988,00	8.794.749.700,00
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	128.590.218.035,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.845.366.301.042,00	2.830.411.757.702,00

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.845.366.301.042,00 tersebut, meliputi pendapatan yang diterima BLUD dan pendapatan Dana BOS yang diterima langsung sekolah pada TA 2022. Pendapatan dari BLUD dirinci sebagai berikut.

Tabel 276. Rincian Pendapatan BLUD TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	RSUD Dr. Soedirman	52.325.530.201,00
2	RSUD Prembun	30.578.253.474,00
3	Puskesmas	4.592.561.339,98
	Jumlah	87.496.345.014,98

Sedangkan pendapatan Dana BOS yang diterima langsung melalui rekening Sekolah adalah sebesar Rp1.027.801.582,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas keluar dari aktivitas operasi terdiri atas berikut.

Tabel 277. Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.142.207.137.167,00	1.141.295.419.703,00
2	Belanja Barang dan Jasa	704.907.763.493,00	666.965.891.277,00
3	Belanja Subsidi	313.864.348,00	484.527.400,00
4	Belanja Hibah	59.752.651.931,00	72.414.174.601,00
5	Belanja Bantuan Sosial	11.088.807.122,00	21.478.899.729,00
6	Belanja Tak Terduga	1.295.204.500,00	545.318.400,00
7	Transfer Belanja Bagi Hasil	12.402.615.800,00	13.862.929.650,00
8	Transfer Belanja Bantuan Keuangan	620.088.649.500,00	596.682.587.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.552.056.693.861,00	2.513.729.747.760,00

Arus kas keluar dari Aktivitas operasi sebesar Rp2.552.056.693.861,00 tersebut sudah termasuk belanja operasi BLUD dan belanja yang bersumber dari Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 278. Belanja Operasi BLUD TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	469.241.325,00
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	259.968.977.911,00
	Jumlah	260.438.219.236,00

Sedangkan belanja yang bersumber dari Dana BOS, yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 279. Belanja Operasi BOS TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai BOS	25.914.114.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.002.325.361,00
	Jumlah	112.916.439.361,00

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp303.671.883.502,00.

Tabel 280. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2022

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.829.716.362,00	1.623.258.031,00
Arus Kas Keluar	305.501.599.864,00	269.110.950.340,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(303.671.883.502,00)	(267.487.692.309,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang sebesar Rp303.671.883.502,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 dari aktivitas investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp303.671.883.502,00.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.829.716.362,00 merupakan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris dari Peralatan Mesin, Bangunan Gedung dan Penjualan Aset Tetap Lainnya, rincian arus kas masuk aktivitas investasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 281. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.521.719.362,00	1.290.325.031,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	249.797.000,00	332.933.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	58.200.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.829.716.362,00	1.623.258.031,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp305.501.599.864,00 terdiri dari belanja modal TA 2022 sebesar Rp272.301.599.864,00 termasuk didalamnya belanja modal BLUD dan belanja modal yang bersumber dana BOS, Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp18.200.000.000,00 serta Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 282. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.387.839.580,00	4.062.715.011,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.152.506.285,00	112.083.903.500,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.758.067.305,00	44.827.545.305,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.620.498.535,00	97.454.097.763,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.894.828.159,00	7.682.688.761,00
6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	487.860.000,00	0,00
7	Penyertaan Modal Daerah	18.200.000.000,00	3.000.000.000,00
8	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	305.501.599.864,00	269.110.950.340,00

Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana BLUD dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 283. Rincian Belanja Modal BLUD TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	22.427.550,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.662.806.698,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.549.381.811,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	221.692.260,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	311.987.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.400.000,00
	Jumlah	58.773.695.319,00

Sedangkan arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut:

Tabel 284. Rincian Belanja Modal Dana BOS TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.372.682.269,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.796.646.659,00
	Jumlah	28.169.328.928,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 285. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2022

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.100.000.000,00	2.135.000.000,00
Arus Kas Keluar	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	35.000.000,00

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar Rp2.100.000.000,00 adalah penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. Pengembalian pinjaman terdiri atas pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Gabungan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kelompok Tani sebesar Rp1.500.000.000 serta Pengembalian Pinjaman Daerah dari Rukun Nelayan sebesar Rp600.000.000,00.

Tabel 286. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan TA 2022

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
2	Pelampauan penerimaan pembiayaan- pinjaman daerah dari masyarakat	0,00	35.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.100.000.000,00	2.135.000.000,00

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.100.000.000,00 merupakan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.100.000.000,00 yang terdiri dari pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Gabungan Kelompok Tani sebesar Rp1.500.000.000,00 serta Pemberian Pinjaman Daerah kepada Rukun Nelayan sebesar Rp600.000.000,00.

Tabel 287. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2022

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 bernilai sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 288. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	154.521.795.983,00	160.416.587.732,00
Arus Kas Keluar	154.512.469.681,00	160.450.902.682,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	9.326.302,00	(34.314.950,00)

5.5.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk aktivitas transitoris sebesar Rp154.521.795.983,00 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada BUD sebesar Rp154.512.469.681,00 dan PFK Dana BOS sebesar Rp9.326.302,00.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Arus Arus kas keluar Aktivitas Transitoris tahun 2022 sebesar Rp154.512.469.681,00 merupakan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 283. Perubahan Ekuitas TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	4.614.349.431.228,11	4.483.948.124.718,03
SURPLUS/DEFISIT-LO	(61.688.408.212,26)	23.570.982.245,28
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	39.578.635.429,86	106.830.324.264,80
EKUITAS AKHIR	4.592.239.658.445,71	4.614.349.431.228,11

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.614.349.431.228,11 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2021 sebesar Rp4.483.948.124.718,03 terdapat peningkatan sebesar 2,91%.

5.6.2. Surplus /Defisit-LO

Saldo *Surplus/Defisit-LO* merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 terdapat *Defisit-LO* sebesar (Rp61.688.408.212,26) dan apabila dibandingkan dengan *Surplus-LO* per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.570.982.245,28 atau terdapat penurunan sebesar 361,71%.

5.6.3. Koreksi Ekuitas

Saldo Akun Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.578.635.429,86 Apabila dibandingkan dengan saldo Akun Koreksi Ekuitas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp106.830.324.264,80 terdapat penurunan sebesar 62,95%.

Akun-akun yang mempengaruhi saldo akun koreksi ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 284. Akun-akun yang Mempengaruhi Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2022

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Aset Tetap	140.260.544.187,00	132.555.889.252,00	(7.704.654.935,00)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	324.345.497.873,00	340.490.714.489,00	16.145.216.616,00
3	Investasi Jangka Panjang	7.307.455.937,70	669.617.893,24	(6.637.838.044,46)
4	Aset Lainnya	(1.002.439.481,82)	34.334.810.839,00	35.337.250.320,82
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	155.584.000,00	155.584.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	2.283.077.472,50	2.283.077.472,50
Jumlah		470.911.058.515,88	510.489.693.945,74	39.578.635.429,86

Penjelasan secara ringkas mengenai masing-masing Koreksi Ekuitas adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

1. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas - Aset Tetap terjadi karena adanya penyesuaian Aset Tetap atas Hibah dari Kementerian Pendidikan sesuai Surat Keputusan Nomor 21905C3/KPA/IX/SK/2022 dan Hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan BAST Nomor BA-11/Ek.11/26/12/2022/ dan Nomor 028.1/7073 tanggal 13 Desember 2022 dan hasil inventarisasi BMD Tahun 2022.

Rekap jurnal Koreksi Ekuitas-Aset Tetap tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 285. Rekap Jurnal Koreksi Ekuitas - Aset Tetap TA 2022

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Penyesuaian aset tetap karena koreksi	17.928.785.247,00	5.341.813.545,00	(12.586.971.702,00)
2	Penyesuaian aset tetap karena reklas	16.920.500.830,00	16.365.439.587,00	(555.061.243,00)
3	Penyesuaian aset tetap karena hibah	11.240.778.449,00	17.111.307.049,00	5.870.528.600,00
4	Penyesuaian aset tetap karena baru tercatat	0,00	11.925.734.785,00	11.925.734.785,00
5	Penyesuaian aset tetap karena barang jasa menjadi aset tetap	0,00	5.430.793.202,00	5.430.793.202,00
6	Penyesuaian aset tetap karena usul hapus barang rusak berat	17.890.748.977,00	0,00	(17.890.748.977,00)
7	Penyesuaian aset tetap karena mutasi	76.279.730.684,00	76.380.801.084,00	101.070.400,00
Jumlah		140.260.544.187,00	132.555.889.252,00	(7.704.654.935,00)

2. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terjadi karena adanya penyesuaian atas nilai saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Rekap jurnal Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

3. Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang

Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang terjadi karena adanya penyesuaian atas penilaian Investasi Permanen/Penyertaan Modal BUMD dengan metode Ekuitas. Daftar jurnal Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 286. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang TA 2022

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang PT BPR Bank Kebumen	1.488.038.292,00	(2.604.044.607,00)	(4.092.082.899,00)
2	Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang PT Lukulo Farma	190.336.845,52	76.133.687,52	(114.203.158,00)
3	Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	2.026.822.323,00	1.533.946.332,00	(492.875.991,00)
4	Jurnal untuk mengoreksi Investasi Jangka Panjang PT BPR BKK Kebumen	3.602.258.477,18	1.663.582.480,33	(1.938.675.996,85)
Jumlah		7.307.455.937,70	669.617.892,85	(6.637.838.044,85)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

4. Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya terjadi karena adanya penyesuaian atas Aset Rusak Berat, Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat, dan Aset Tidak Berwujud, dan hasil inventarisasi BMD Tahun 2022. Daftar jurnal Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 287. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya TA 2022

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Jurnal Penyesuaian aset lainnya atas barang rusak berat	21.371.201.702,18	17.322.858.647,00	(4.048.343.055,18)
2	Jurnal Penyesuaian aset lainnya akumulasi penyusutan barang rusak berat	(22.375.841.184,00)	0,00	22.375.841.184,00
3	Jurnal penyesuaian atas penghapusan aset tetap yang ada di aset lain-lain	0,00	16.836.290.192,00	16.836.290.192,00
4	Jurnal Penyesuaian aset lainnya DED	0,00	175.662.000,00	175.662.000,00
5	Jurnal Penyesuaian aset lainnya aset tidak berwujud	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)
Jumlah		(1.002.439.481,82)	34.334.810.839,00	35.337.250.320,82

5. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain terjadi karena adanya penyesuaian atas perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Daftar jurnal Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 288. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain TA 2022

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Jurnal penyesuaian Disdikpora atas amortisasi akumulasi ATB	0,00	880.000,00	880.000,00
2	Jurnal penyesuaian DPUPR atas akumulasi amortisasi DED	0,00	11.913.000,00	11.913.000,00
3	Jurnal penyesuaian BPKPD atas akumulasi ATB	0,00	142.791.000,00	142.791.000,00
Jumlah		0,00	155.584.000,00	155.584.000,00

6. Koreksi Ekuitas-Beban Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas-Beban Penyisihan Piutang terjadi karena adanya penyesuaian atas penghapusan piutang dan pelunasan piutang yang belum diperhitungkan beban penyisihan piutangnya. Daftar jurnal Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 289. Daftar Jurnal Koreksi Ekuitas - Beban Penyisihan Piutang TA 2022

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Jurnal koreksi atas beban penyisihan piutang PBB	0,00	1.481.258.417,10	1.481.258.417,10
2	Jurnal Koreksi atas beban penyisihan piutang karena adanya pelunasan piutang pasien yang belum diperhitungkan beban penyisihan piutangnya RSUD dr Soedirman	0,00	796.028.755,60	796.028.755,60
3	Jurnal Koreksi atas beban penyisihan piutang karena adanya pelunasan piutang pasien yang belum diperhitungkan beban penyisihan piutangnya RSUD Prembun	0,00	5.790.299,80	5.790.299,80
Jumlah		0,00	2.283.077.472,50	2.283.077.472,50

5.6.4. Ekuitas Akhir

Merupakan Saldo Ekuitas Awal ditambah *Surplus-LO* atau dikurangi *Defisit-LO* dan ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Laporan Neraca. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.592.239.658.445,71 dibandingkan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.614.349.431.228,11 terdapat penurunan sebesar 0,48%.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Susunan Perangkat Daerah

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Perangkat Daerah dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A; dan
- d. Dinas dengan tipe sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - 2) Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi;
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 10) Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - 14) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - 15) Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 - 17) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Badan dengan tipe sebagai berikut:
- 1) Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- 4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari 26 Kecamatan tipe A

Nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD TA 2022 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022

No	Kode SKPD	Nama SKPD
1	1.01.2.19.0.00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	1.02.2.14.0.00.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	1.03.2.10.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	1.04.2.15.0.00.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
5	1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja
6	1.05.0.00.0.00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	1.06.2.08.0.00.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8	2.09.3.27.0.00.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
9	2.11.3.28.3.25.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan
10	2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12	2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika
13	2.17.3.31.3.30.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
14	2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	2.22.3.26.0.00.01	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
16	2.23.2.24.0.00.01	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
17	3.29.3.32.2.07.01	Dinas Tenaga Kerja
18	4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah
19	4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat Dprd
20	5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
21	5.02.0.00.0.00.01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
22	5.03.5.04.0.00.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat Daerah
24	7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Ayah
25	7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Buayan
26	7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Puring
27	7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Petanahan
28	7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Klirong
29	7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Buluspesantren
30	7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Ambal
31	7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Mirit
32	7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Bonorowo
33	7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Prembun
34	7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Padureso
35	7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Kutowinangun
36	7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Alian
37	7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Poncowarno
38	7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Kebumen
39	7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Pejagoan
40	7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Sruweng
41	7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Adimulyo
42	7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Kuwarasan
43	7.01.0.00.0.00.20	Kecamatan Rowokele
44	7.01.0.00.0.00.21	Kecamatan Sempor
45	7.01.0.00.0.00.22	Kecamatan Gombong
46	7.01.0.00.0.00.23	Kecamatan Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Kode SKPD	Nama SKPD
47	7.01.0.00.0.00.24	Kecamatan Karanggayam
48	7.01.0.00.0.00.25	Kecamatan Sadang
49	7.01.0.00.0.00.26	Kecamatan Karangsambung
50	8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Di Tahun Anggaran 2022 terdapat 37 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 35 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD
1	UPTD RSUD Dr. Soedirman
2	UPTD RSUD Prembun
3	UPTD Puskesmas Adimulyo
4	UPTD Puskesmas Alian
5	UPTD Puskesmas Ambal I
6	UPTD Puskesmas Ambal II
7	UPTD Puskesmas Ayah I
8	UPTD Puskesmas Ayah II
9	UPTD Puskesmas Bonorowo
10	UPTD Puskesmas Buayan
11	UPTD Puskesmas Buluspesantren I
12	UPTD Puskesmas Buluspesantren II
13	UPTD Puskesmas Gombang I
14	UPTD Puskesmas Gombang II
15	UPTD Puskesmas Karanganyar
16	UPTD Puskesmas Karanggayam I
17	UPTD Puskesmas Karanggayam II
18	UPTD Puskesmas Karangsambung
19	UPTD Puskesmas Kebumen I
20	UPTD Puskesmas Kebumen II
21	UPTD Puskesmas Kebumen III
22	UPTD Puskesmas Klihong I
23	UPTD Puskesmas Klihong II
24	UPTD Puskesmas Kutowinangun
25	UPTD Puskesmas Kuwarasan
26	UPTD Puskesmas Mirit
27	UPTD Puskesmas Padureso
28	UPTD Puskesmas Pejagoan
29	UPTD Puskesmas Petanahan
30	UPTD Puskesmas Poncowarno
31	UPTD Puskesmas Prembun
32	UPTD Puskesmas Puring
33	UPTD Puskesmas Rowokele
34	UPTD Puskesmas Sadang
35	UPTD Puskesmas Sempor I
36	UPTD Puskesmas Sempor II
37	UPTD Puskesmas Sruweng

B. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Menindaklanjuti LHP SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas LK Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 51B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Adapun perubahan yang disesuaikan meliputi penyesuaian kodifikasi barang, perubahan perhitungan masa manfaat yang semula tahun menjadi bulan, dan perubahan kebijakan akuntansi penyisihan piutang mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

C. Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF)*

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *TDF*, Penyaluran DAU dan/atau DBH oleh pemerintah pusat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas *TDF*, adapun *TDF* merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan provinsi Jawa Tengah Nomor S-802/WPB.14/2023 tanggal 15 Februari 2023 Hal Penyampaian data Saldo dan Remunerasi *TDF* Transfer ke daerah (*TDF* -TKD) tahun 2022, disebutkan bahwa Saldo dan Remunerasi pada Rekening *TDF* Transfer ke daerah (*TDF* -TKD) per 31 Desember 2022 Kabupaten Kebumen yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000345980 dengan nama rekening Rek Lain BI *TDF* TKD Kab Kebumen yaitu Saldo pokok sebesar Rp4.228.271.591,00 dan saldo remunerasi bulan Desember 2022 sebesar Rp1.025.484,44. Pencatatan terhadap informasi saldo *TDF* tersebut belum dapat dilakukan karena menunggu ketentuan lebih lanjut.

D. Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga berupa Bantuan Jambanisasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga berupa Bantuan Jambanisasi dan Program Hibah Sanitasi Air Limbah setempat APBN tahun 2022. Pekerjaan tersebut dalam rangka mendukung percepatan akses sanitasi yang layak dan aman serta sebagai aksi keberlanjutan dari *Open Defecation Free* (ODF). Pelaksanaan Teknis Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) dengan pagu total anggaran sebesar Rp3.300.000.000,00 dengan target output 1.000 unit jamban terbangun. Dimana nilai tersebut mendasari Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-10/MK.7/DTK.03/ALS/2022 tanggal 17 Februari 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan sistem *reimburse*.

Pelaksanaan pembangunan jamban dilaksanakan oleh CV Santika Cipta Lestari selaku pemenang tender dengan harga pelaksanaan senilai Rp2.637.717.600,00. Berdasarkan perjanjian kerja nomor 027/10054 tanggal 20 Juli 2022, masa pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender dan berakhir pada tanggal 17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

November 2022. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan pekerjaan serta terdapat material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga setelah PPK melakukan teguran dan *Show Cause Meeting* (SCM), PPK membuat surat pernyataan wanprestasi nomor 443.6.5/14931 tanggal 16 September 2022 dimana realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 74,46% dari rencana schedule 100% dan dilanjutkan pada tanggal 17 November 2022 PPK melakukan pemutusan kontrak kerja kepada Direktur CV Santika Cipta Lestari. Menindaklanjuti hal tersebut telah dicairkan Jaminan pelaksanaan sejumlah 5% dari nilai kontrak sebesar Rp131.885.900,00 ke rekening RKUD Kabupaten Kebumen tanggal 5 Desember 2022 melalui BPD Jateng Cabang Kebumen.

Mendasari Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan nomor 027/15024 tanggal 17 November 2022, dinyatakan volume pekerjaan yang terpasang dan berfungsi sebesar 74,46% dengan 853 unit jamban terbangun dan berfungsi. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan PPKB mengajukan SPM LS tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp1.964.060.200,00. Namun karena pada proses verifikasi pengajuan pencairan SPM ditemukan ketidaksesuaian data antara data pengajuan dan data BNBA (*by name by address*), dimana data BNBA yang di *entry* untuk proses pengajuan pencairan hibah bansos hanya teridentifikasi 767 unit dengan nominal Rp1.764.972.000,00. Maka Dinas kesehatan PPKB diminta untuk melakukan verifikasi ulang, dengan hasil data penerima yang sesuai dengan dokumen lampiran IV perbup nomor 69/2022 tentang penjabaran perubahan APBD TA 2022, dan Keputusan Bupati Nomor 050/300 Tahun 2022 sebanyak 786 penerima dengan nominal sebesar Rp1.807.724.050,00. Sehingga dari hasil 853 unit jamban terbangun hanya terbayarkan sebesar 786 jamban, pembayaran 786 jamban dengan nominal Rp1.807.724,050,00 diterbitkan dengan SP2D Nomor 02148/LS-BANSOS/DAU/2022 tanggal 28 Desember 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.


BUPATI KEBUMEN,

H. ARIE SUGIYANTO, S.H